

Perusahaan Umum Kehutanan Negara
(Perum Perhutani) dan Entitas Anaknya/
and its Subsidiaries

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
*Consolidated financial statements as of December 31, 2025 and
for the year then ended with independent auditor's report*



Perhutani

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(DIAUDIT) /
DIRECTOR'S STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER
31, 2025 FOR THE YEAR THEN ENDED
(AUDITED)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini / *We, the undersigned:*

Nama / Name	:	Tio Handoko
Alamat Kantor / Office Address	:	Jalan TB Simatupang No. 22 Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540
Alamat Domisili / Domiciled at	:	Jalan TB Simatupang No. 22 Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540
Jabatan / Title	:	Direktur Utama/ President Director
Nama / Name	:	Sandy Mukhlisin
Alamat Kantor / Office Address	:	Jalan TB Simatupang No. 22 Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540
Alamat Domisili / Domiciled at	:	Jalan TB Simatupang No. 22 Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540
Jabatan / Title	:	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko/ Director of Finance & Risk Management

Menyatakan bahwa / *certify that:*

- | | |
|---|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak; | 1. We take the responsibility for the compilation and presentation of consolidated financial statements of the Company and Subsidiary; |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The consolidated financial statements of the Company and Subsidiary have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. All information in the consolidated financial statements of the Company and Subsidiary has been completely and properly disclosed; |
| b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. The consolidated financial statements of the Company and Subsidiary do not contain improper material information or fact, and do not omit any material information or fact; |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan Entitas Anak. | 4. We are responsible for the internal control system of the Company dan Subsidiary. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The statement is made truthfully.

Jakarta, 20 April 2026 / April 20, 2026

Perusahaan Umum Kehutanan Negara
(Perum Perhutani)


Tio Handoko
Direktur Utama / President Director




Sandy Mukhlisin
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko
/ Director of Finance & Risk Management

The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-2	<i>.....Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.....	3	<i>Consolidated Statement of Profit orLoss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>.....Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	5	<i>.....Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6-126	<i>..... Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

The original report included herein is in the Indonesian language

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00698/2.1505/AU.1/01/1609-5/1/IV/2026

Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara ("Perum Perhutani")

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Kehutanan Negara ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

Report No. 00698/2.1505/AU.1/01/1609-5/1/IV/2026

The Capital Owner, the Boards of Supervisory and Directors Perusahaan Umum Kehutanan Negara ("Perum Perhutani")

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements Perusahaan Umum Kehutanan Negara (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2025, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2025, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00698/2.1505/AU.1/01/1609-5/1/IV/2026 (lanjutan)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ("SPKN") yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal lain

Kami juga telah menerbitkan secara terpisah laporan-laporan bertanggal 20 April 2026, masing-masing atas: (i) kepatuhan Grup terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian, dan (ii) pengendalian internal Grup.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan Tahun 2025 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00698/2.1505/AU.1/01/1609-5/1/IV/2026 (continued)

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA") and State Financial Auditing Standards ("SPKN") established by the Audit Board of Republic of Indonesia ("BPK"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other matter

We have also separately issued reports dated April 20, 2026, on: (i) the Group's compliance with laws and regulations that directly and materially affect the presentation of its Consolidated financial statements, and (ii) the Group's internal control.

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2025 Annual Report (the "Annual Report") other than the accompanying consolidated financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00698/2.1505/AU.1/01/1609-5/1/IV/2026 (lanjutan)

Informasi lain (lanjutan)

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00698/2.1505/AU.1/01/1609-5/1/IV/2026 (continued)

Other information (continued)

Our opinion on the accompanying consolidated financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying consolidated financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00698/2.1505/AU.1/01/1609-5/1/IV/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00698/2.1505/AU.1/01/1609-5/1/IV/2026 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements (continued)

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00698/2.1505/AU.1/01/1609-5/1/IV/2026 (lanjutan)

Report No. 00698/2.1505/AU.1/01/1609-5/1/IV/2026 (continued)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.*
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan suatu opini audit atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an audit opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00698/2.1505/AU.1/01/1609-5/1/IV/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00698/2.1505/AU.1/01/1609-5/1/IV/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00698/2.1505/AU.1/01/1609-5/1/IV/2026 (lanjutan)

Report No. 00698/2.1505/AU.1/01/1609-5/1/IV/2026 (continued)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan SPKN yang ditetapkan BPK juga mencakup pengujian atas: (i) kepatuhan Grup terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup, dan (ii) pengendalian internal Grup.

An audit conducted in accordance with SPKN established by BPK also includes testing of the: (i) Group's compliance with laws and regulations that directly affect and material to the presentation of Group's consolidated financial statements, and (ii) Group's internal control.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

KAP Purwanto Susanti dan Surja

Damestar Hutagalung
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1609/Public Accountant Registration No. AP.1609

20 April 2026/ April 20, 2026



**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4	282.336	263.794	Cash and cash equivalents
Kas di bank dan deposito yang dibatasi penggunaannya	5	207.954	174.180	Restricted cash in banks and deposits
Piutang usaha	6	239.028	210.420	Trade receivables
Persediaan	8	307.025	453.063	Inventories
Pajak dibayar dimuka	9a	4.416	7.334	Prepaid taxes
Aset biologis	11	682.065	728.560	Biological assets
Aset lancar lainnya	7a	129.345	128.539	Other current assets
Total aset lancar		1.852.169	1.965.890	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Klaim pengembalian pajak	9b	43.934	53.654	Claims for tax refund
Investasi saham dan investasi pada entitas asosiasi	10	117.597	117.564	Share investment and investment in associates
Aset tetap	13	2.435.568	2.498.497	Fixed assets
Aset biologis	11	13.909.408	13.581.780	Biological assets
Aset pajak tangguhan	9h	19.036	16.436	Deferred tax assets
Aset hak guna	12	17.038	30.757	Right-of-use assets
Aset tidak lancar lainnya	7b	20.640	37.424	Other non-current assets
Total aset tidak lancar		16.563.221	16.336.112	Total non-current assets
TOTAL ASET		18.415.390	18.302.002	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir
merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements
form an integral part of these consolidated financial statements.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	14	143.160	189.424	Trade payables
Beban akrual	15	201.413	190.057	Accrued expenses
Utang pajak	9c	479.868	280.242	Taxes payables
Pinjaman bank jangka pendek	16a	791.358	708.598	Short-term bank loans
Bagian lancar atas pinjaman bank jangka panjang	16b	155.001	83.333	Current maturities of long-term bank loans
Bagian lancar atas pinjaman jangka panjang lainnya	16c	2.082	2.082	Other long-term loans
Bagian lancar atas liabilitas sewa	12	20.394	22.039	Current maturities of lease liabilities
Liabilitas jangka pendek lainnya	17	175.106	188.311	Other short-term liabilities
Bagian lancar liabilitas imbalan kerja	18	204.481	197.876	Current maturities of employee benefits liability
Total liabilitas jangka pendek		2.172.863	1.861.962	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka panjang	16b	-	155.001	Long-term bank loans
Pinjaman jangka panjang lainnya	16c	88.267	93.435	Other long-term loans
Liabilitas sewa	12	3.241	11.284	Lease liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	9h	2.392.060	2.380.326	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja	18	1.390.759	1.437.582	Employee benefits liability
Liabilitas jangka panjang lainnya		9.995	7.251	Other long-term liabilities
Total liabilitas jangka panjang		3.884.322	4.084.879	Total non-current liabilities
TOTAL LIABILITAS		6.057.185	5.946.841	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal negara	19	2.586.303	2.586.303	State capital
Tambahan modal disetor	20	(1.334.150)	(1.334.150)	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
Belum dicadangkan		6.720.389	7.020.048	Unappropriated
Dicadangkan:				Appropriated:
Cadangan umum		4.386.404	4.082.141	General reserves
Cadangan tujuan khusus	19	9.694	9.694	Special purpose reserves
Total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		12.368.640	12.364.036	Total equity attributable to owners of the parent
Kepentingan non-pengendali		(10.435)	(8.875)	non-controlling interests
TOTAL EKUITAS		12.358.205	12.355.161	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		18.415.390	18.302.002	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31				
	2025	Catatan/ Notes	2024	
Pendapatan	4.214.844	21	4.558.004	Revenue
Beban pokok pendapatan	(3.481.848)	22	(3.860.452)	Cost of revenue
LABA BRUTO	732.996		697.552	GROSS PROFIT
Perubahan nilai wajar aset biologis	625.521	11	767.712	Changes in fair value of biological assets
Beban pemasaran dan distribusi	(70.614)	23	(73.125)	Selling and distribution expenses
Beban umum dan administrasi	(1.168.246)	24	(1.026.269)	General and administrative expenses
Penghasilan operasi lain	174.541	25	164.805	Other operating income
Beban operasi lain	(121.549)	26	(101.454)	Other operating expenses
LABA USAHA	172.649		429.221	OPERATING INCOME
Bagian laba entitas asosiasi	10.187		23.682	Share in profit of associates
Pendapatan keuangan	18.331		15.918	Finance income
Beban keuangan	(70.391)	27	(71.729)	Finance costs
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	130.776		397.092	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan	(48.990)	9e	(94.313)	Income tax expense
LABA TAHUN BERJALAN	81.786		302.779	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
<u>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi</u>				<u>Items that will not be reclassified to profit or loss</u>
Laba (rugi) pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(99.451)	18	40.665	Gain (loss) on Remeasure of employee benefits liability
Pajak penghasilan terkait	20.709	9h	(11.456)	Related income tax
Laba (rugi) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(78.742)		29.209	Other comprehensive income (loss) for the year, net of tax
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3.044		331.988	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:				Profit For The Year Attributable To:
Pemilik entitas induk	83.346		304.263	Owner of parent entity
Kepentingan non-pengendali	(1.560)		(1.484)	Non-controlling interests
TOTAL	81.786		302.779	TOTAL
Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:				Total Comprehensive Income Attributable To:
Pemilik entitas induk	4.604		333.473	Owner of parent entity
Kepentingan non-pengendali	(1.560)		(1.485)	Non-controlling interests
TOTAL	3.044		331.988	TOTAL

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir
merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements
form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
Years Ended December 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent									
Catatan/ Notes	Modal negara/ State capital	Tambahkan modal disetor/ Additional paid-in capital	Saldo laba/Retained earnings			Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interests	Total ekuitas/ Total equity		
			Cadangan tujuan khusus/ Special purpose reserves	Cadangan umum/General reserves	Belum dicadangkan/ Unappropriated				
									Total/Total
Saldo 31 Desember 2023	2.586.303	(1.334.148)	103.145	3.607.921	7.188.501	12.151.722	(7.392)	12.144.330	Balance as of December 31, 2023
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	304.263	304.263	(1.484)	302.779	Profit for the year
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	-	-	29.210	29.210	(1)	29.209	Remeasurement of employee benefits liability, net of tax
Cadangan umum	19	-	-	474.220	(474.220)	-	-	-	General reserves
Penggunaan cadangan tujuan khusus	19	-	(93.451)	-	-	(93.451)	-	(93.451)	Utilization of special purpose reserve
Hibah saham IHT I & IHT V ke Negara Republik Indonesia	1c	-	(2)	-	-	(2)	2	-	Grant of IHT I & IHT V shares to the Republic of Indonesia
Dividen kas	19	-	-	-	(27.706)	(27.706)	-	(27.706)	Cash dividend
Saldo 31 Desember 2024	2.586.303	(1.334.150)	9.694	4.082.141	7.020.048	12.364.036	(8.875)	12.355.161	Balance as of December 31, 2024
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	83.346	83.346	(1.560)	81.786	Profit for the year
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	-	-	(78.742)	(78.742)	(0)	(78.742)	Remeasurement of employee benefits liability, net of tax
Cadangan umum	19	-	-	304.263	(304.263)	-	-	-	General reserves
Saldo 31 Desember 2025	2.586.303	(1.334.150)	9.694	4.386.404	6.720.389	12.368.640	(10.435)	12.358.205	Balance as of December 31, 2025

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2025	Catatan/ Notes	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari pelanggan	4.161.292		4.555.630
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	(1.428.681)		(2.170.578)
Pembayaran kepada karyawan	(2.334.018)		(2.205.509)
Penerimaan lain-lain	103.599		59.586
Pembayaran pajak penghasilan badan	(37.954)		(43.290)
Pembayaran beban keuangan	(70.391)		(69.191)
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya jangka pendek	(33.774)		(78.717)
Kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasi	360.073		47.931
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI			
Penarikan kas yang dibatasi penggunaannya jangka panjang	20.437		36.946
Penerimaan dividen	10.186		17.053
Perolehan aset tetap	(98.107)		(167.085)
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya jangka panjang	(56.000)		-
Penambahan aset biologis	(182.623)		(157.965)
Kas netto yang digunakan untuk untuk aktivitas investasi	(306.107)		(271.051)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek	82.760	31	213.284
Penerimaan pinjaman bank jangka panjang	-	31	190.000
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham	-	19	(27.706)
Pembayaran pinjaman jangka panjang lainnya	(5.168)	31	(7.676)
Pembayaran utang sewa	(28.920)	31	(27.561)
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	(83.333)	31	(111.815)
Kas netto yang diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(34.661)		228.526
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	19.305		5.406
Dampak netto atas perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas	(763)		(1.065)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	263.794	4	259.453
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	282.336	4	263.794

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir
merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements
form an integral part of these consolidated financial statements.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Umum Kehutanan Negara ("Perum Perhutani"), selanjutnya disebut "Perusahaan", didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 15 Tahun 1972 yang diubah dengan PP No. 36 Tahun 1986. Pada tahun 1998, Pemerintah menerbitkan PP No. 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum). Dengan diterbitkannya PP ini, peraturan yang mendasari terbentuknya Perum Perhutani diatur kembali, yaitu dengan PP No. 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Berdasarkan PP No. 14 Tahun 2001, tanggal 23 Maret 2001 bentuk Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Perubahan status ini dituangkan dalam akta No. 3 tanggal 2 Juli 2001 oleh Notaris Imas Fatimah dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan ("SK") No. C-05080.HT.01.01.TH.2001 tanggal 7 Agustus 2001.

Pada tahun 2003, bentuk Perusahaan kembali berubah menjadi "Perusahaan Umum" sesuai dengan PP No. 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum (Perum Perhutani). Perubahan ini telah dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 67.

Peraturan kembali berubah dengan PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, dimana wilayah kerja Perusahaan meliputi seluruh hutan negara yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten.

Sesuai dengan Pasal 11 PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip hutan lestari dan tata kelola perusahaan yang baik.

1. GENERAL

a. The Company establishment

Perusahaan Umum Kehutanan Negara ("Perum Perhutani") hereinafter referred to as (the "Company"), was established by Government Regulation ("PP") No. 15 of 1972 as amended by PP No. 36 of 1986. In 1998, the Government issued PP No. 13 of 1998 on Perusahaan Umum (Perum). With the issuance of this PP, the rules underlying the formation of Perum Perhutani were updated by PP No. 53 of 1999 regarding Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Based on PP No. 14 of 2001, dated March 23, 2001, the legal business form changed from Perum Perhutani to Perusahaan Perseroan (Persero).

This legal business transformation was stipulated in notarial deed No. 3 dated July 2, 2001 by Notary Imas Fatimah and was approved by the Ministry of Justice and Human Rights by Decree ("SK") No. C-05080. HT.01.01.TH.2001 dated August 7, 2001.

In 2003, the Company changed the legal form to "Perusahaan Umum" in accordance with PP No. 30 of 2003 concerning the Perusahaan Umum (Perum Perhutani). These changes have been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 No. 67.

The regulation was further amended with PP No. 72 of 2010 on Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, where the Company covers the entire working area of state forest located in Central Java, East Java, West Java and Banten Province.

In accordance with Article 11 of PP No. 72 of 2010 on Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, the purposes and objectives of the Company are conducting business aimed at public benefit in the form of supplying goods and/or services associated with high quality forest management and forest products at an affordable price by the community based on the principles of sustainable forestry and good corporate governance.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Untuk mencapai maksud dan tujuan ini, Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pengelolaan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi, pendidikan dan pelatihan di bidang kehutanan, penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan, pengembangan agroforestri, membangun dan mengembangkan hutan rakyat dan/atau hutan tanaman rakyat dan perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain.

Selain kegiatan usaha, Perusahaan juga dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain berupa usaha optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki untuk kantor perdagangan, kompleks agroindustri, agrobisnis, properti, pergudangan, pariwisata, hotel, resort, rest area, rumah sakit, pertambangan galian, prasarana telekomunikasi, pemanfaatan sumber daya air, dan sumber daya alam lainnya, dan kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Perusahaan berkantor pusat di Jakarta, Graha Perhutani Jl. TB Simatupang No. 22, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, susunan Dewan Pengawas Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2025
Ketua	*)
Anggota	*)
Anggota	*)
Anggota	*)
Anggota	*)
Anggota	Yohanes Baptisa Priyatmo Hadi *)

*) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan pada tanggal 28 Januari 2026 (Catatan 33).

1. GENERAL (continued)

a. The Company establishment (continued)

To achieve the above purposes, the Company has the following primary business activities: forest governance and forest management planning, forest exploiting management, which includes the area utilization, environmental services, utilization and collection of timber and non-timber forest products, rehabilitation and reclamation, forest protection and nature conservation, production of forest products as raw material and finished goods, education and training in the field of forestry, research and development in the field of forestry, agroforestry development, build and develop forests community and/or forest smallholder crop and forest products trade and production of its own production and other parties.

In addition to its main business activities, the Company also may conduct other business activities such as optimisation of potential owned resource for trading house, agroindustrial complex, agribusiness, property, warehousing, tourism, hotels, resorts, rest areas, hospitals, mining quarrying, telecommunications infrastructures, utilization of water resources, and other natural resources and other business activities in accordance with the purposes and objectives of the Company.

The Company's headquarter is in Jakarta, Graha Perhutani at Jl. TB Simatupang No. 22, Jati Padang, Pasar Minggu, South Jakarta.

As of December 31, 2025 and 2024, the composition of the Company's Board of Supervisory was as follows:

	2024	
Bambang Hendroyono		Chairman
Bambang Risyanto		Member
Chalid Muhammad		Member
Komaruddin Simanjuntak		Member
Noer Fauzi Rachman		Member
Yohanes Baptisa Priyatmo Hadi		Member

*) The appointment of the members of Supervisory Board was carried out on January 28, 2026 (Note 33).

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, susunan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2025	
Plt. Direktur Utama	Natalas Anis Harjanto*)	President Director
Direktur Perencanaan dan Pengembangan	Endung Trihartaka*)	Director of Planning and Development
Direktur Operasi	Natalas Anis Harjanto	Director of Operation
Direktur Komersial	Anggar Widiyatmoko	Director of Commercial
Direktur Sumber Daya Manusia, Umum dan Informasi Teknologi	Muhammad Denny Ermansyah*)	Director of Human Resources, General, and Information Technology
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Sandy Mukhlisin	Director of Finance and Risk Management
	2024	
Direktur Utama	Wahyu Kuncoro	President Director
Direktur Perencanaan dan Pengembangan	Endung Trihartaka	Director of Planning and Development
Direktur Operasi	Natalas Anis Harjanto	Director of Operation
Direktur Komersial	Anggar Widiyatmoko	Director of Commercial
Direktur Sumber Daya Manusia, Umum dan Informasi Teknologi	Muhammad Denny Ermansyah	Director of Human Resources, General, and Information Technology
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Sandy Mukhlisin	Director of Finance and Risk Management

*) Pada tanggal 24 Februari 2026 dan 10 Maret 2026, terdapat perubahan Direktur Utama, Direktur Perencanaan dan Pengembangan, dan Direktur Sumber Daya Manusia, Umum dan Informasi Teknologi (Catatan 33).

As of December 31, 2025 and 2024, the composition of the Company's Directors was as follows:

	2025	
Plt. Direktur Utama	Natalas Anis Harjanto*)	President Director
Direktur Perencanaan dan Pengembangan	Endung Trihartaka*)	Director of Planning and Development
Direktur Operasi	Natalas Anis Harjanto	Director of Operation
Direktur Komersial	Anggar Widiyatmoko	Director of Commercial
Direktur Sumber Daya Manusia, Umum dan Informasi Teknologi	Muhammad Denny Ermansyah*)	Director of Human Resources, General, and Information Technology
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Sandy Mukhlisin	Director of Finance and Risk Management
	2024	
Direktur Utama	Wahyu Kuncoro	President Director
Direktur Perencanaan dan Pengembangan	Endung Trihartaka	Director of Planning and Development
Direktur Operasi	Natalas Anis Harjanto	Director of Operation
Direktur Komersial	Anggar Widiyatmoko	Director of Commercial
Direktur Sumber Daya Manusia, Umum dan Informasi Teknologi	Muhammad Denny Ermansyah	Director of Human Resources, General, and Information Technology
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Sandy Mukhlisin	Director of Finance and Risk Management

*) On February 24, 2026 and March 10, 2026, there were changes in the President Director, Director of Planning and Development, and Director of Human Resources, General and Information Technology (Note 33).

	2025
Komite Manajemen Risiko	Adrian Bestari
Komite Manajemen Risiko	Muhdi Al Fajar
Komite Audit	Deni Sulistyio
Komite Audit	Agus Budi Wibowo

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup memiliki 12.852 orang karyawan (2024: 14.226 orang karyawan) (tidak diaudit).

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 20 April 2026.

	2024
Komite Manajemen Risiko	Adrian Bestari
Komite Manajemen Risiko	Muhdi Al Fajar
Komite Audit	M. Farkhan Supriyadi
Komite Audit	Agus Budi Wibowo

As of December 31, 2025, the Group had 12,852 employees (2024: 14,226 employees) (unaudited).

The management is responsible for the preparation and presentation of consolidated financial statements that were authorized to be issued by the Directors on April 20, 2026.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Modal

PP No. 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani menyatakan bahwa modal Perusahaan merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Nilai kekayaan negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan. Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2010, ditetapkan besarnya modal Perusahaan adalah sebesar seluruh nilai penyertaan modal negara dalam Perusahaan dengan jumlah sebesar Rp700.000.

Pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan PP No. 73 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. PP No. 73 Tahun 2014 ini menjelaskan tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara yang berasal dari pengalihan seluruh saham milik negara Republik Indonesia pada PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (PT Inhutani I) (Persero), PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) (Persero), PT Eksploitasi dan Industri Hutan III (PT Inhutani III) (Persero), PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV (PT Inhutani IV) (Persero), dan PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V) (Persero). Penambahan Penyertaan Modal Negara mengakibatkan perubahan status Perusahaan yang sebelumnya merupakan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V menjadi PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, Perusahaan menjadi Pemegang Saham PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V.

Penambahan penyertaan modal dari PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V sebesar masing-masing Rp450.333, Rp183.083, Rp324.120, Rp92.253, dan Rp132.659.

1. GENERAL (continued)

b. Capital

PP No. 30 of 2003 on Perum Perhutani stated that the Company's capital represents and is from separated state's wealth and is not divided into shares. The value of state's wealth was determined by the Minister of Finance based on the calculation made by the Ministry of Finance and the Ministry of Forestry. Based on PP No. 72 of 2010, the amount of the Company's capital is equal to the entire value of state's equity participation in the Company with a total amount of Rp700,000.

In 2014, the Government issued the PP No. 73 of 2014 on Additional Capital Investment of the Republic of Indonesia into Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. PP No. 73 of 2014 describes Additional Capital Investment of the Republic of Indonesia into Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara which was derived from the transfer of all shares owned by the Republic of Indonesia to PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (PT Inhutani I) (Persero), PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) (Persero), PT Eksploitasi dan Industri Hutan III (PT Inhutani III) (Persero), PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV (PT Inhutani IV) (Persero), and PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V) (Persero). Additional Capital Investment by the Company resulted in a change of status that was previously a Limited Liability Company (Persero) PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, and PT Inhutani V into PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, and PT Inhutani V which have to fully comply with the Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company. Thus, the Company became the Shareholders of PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, and PT Inhutani V.

The increase of share capital from PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, and PT Inhutani V amounting to Rp450,333, Rp183,083, Rp324,120, Rp92,253, and Rp132,659, respectively.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Modal (lanjutan)

Berdasarkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 619/KMK.06/2015 tanggal 25 Mei 2015 menetapkan tentang Penetapan Nilai Definitif Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara dari PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V masing-masing sebesar Rp1.211.262, Rp225.707, Rp308.509, Rp64.920, dan Rp75.905.

Pada tahun 2020, Perusahaan mengambil alih modal saham PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V dari Koperasi Karyawan PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V dengan nilai masing-masing sebesar Rp100, Rp30, Rp10, Rp10, dan Rp10. Pengambil alihan modal saham ini dituangkan dalam akta notaris tanggal 4 Mei 2020 oleh Dr. Dewi Tenty Septi Artiani dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Juni 2020.

c. Struktur Grup

1. GENERAL (continued)

b. Capital (continued)

SK Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 619/KMK.06/2015 dated May 25, 2015 stated the Determination of Definitive Additional Capital Investment of the Republic of Indonesia into Perum Kehutanan Negara equity's from PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, and PT Inhutani V amounting to Rp1,211,262, Rp225,707, Rp308,509, Rp64,920, and Rp75,905, respectively.

In 2020, the Company acquired share capital of PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, and PT Inhutani V from Koperasi Karyawan PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, and PT Inhutani V amounting to Rp100, Rp30, Rp10, Rp10, and Rp10. The shared acquisition was stipulated in notarial deed dated on May 4, 2020 by Dr. Dewi Tenty Septi Artiani and was approved by the Ministry of Justice and Human Rights dated June 10, 2020.

c. Group structure

No	Entitas anak/ Subsidiaries	Jenis usaha/ Nature of business	Kepemilikan/ Ownership		Tanggal pendirian/ Date of establishment	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			2025	2024		2025	2024
		<u>Kepemilikan langsung/ Direct ownership</u>					
1	PT Inhutani I	Pengelolaan hutan, pengusahaan, dan industri hasil hutan/Forest management, exploitation, and manufacturing of forest products	99,99%	99,99%	1973	817.959	819.277
2	PT Inhutani V	Pengelolaan hutan, pengusahaan, dan industri hasil hutan terutama gondorukem dan tebu/Forest management, exploitation, and manufacturing of forest products, primarily gum rosin, and sugar cane	99,99%	99,99%	1991	195.346	205.683
3	PT Perhutani Alam Wisata Risorsis	Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, pariwisata, dan perjalanan/ Running business in service, tourism, and travel sector	99,66%	99,66%	2002	145.399	121.228
4	PT BUMN Hijau Lestari	Proses likuidasi/ liquidation process	54,13%	54,13%	2009	4.568	4.568

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup (lanjutan)

No	Entitas anak/ Subsidiaries	Jenis usaha/ Nature of business	Kepemilikan/ Ownership		Tanggal pendirian/ Date of establishment	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			2025	2024		2025	2024
<u>Kepemilikan tidak langsung/ Indirect ownership</u>							
5	PT Penggaron Sarana Semesta	Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa /Running business in service sector	51,00%	51,00%	2018	4.577	7.064
6	PT Pola Inti Rimba	Pengelolaan hutan tanaman industri jasa / Forest Management-HT	99,00%	99,00%	1992	-	-

PT Penggaron Sarana Semesta, dimiliki oleh Perusahaan melalui PT Perhutani Alam Wisata Risorsis.

PT Penggaron Sarana Semesta, owned by the Company through PT Perhutani Alam Wisata Risorsis.

PT Pola Inti Rimba dimiliki Perusahaan melalui PT Inhutani I. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, PT Pola Inti Rimba dalam keadaan dormant, dan tidak memiliki aset.

PT Pola Inti Rimba owned by the Company through PT Inhutani I. As of December 31, 2025 and 2024, PT Pola Inti Rimba is dormant and has no assets.

d. Luas kawasan hutan

Luas kawasan hutan yang dikelola Perusahaan dan entitas anaknya per 31 Desember 2025 (dalam hektar) sebagai berikut:

d. Size of forest area

Forest area managed by the Company and its subsidiaries as of December 31, 2025 (in hectares) is as follows:

Wilayah/Area	Hutan produksi/ Production forest (Ha) ^{*)}	Hutan lindung/ Preserved forest (Ha) ^{*)}	Hutan alam/ Natural forest (Ha) ^{*)}	Hutan tanaman/ Planted forest (Ha) ^{*)}	Jumlah/Total ^{*)}
Jawa Timur/East Java	806.205	311.058	-	-	1.117.263
Jawa Barat dan Banten/ West Java and Banten	449.898	237.962	-	-	687.860
Jawa Tengah/Central Java	551.645	83.742	-	-	635.387
Kalimantan Utara/ North Kalimantan	-	-	459.365	-	459.365
Kalimantan Timur/ East Kalimantan	-	-	314.930	77.175	392.105
Kalimantan Selatan/ South Kalimantan	-	-	12.365	97.272	109.637
Kalimantan Barat/ West Kalimantan	-	-	-	66.750	66.750
Lampung/Lampung	-	-	-	56.547	56.547
Bangka Belitung Bangka Belitung	-	-	-	16.730	16.730
Sulawesi Selatan/ South Sulawesi	-	-	-	11.045	11.045
Kalimantan Tengah/ Central Kalimantan	-	-	-	5.794	5.794
Total/Total	1.807.748	632.762	786.660	331.313	3.558.483

^{*)}tidak diaudit/unaudited

Luas kawasan hutan tersebut diatas, termasuk kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (Catatan 29d).

The forest area above includes forest areas with special management (Note 29d).

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 34 dibawah ini.

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar kelangsungan usaha.

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Grup menerapkan untuk pertama kalinya beberapa standar dan amandemen tertentu yang efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 (kecuali dinyatakan lain). Grup tidak melakukan penerapan dini atas standar, interpretasi, atau amandemen lain yang telah diterbitkan namun belum efektif.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION**

**a. Basis of preparation of consolidated financial
statements**

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia or DSAK IAI).

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the consolidated financial statements herein.

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 34.

The Group has prepared the consolidated financial statements on the going concern basis.

b. Changes in accounting principles

The Group applied for the first-time certain standards and amendments, which are effective for annual periods beginning on or after 1 January 2025 (unless otherwise stated). The Group has not early adopted any other standard, interpretation or amendment that has been issued but is not yet effective.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

b. Changes in accounting principles (continued)

Amandemen PSAK 221: Kekurangan
Ketertukaran

Amendment of PSAK 221: Lack of Exchangeability

Amandemen tersebut menetapkan bagaimana entitas harus menilai apakah suatu mata uang dapat dipertukarkan serta bagaimana entitas harus menentukan kurs spot ketika ketertukaran (*exchangeability*) tidak tersedia. Amandemen tersebut juga mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana ketidakmampuan mata uang tersebut untuk dipertukarkan dengan mata uang lainnya memengaruhi, atau diharapkan akan memengaruhi, kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas.

The amendments specifies how an entity should assess whether a currency is exchangeable and how it should determine a spot exchange rate when exchangeability is lacking. The amendments also require disclosure of information that enables users of its financial statements to understand how the currency not being exchangeable into the other currency affects, or is expected to affect, the entity's financial performance, financial position and cash flows.

Amandemen ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

This amendment did not have any impact on the Group's consolidated financial statements

PSAK 117: Kontrak Asuransi

PSAK 117: Insurance Contracts

PSAK 117 merupakan standar akuntansi baru yang komprehensif mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan untuk kontrak asuransi. PSAK 117 menggantikan PSAK 104: *Kontrak Asuransi*. PSAK 117 berlaku untuk seluruh jenis kontrak asuransi (yaitu, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung, dan reasuransi), tanpa memandang jenis entitas yang menerbitkannya, serta berlaku pula untuk jenis garansi tertentu dan instrumen keuangan dengan fitur partisipasi diskresioner.

PSAK 117 is a comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure. PSAK 117 replaces PSAK 104 Insurance Contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts (i.e., life, non-life, direct insurance and re-insurance), regardless of the type of entities that issue them as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features.

Tujuan utama PSAK 117 adalah menyediakan model akuntansi yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang lebih berguna dan konsisten bagi entitas asuransi, mencakup seluruh aspek akuntansi yang relevan. PSAK 117 didasarkan pada model umum yang dilengkapi dengan:

The overall objective of PSAK 117 is to provide a comprehensive accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers, covering all relevant accounting aspects. PSAK 117 is based on a general model, supplemented by:

- Penyesuaian khusus untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung (*variable fee approach*)
- Pendekatan yang disederhanakan (*premium allocation approach*) yang terutama berlaku untuk kontrak berdurasi pendek

- A specific adaptation for contracts with direct participation features (the variable fee approach)
- A simplified approach (the premium allocation approach) mainly for short-duration contracts

Standar baru tersebut tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

The new standard had no impact on the Group's consolidated financial statements.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Entitas-entitas Anaknya. Kendali diperoleh ketika Grup terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal dibawah ini:

- i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
- ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- i) pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii) hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- iii) hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

c. Principles of consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its Subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the investor controls an investee if and only if the investor has all of the following:

- i) Power over the investee, that is existing rights that give the investor current ability to direct the relevant activities of the investee,
- ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
- iii) The ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- i) the contractual arrangement with the other vote holders of the investee,
- ii) rights arising from other contractual arrangements, and
- iii) the Group's voting rights and potential voting rights.

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain ("PKL") diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk goodwill), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

d. Investasi pada entitas asosiasi

Laba rugi konsolidasian mencerminkan bagian dari Grup atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Perubahan PKL dari entitas asosiasi disajikan sebagai bagian dari PKL Grup. Selain itu, bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, Grup mengakui bagiannya atas perubahan, jika sesuai, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepentingan dalam entitas asosiasi.

Gabungan bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi disajikan pada muka laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (sebagai laba atau rugi) di luar laba usaha dan mencerminkan laba atau rugi setelah pajak dan kepentingan nonpengendali pada entitas anak dari entitas asosiasi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

c. Principles of consolidation (continued)

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

d. Investment in associates

The consolidated profit or loss reflects the Group's share of the results of operations of the associate. Any change in OCI of the associate is presented as part of the Group's OCI. In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Group recognizes its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.

The aggregate of the Group's share of profit or loss of an associate is shown on the face of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (as profit or loss) outside operating profit and represents profit or loss after tax and NCI in the subsidiaries of the associate.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

d. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

d. Investment in associates (continued)

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Grup.

The financial statements of the associate are prepared for the same reporting period of the Group.

Setelah penerapan metode ekuitas, Grup menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Grup dalam entitas asosiasi. Grup menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Grup menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

After the implementation of equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investment in associates. The Group determines whether there is objective evidence that the investment in the associate is impaired at each reporting date. In this regard, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount and the carrying value and recognizes the amount in the consolidated statement of comprehensive income.

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Grup mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

When there is a loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

e. Klasifikasi lancar dan tak lancar

e. Current and non-current classification

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

- i) expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,*
- ii) held primarily for the purpose of trading,*
- iii) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.*

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

All other assets are classified as non-current.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

e. Klasifikasi lancar dan tak lancar (lanjutan)

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak memiliki hak pada akhir periode pelaporan untuk menangguhkan pelunasannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan kewajiban tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

f. Kombinasi bisnis

Kombinasi bisnis, jika ada, dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban-beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**e. Current and non-current classification
(continued)**

A liability is current when it is:

- i) expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- iv) there is no right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

f. Business combinations

Business combinations, if any, are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value, and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer selects whether it measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as of the acquisition date.

If the business combination is achieved in stages, the acquirer is remeasured the previously held equity interest in the acquiree at fair value in the acquisition date and recognized gain or loss through consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

f. Kombinasi bisnis (lanjutan)

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diasumsikan. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto Entitas Anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen menilai kembali identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Grup yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

g. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Grup menentukan bahwa mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan konsolidasian adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsionalnya setiap entitas dalam Grup. Transaksi dalam mata uang asing selain Rupiah dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah terakhir yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada tahun tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam laba atau rugi tahun berjalan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

f. Business combinations (continued)

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the Subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously assessing the identification and fair value measurement of the acquired assets and the assumed liabilities.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group's Cash-generating Units ("CGU") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those CGUs.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operations within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

g. Transactions and balances in foreign currencies

The Group determines that the reporting currency used in the consolidated statements is the Rupiah, which is also the functional currency of each entity in the Group. Transactions in currencies other than Rupiah are recorded at the prevailing rates of exchange in effect on the date of transactions.

As of reporting date, monetary asset and liabilities denominated in foreign currencies are translated to Rupiah using the last middle exchange rates published by Bank Indonesia on those years. The resulting net foreign exchange gains or losses are recognized in current year's profit or loss.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**g. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing
(lanjutan)**

Kurs yang digunakan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp16.782 dan Rp16.162 untuk 1 Dolar Amerika Serikat.

h. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 224: *Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi*.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 28.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

i. Kas dan setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya

Kas dan setara kas terdiri atas kas dan bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak saat penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman, serta tidak dibatasi penggunaannya.

Kas yang dibatasi penggunaannya termasuk kas di bank yang digunakan sebagai jaminan pelaksanaan dan deposito berjangka yang digunakan sebagai agunan atas pinjaman bank yang disajikan sebagai aset lancar.

j. Piutang

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE, dikurangi dengan penyisihan untuk penurunan nilai. Jika piutang diharapkan tertagih dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika lebih dari satu tahun, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**g. Transactions and balances in foreign
currencies (continued)**

The exchange rates used as of December 31, 2025 and 2024 were Rp16,782 and Rp16,162, respectively, for 1 United States Dollar.

h. Transactions with related parties

The Group have transactions with related parties as defined in PSAK 224: *Related Party Disclosures*.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties. Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 28.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Note to the consolidated financial statements are unrelated parties.

i. Cash and cash equivalents and restricted cash

Cash and cash equivalents include cash on hand and in banks and time deposits with maturity periods of 3 months or less at the time of placement and not used as collateral and unrestricted in use.

Restricted cash include cash in banks used as performance guarantee and time deposits which are pledged for bank loans presented under current assets.

j. Receivables

Trade receivables and other receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the EIR method, less provision for impairment. If the expected uncollectible accounts receivable within one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), the receivables are classified as current assets. If more than one year, these receivables are presented as non-current assets.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

k. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto dan meliputi seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang terjadi untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisinya yang sekarang. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Biaya yang dikeluarkan untuk setiap produk agar berada pada lokasi dan kondisi siap untuk dijual dicatat sebagai berikut:

- i) Bahan baku, suku cadang dan bahan pembantu: harga pembelian;
- ii) Barang jadi dan persediaan dalam proses: biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung dan bagian proporsional dari beban overhead berdasarkan kapasitas operasi normal namun tidak termasuk biaya pinjaman

Sehubungan dengan pembelian bahan baku, biaya perolehan awal persediaan termasuk pengalihan keuntungan dan kerugian atas lindung nilai arus kas kualifikasian, diakui dalam PKL.

Grup menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

l. Aset biologis

Aset biologis terdiri atas tanaman tebang dan produk agrikultur yang tumbuh pada tanaman produktif.

Aset biologis dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dari aset biologis pada setiap tanggal pelaporan dimasukkan dalam laba rugi pada tahun terjadinya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

k. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value and cover all the cost of purchase, conversion cost and other costs that take the inventory to its location and its condition now. Cost of inventories is determined using the weighted average method. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Costs incurred in bringing each product to its present location and condition are accounted for as follow:

- i) Raw materials, spare parts and factory supplies: purchase cost;*
- ii) Finished goods and work in-process: cost of direct materials and labor and a proportion of manufacturing overheads based on normal operating capacity but excluding borrowing costs*

Initial cost of inventories includes the transfer of gains and losses on qualifying cash flow hedges, recognized in OCI, in respect of the purchases of raw materials.

The Group provides allowance for net realizable value of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable values of the inventories.

l. Biological assets

Biological assets comprise of consumable plant and agriculture produce growing on bearer plant.

Biological assets are stated at fair value less costs to sell. Gains or losses arising on initial recognition of agricultural produce at fair value less costs to sell and from the change in fair value less costs to sell of the biological assets at each reporting date are included in the profit or loss for the year in which they arise.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

l. Aset biologis (lanjutan)

Karena harga pasar tidak tersedia untuk tanaman tebangan, nilai wajarnya diestimasi menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*) berdasarkan nilai kini dari arus kas masa depan neto yang diharapkan, didiskontokan dengan tingkat diskonto berdasarkan kondisi kini pasar.

Tanaman tebangan terdiri dari kayu jati dan kayu rimba. Kayu jati dan kayu rimba digolongkan menjadi kayu tegakan sampai dengan siap dipanen.

Kayu jati dan kayu rimba sejak saat penanaman sampai dengan siap dipanen dikategorikan sebagai aset biologis bagian tidak lancar, sedangkan kayu jati dan kayu rimba yang akan dipanen dalam waktu satu tahun digolongkan sebagai aset biologis bagian lancar.

Tanaman pinus, karet, dan beberapa jenis tanaman produksi lainnya adalah tanaman produktif sehingga disajikan dan diperhitungkan sebagai tanaman produktif penghasil produk agrikultur. Namun, getah pinus, getah karet dan hasil produk lainnya yang tumbuh pada tanaman, dicatat sebagai produk agrikultur yang tumbuh pada tanaman produktif sampai waktu panen. Getah pinus, getah karet dan hasil produk lainnya dipindahkan ke persediaan dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk dijual ketika dipanen.

Perubahan nilai wajar tanaman tebangan serta produk agrikultur diakui dalam laporan laba rugi.

Produk agrikultur atas tanaman pinus, karet dan beberapa jenis tanaman produktif lainnya di kategorikan sebagai aset biologis bagian lancar.

Biaya untuk menanam seperti biaya pembelian bibit, biaya tenaga kerja penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pemanenan dan biaya lain-lain dikapitalisasi sebagai bagian dari aset biologis dan akan dilakukan penyesuaian berkala terhadap pengukuran nilai wajar aset biologis.

m. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

l. Biological assets (continued)

As the market determined prices are not readily available for consumable plants, their fair values are estimated using income approach based on the present values of the expected future cash flows, discounted at a current market determined discount rate.

Consumable plants comprise of teak wood and forest trees. Teak wood and forest trees are classified as timber standing until they are ready to produce.

Teak wood and forest trees from the time of planting until they are ready to be harvested are categorized as non-current biological assets, while teak and forest trees which will be produced within one year are classified as the current biological assets.

Pine trees, rubber plants and other types of bearer plants are productive plants, so they are presented and calculated as bearer plants. However, pine sap, rubber lump and other products that grow on plants, are recorded as biological produce growing on bearer plant until harvest time. Pine sap, rubber lump and other products are transferred to inventories at fair value less costs to sell when produced.

Changes in the fair value of consumable plants and agricultural products are recognized in the income statement.

Biological produce of pine trees, rubber plants and several other types of productive plants are categorized as current biological assets.

Costs for planting such as the cost of purchasing seeds, labor costs for planting, fertilizing, maintenance, producing and other costs are capitalized as part of biological assets and periodic adjustments will be made to the measurement of the fair value of biological assets.

m. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

m. Financial instruments (continued)

Aset Keuangan

Financial assets

Pengakuan dan Pengukuran awal

Initial recognition and Measurement

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal untuk selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL"), atau nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR").

Financial assets are classified, at initial recognition, as subsequently measured at amortised cost, fair value through other comprehensive income ("FVOCI"), and fair value through profit or loss ("FVTPL").

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 115, seperti diungkapkan pada Catatan 2x.

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at Fair Value through Profit or Loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 115, as disclosed in Note 2x.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI")' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pendapatan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Pengukuran Selanjutnya

Subsequent Measurement

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas), dan
- Nilai wajar melalui laba rugi (NWLR).

- Financial assets at amortized cost (debt instruments),
- Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),
- Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and
- Fair value through profit or loss (FVTPL).

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing seperti berikut ini:

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

*Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi
(instrumen utang)*

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk piutang usaha dan lain-lain, piutang plasma, dan pinjaman kepada pihak berelasi yang merupakan bagian dari aset keuangan tidak lancar lainnya.

Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas).

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di PKL. Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

Instrumen utang Grup yang diukur pada NWPKL termasuk investasi pada instrumen utang dengan kuota yang termasuk dalam aset keuangan tidak lancar lainnya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

m. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost includes trade and other receivables, plasma receivables, and loans to related parties under other non-current financial assets.

Financial asset designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments).

For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

The Group's debt instruments at FVOCI include investments in quoted debt instruments included under other non-current financial assets.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas).

Pada pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang tidak dapat dikembalikan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 232: Instrumen keuangan: Penyajian dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah didaur ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Grup memilih untuk mengklasifikasi secara takterbatalkan investasi ekuitas yang tidak terdaftar di bursa masuk dalam kategori ini.

Aset Keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR")

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Kategori ini termasuk instrumen derivatif dan investasi ekuitas yang diperdagangkan di bursa efek yang mana oleh Grup diklasifikasikan secara takterbatalkan pada NWPKL. Dividen atas investasi ekuitas yang tercatat di bursa diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

m. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Financial asset designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments).

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 232: Financial instruments: Presentation and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.

The Group elected to classify irrevocably its non-listed equity investments under this category.

Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL")

Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss.

This category includes derivative instruments and listed equity investments which the Group had not irrevocably elected to classify at FVOCI. Dividends on listed equity investments are recognized as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

*Aset Keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi
("NWLR") (lanjutan)*

Derivatif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama non-keuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLR. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan diluar dari kategori NWLR.

Penghentian pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir;
Atau
- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan 'pass-through', dan salah satu dari (a) Grup telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

m. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Financial assets at fair value through profit or loss
("FVTPL") (continued)

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at FVTPL. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the FVTPL category.

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the assets have expired;*
Or
- *The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

*Aset Keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi
("NWLR") (lanjutan)*

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan 'pass-through', Grup mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Grup masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Grup tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Grup.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Grup untuk membayar kembali.

Penurunan Nilai

Grup mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur eksposur, terlepas dari jangka waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

m. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Financial assets at fair value through profit or loss
("FVTPL") (continued)

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

Impairment

The Group recognizes an allowance for ECL for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have not been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12 months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Karena aset kontrak, piutang usaha dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Grup tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (forward-looking) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Grup menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 365 hari dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Grup juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Grup tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Grup. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

Liabilitas keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

m. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Impairment (continued)

Because its contract assets, trade and other receivables do not contain significant financing components, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 365 days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

Financial liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Grup menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti utang usaha dan lain-lain, biaya masih harus dibayar, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang bank dan utang pihak berelasi.

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan pada NWLR

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dilakukan oleh Grup dimana instrumen derivatif tersebut tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 109: Instrumen keuangan. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal harus memenuhi kriteria dalam PSAK 109 dan ditetapkan pada tanggal pengakuan awal. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

m. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Initial Recognition and Measurement (continued)

The Group designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as trade and other payables, accrued expense, bank loans and due to related parties.

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Group that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 109: Financial instruments. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss.

Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 109 are satisfied. The Group has not designated any financial liability as at FVTPL.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

*Liabilitas keuangan pada biaya perolehan
diamortisasi (Utang dan pinjaman)*

- i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang
Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman
jangka panjang yang berbunga diukur pada
biaya perolehan yang diamortisasi dengan
menggunakan metode SBE. Pada tanggal
pelaporan, biaya bunga yang masih harus
dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok
pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka
pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada
laba rugi ketika liabilitas dihentikan
pengakuannya maupun melalui proses
amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan
mempertimbangkan setiap diskonto atau
premium atas akusisi dan komisi atau biaya
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban
keuangan pada laba rugi.

- ii) Utang dan Akrua

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain
jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan
liabilitas imbalan kerja jangka pendek
dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah
nosional), yang kurang lebih sebesar nilai
wajarnya.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan
pengakuannya pada saat kewajiban yang
ditetapkan dalam kontrak tersebut dihentikan atau
dibatalkan atau kadaluwarsa.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

m. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial liabilities at amortized cost (Loans and
borrowings)

- i) Long-term Interest-bearing Loans and
Borrowings

*Subsequent to initial recognition, long-term
interest-bearing loans and borrowings are
measured at amortized acquisition costs using
EIR method. At the reporting dates, accrued
interest is recorded separately from the
associated borrowings within the current
liabilities section. Gains and losses are
recognized in the profit or loss when the
liabilities are derecognized as well as through
the EIR amortization process.*

*Amortized cost is calculated by taking into
account any discount or premium on acquisition
and fees or costs that are an integral part of the
EIR. The EIR amortization is included in finance
costs in the profit or loss.*

- ii) Payables and Accruals

*Liabilities for current trade and other accounts
payable, accrued expenses and short-term
employee benefit liability are stated at carrying
amounts (notional amounts), which
approximate their fair values.*

Derecognition

*Financial liability is derecognized when the
obligation under the contract is discharged or
cancelled or expired.*

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

n. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka dibebankan melalui amortisasi sesuai masa manfaat masing-masing biaya yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

m. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Derecognition (continued)

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying values is recognized in profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

n. Prepaid expenses

Prepaid expenses are charged through amortization over the useful life of each of the related costs using straight line method.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

o. Aset tetap

o. Fixed assets

Tanaman produktif

Bearer plants

Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur; diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode; dan sangat jarang dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa hanya sesekali.

Bearer plants are living plants used in the production or supply of agricultural produce; are expected to bear produce for more than one period; and have a remote likelihood of being sold as agricultural produce, except for incidental scrap sales.

Tanaman produktif belum menghasilkan

Immature bearer plants

Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengembangan tanaman produktif belum menghasilkan, beban imbalan kerja dan biaya bunga sehubungan dengan kredit yang digunakan untuk pengembangan tanaman produktif belum menghasilkan dikapitalisasi sampai produksi komersial telah dicapai.

All of cost related to the bearer plant development, employee benefit expenses and borrowing cost related to the credit used for bearer plant development are capitalized until commercial production has been achieved.

Keterangan	Tahun Kapitalisasi/ Capitalization Year	Description
Tanaman Pinus	11	Pine
Tanaman Karet	5	Rubber
Tanaman Kayu Putih	3	Cajeput
Tanaman Gliricidia Sepium	3	Gliricidia Sepium
Tanaman Tebu	1	Sugar cane

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

o. Aset tetap (lanjutan)

Tanaman produktif (lanjutan)

Tanaman produktif menghasilkan

Biaya perolehan tanaman belum menghasilkan diklasifikasi ke tanaman menghasilkan pada saat tanaman tersebut mulai menghasilkan. Jangka waktu suatu tanaman dinyatakan mulai menghasilkan ditentukan oleh pertumbuhan vegetatif dan berdasarkan taksiran manajemen, dengan ketentuan sebagai berikut:

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat yang diestimasi sebagai berikut:

Keterangan	Tahun/ Year	Description
Tanaman Karet	25	Rubber
Tanaman Pinus	24	Pine
Tanaman Kayu Putih	22	Cajeput
Tanaman Gliricidia Sepium	12	Gliricidia Sepium
Tanaman Tebu	4	Sugar cane

Jumlah tercatat tanaman produktif direviu atas penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Umur manfaat aset dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan secara prospektif jika dipandang perlu.

Beban pemeliharaan tanaman produktif dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Grup manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Pembibitan

Biaya-biaya yang terjadi atas pembelian bibit dan pemeliharaannya dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya ini akan dipindahkan ke akun "Tanaman Belum Menghasilkan" pada saat siap ditanam.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

o. Fixed assets (continued)

Bearer plants (continued)

Mature bearer plants

Cost of immature plants classified into mature plants when the plants starts to produced. The period of a plants classified as mature depends on the vegetative growth and based on the management estimation with criteria as follows:

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives, estimated as follows:

The carrying amounts of bearer plants are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.

The asset useful lives and depreciation methods are reviewed at the end of each reporting year and adjusted prospectively if necessary.

Upkeep and maintenance costs of bearer plants are taken to profit or loss when they are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Seedlings

Costs incurred in the purchase of seeds and their maintenance are stated at cost. The accumulated costs are transferred to the "Immature Plant" account at the time of planting.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

o. Aset tetap (lanjutan)

o. Fixed assets (continued)

Aset tetap lainnya

Other fixed asset

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset-aset tersebut sebagai berikut:

Depreciation of an asset starts when it is available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets as follows:

Keterangan	Tahun/ Year	Description
Bangunan	10-20	Buildings
Jalan dan jembatan	4-20	Road and bridges
Mesin dan instalasi	4-16	Machinery and installations
Tempat penimbunan kayu	4-10	Wood landfills
Alat berat dan mesin industri	4-8	Heavy equipment and industrial machinery
Kendaraan bermotor	4-8	Vehicles
Peralatan kantor	4-8	Office equipment

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

The assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, at each financial year end.

Tanah pada dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa besar kemungkinan hak atas tanah tersebut dapat diperbarui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Land is stated at acquisition cost and not amortized as the management is of the opinion that it is probable that the titles can be renewed/extended upon expiration.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs that occur subsequently incurred to add, replace or repair fixed assets recorded as cost of the asset if and only if it is probable economic benefits in the future associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

Fixed assets are derecognized or sold in carrying value are removed from fixed assets section. Any gain or loss arising from sales of fixed assets included in profit or loss.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

o. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap lainnya (lanjutan)

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Aset tidak produktif

Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha diklasifikasikan ke akun aset tetap tidak produktif dalam akun aset tidak lancar lainnya - neto dan disajikan sebesar nilai setelah dikurangi penurunan nilai.

Penghapusan dan pemindahtanganan aset tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-02/MBU/2010, tentang tata cara penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap Badan Usaha Milik Negara.

Aset tetap yang diusulkan untuk dihapusbukuan yang selanjutnya telah mendapat persetujuan Direksi dan diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuan penghapusan oleh Pemegang Saham, maka biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak produktif tersebut direklasifikasi ke aset tidak produktif dalam akun aset tidak lancar lainnya - neto dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akumulasi penurunan nilai aset tidak produktif dibentuk sebagai penerapan atas akuntansi penurunan nilai.

Pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap usulan penghapusan ini, diakui sebagai pendapatan lain-lain (keuntungan penjualan aset tetap).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

o. Fixed assets (continued)

Other fixed asset (continued)

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is completed and ready to use.

Non-productive assets

Fixed assets not used in operation are classified as non-productive assets in the other non-current assets - net account and are presented net of impairment.

Write-off and transfer of non-productive assets follow the provisions set forth in the Regulation of Minister of State Own Enterprise No. PER-02/MBU/2010 on Procedures of Write-off and Transfer of Fixed Assets of State Own Enterprise.

The non-productive assets are proposed to be written-off with Directors, Board of Commissioners, and Shareholders approval. Cost and accumulated depreciation of the non-productive assets are presented as part of other non-current assets - net account in the consolidated statement of financial position. Accumulated impairment of the non-productive assets is provided based on the policy of impairment on non-financial assets.

Income earned from the sale of the non-productive assets is recognized as other income (gain on sale of fixed assets).

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

p. Aset takberwujud - Beban tangguhan hak atas tanah

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB"), dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB, dan HP diakui sebagai bagian dari akun "Beban Tangguhan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomis tanah.

q. Penurunan nilai aset - non keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Grup membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai, jika ada, diakui sebagai laba rugi sesuai dengan kategori beban yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui sebagai laba rugi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

p. Intangible assets - Deferred charges of land rights

Legal cost of land rights in the form of HGU, HGB, and Usage Rights ("Hak Pakai" or "HP") when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land under the "Fixed Assets" account and not amortized. Meanwhile, the extension or the legal renewal costs of land rights in the form of HGU, HGB, and HP were recognized as part of "Deferred Charges" account in the consolidated statement of financial position and were amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

q. Impairment of non-financial assets

The Group assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Impairment losses, if any, are recognized as profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

r. Sewa

Grup mengevaluasi pada inisiasi kontrak bila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Sebagai Penyewa

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Aset Hak Guna

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa (tanggal aset dasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna termasuk jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Liabilitas Sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi pembelian yang secara wajar pasti akan dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan pelaksanaan opsi untuk mengakhiri. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

r. Leases

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

As Lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

Right of use assets

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

Lease Liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

r. Sewa (lanjutan)

Sebagai Penyewa (lanjutan)

Liabilitas Sewa (lanjutan)

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Grup menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa (misalnya, perubahan pembayaran masa depan yang dihasilkan dari perubahan indeks atau kurs yang digunakan untuk menentukan pembayaran sewa) atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset yang mendasarinya.

Sewa jangka pendek dan bernilai rendah

Grup juga memiliki sewa tertentu untuk peralatan kantor dan perabot kantor dengan jangka waktu sewa kurang dari 12 bulan (sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal dimulainya dan tidak mengandung opsi pembelian) atau dengan harga beli yang rendah nilai. Grup menerapkan 'sewa jangka pendek' dan 'sewa pengecualian aset bernilai rendah' untuk sewa ini dan mengakui biaya sewa berdasarkan garis lurus. Biaya-biaya ini disajikan dalam biaya umum dan administrasi dalam laba rugi.

Sebagai Pesewa

Sewa yang didalamnya Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan disertakan dalam pendapatan pada laba rugi karena sifat operasinya. Biaya langsung awal yang timbul dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

r. Leases (continued)

As Lessee (continued)

Lease Liabilities (continued)

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments (e.g., changes to future payments resulting from a change in an index or rate used to determine such lease payments) or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group also has certain leases of office equipment and office furniture with lease terms of less than 12 months (those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option) or with low value. The Group applies the 'short-term lease' and 'lease of low value assets' recognition exemptions for these leases and recognize lease expenses on a straight-line basis. These expenses are presented within general and administrative expenses in the profit or loss.

As Lessor

Leases where the Group does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of the asset are classified as operating leases. Rental income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in revenue in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

s. Beban tangguhan

Biaya-biaya yang mempunyai manfaat di kemudian hari dan melebihi akhir periode pembukuan dikapitalisasi dan diamortisasikan selama taksiran masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

t. Perpajakan

Grup menyajikan kurang bayar/lebih bayar atas pajak penghasilan, jika ada, dan pajak tangguhan sebagai bagian dari "Beban Pajak" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pajak kini

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan estimasi laba kena pajak tahun berjalan.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Penghasilan kena pajak berbeda dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena penghasilan kena pajak tidak termasuk bagian dari pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan di tahun-tahun yang berbeda, dan juga tidak termasuk bagian-bagian yang tidak dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Penyesuaian atas pajak penghasilan kini dan tangguhan tahun sebelumnya (tidak termasuk bunga dan penalti, yang disajikan sebagai bagian dari "Beban Operasi Lainnya") disajikan sebagai bagian dari "Beban Pajak" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, jika ada.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Grup mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

s. Deferred charges

Expenses incurred which have future economic benefits and exceeded the accounting period are capitalized and amortized over their beneficial periods by using the straight-line method.

t. Taxation

The Group presents the underpayment/overpayment of income tax, if any, and deferred tax as part of "Tax Expense" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Current tax

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the year.

Current tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as of the reporting dates.

Taxable profit differs from profit as reported in the statement of profit or loss and other comprehensive income because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are non-taxable or non-deductible.

The adjustments in respect of current and deferred income tax of the previous years (exclusive of interests and penalties, which are presented as part of "Other Operating Expenses" account) are presented as part of "Tax Expense" account in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, if any.

Changes to the tax obligation are recognized when tax assessment is received or if the Group appealed, when the result of the appeal has been decided.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Perpajakan (lanjutan)

Pajak final

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian. Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 212: "Pajak Penghasilan".

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal yang belum terpakai, sepanjang besar kemungkinan penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal yang belum terpakai tersebut dapat dimanfaatkan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila penghasilan kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan dipakai pada saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling menghapuskan jika secara legal dapat saling menghapuskan antara aset pajak terhadap liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan terhadap liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan untuk entitas yang sama, atau Grup bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas jangka pendek berdasarkan jumlah neto.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Taxation (continued)

Final tax

In accordance with tax regulation in Indonesia, final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction are recognizing losses. Final tax is no longer governed by PSAK 212: "Income Tax".

Deferred tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes on reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and unused tax losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and unused tax losses can be utilized.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized, or the liability is settled based on the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date. Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Group intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Perpajakan (lanjutan)

Pajak pertambahan nilai (PPN)

PPN keluaran dan pajak masukan yang berhubungan dengan produksi, distribusi, manajemen, dan *marketing*, diakui neto atas jumlah PPN, kecuali:

- i. PPN Masukan yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan, yang dalam hal ini Pajak Masukan diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- ii. Piutang dan utang yang disajikan termasuk yang telah dikenakan PPN kecuali secara peraturan tidak dikenakan.

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari/atau terutang termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan konsolidasi.

u. Imbalan kerja karyawan

Grup mempunyai program dana pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat.

Pembayaran program manfaat pensiun iuran pasti diakui sebagai beban pada saat pekerja telah memberikan jasa mereka, dimana mereka memperoleh hak atas iuran. Pembayaran kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan diperhitungkan sebagai pembayaran untuk program iuran pasti di mana kewajiban Perusahaan dan anak perusahaan tertentu berdasarkan program tersebut setara dengan kewajiban yang timbul dalam program manfaat pensiun iuran pasti.

Grup juga mencatat penyisihan manfaat tambahan selain program dana pensiun tersebut di atas untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama dan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang berlaku. Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "Projected Unit Credit".

Beban atas pemberian imbalan dalam program imbalan manfaat pasti ditentukan dengan metode *Projected Unit Credit*.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Taxation (continued)

Value added tax (VAT)

VAT in and out that related to production, distribution, management, and marketing, recognized net of the amount of VAT, except:

- i. VAT-In arising from assets or service purchase that can not be credited in accordance with the regulation, in which the VAT - in recognized as a part of cost of asset or a part of the item of applied expenses; and
- ii. Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included, unless not permitted by regulation.

The net amount of VAT recoverable from, or payable to, the taxation authorities is included as part of receivables or payables in the consolidated statement of financial position.

u. Employment benefits

The Group have defined contribution retirement plans covering all their qualified permanent employees.

Payments to defined contribution retirement benefit plans are recognised as an expense when employees have rendered service entitling them to the contributions. Payments made to Dana Pensiun Lembaga Keuangan are accounted for as payments to defined contribution plans where the obligations of the Company and certain subsidiaries under the plans are equivalent to those arising in a defined contribution retirement benefit plan.

The Group also provides additional provisions on top of the benefits provided under the above-mentioned defined contribution pension programs in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Collective Labor Agreement and the relevant labor law. The said additional provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

The cost of providing benefits under the defined benefits plan is determined using the *Projected Unit Credit* method.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Imbalan kerja karyawan (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari (i) keuntungan dan kerugian aktuarial; (ii) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto; dan (iii) setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Beban imbalan kerja jangka panjang lainnya ditentukan dengan metode *Projected Unit Credit* dengan metode yang disederhanakan di mana metode ini tidak mengakui pengukuran kembali dalam penghasilan komprehensif lain. Total nilai neto dari biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui pada laba rugi tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara tanggal amendemen atau kurtailmen program dan tanggal pada saat Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Bunga neto ditentukan dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto. Grup mengakui perubahan atas liabilitas imbalan pasti neto berikut pada "Beban pokok penjualan", "Beban pemasaran dan penjualan" dan "Beban umum dan administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

- Biaya jasa yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan dan kerugian atas kurtailmen; dan
- Beban atau pendapatan bunga neto.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Employment benefits (continued)

Remeasurements of the net defined benefits liability (asset), which are recognized as other comprehensive income, consists of (i) actuarial gain and losses; (ii) the return on plan assets, excluding amounts included in net interest on the net defined benefits liability (asset); and (iii) any change in the effect of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefits liability (asset).

Remeasurements of the net defined benefits liability (asset) recognized in other comprehensive income will not be reclassified to profit or loss in the next periods.

The cost of providing other long-term employee benefits is determined using the Projected Unit Credit method using simplified method of not recognizing remeasurements in other comprehensive income. The net total of service cost, net interest on the net defined benefits liability (asset) and remeasurements of the net defined benefits liability (asset) are recognized in profit or loss for the period.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier of the date of the plan amendment or curtailment; and the date that the Group recognizes related restructuring costs.

Net interest is calculated by applying discount rate to the net defined benefits liability or asset. The Group recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "Cost of goods sold", "Marketing and selling expenses" and "General and administrative expenses" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income:

- *Service costs comprising current service costs, past-service costs and gains and losses on curtailments; and*
- *Interest expense or income – net*

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Imbalan kerja karyawan (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi. Kurtailmen terjadi apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- (i) Menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau
- (ii) Mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang signifikan dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Penyelesaian program terjadi ketika Grup melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.

Imbalan jasa masa kerja karyawan

Imbalan jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek Grup meliputi:

a. Tantiem

Penyisihan atas tantiem dibuat berdasarkan estimasi manajemen dan dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Tantiem akan dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selisih antara jumlah tantiem yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang disahkan oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana tantiem tersebut disahkan oleh RUPS.

b. Bonus

Bonus ditetapkan berdasarkan estimasi manajemen Grup.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Employment benefits (continued)

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized when the curtailment or settlement occurs. A curtailment occurs when an entity either:

- (i) Is demonstrably committed to make a significant reduction in the number of employees covered by a plan; or
- (ii) Amends the terms of a defined benefit plan so that a significant element of future service by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits.

A settlement occurs when the Group enters into a transaction that eliminates all further legal or constructive obligation for part or all of the benefits provided under a defined benefit plan.

Employee service entitlements

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits of the Group comprise of:

a. Tantiem

Provision of tantiem are based on management estimates and charged to the current period profit or loss. Tantiem will be paid to Directors and Commissioners after obtaining the approval in the General Stockholders' Meeting (GSM). The difference between the provision of tantiem that was estimated by management and the amount approved by the stockholders is recognized in the period when such tantiem is approved by GSM.

b. Bonus

Bonus is provided based on the estimation of Group's management.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Imbalan kerja karyawan (lanjutan)

Imbalan jasa masa kerja karyawan (lanjutan)

Imbalan jangka panjang

Imbalan kerja jangka panjang Grup meliputi:

a. Imbalan dan iuran pasti

Grup menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan iuran pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Entitas Anak menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat.

Grup juga mencatat penyisihan manfaat tambahan selain program dana pensiun tersebut di atas untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja No. 2/2022 ("UU Cipta Kerja", (UUCK)). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "Projected Unit Credit".

Jika terdapat surplus pendanaan, aset diakui pada laporan keuangan konsolidasian apabila pemulihan surplus tersebut dapat dilakukan baik melalui pembayaran kembali atau pengurangan iuran masa datang.

Untuk program pensiun iuran pasti, kontribusi yang terutang diakui sebagai beban usaha pada periode berjalan.

b. Imbalan kerja jangka panjang lain

Grup juga memberikan imbalan kerja jangka panjang selain pensiun yang meliputi tunjangan masa persiapan pensiun dan cuti berimbalan jangka panjang yang tidak didanai. Imbalan kerja jangka panjang tersebut dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* sesuai dengan PSAK 219.

c. Imbalan kesehatan pasca kerja

Perusahaan memberikan Program Iuran Pasti Imbalan Perawatan Kesehatan Pensiun kepada karyawannya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Employment benefits (continued)

Employee service entitlements (continued)

Long-term employee benefits

Long-term employee benefits of the Group comprise of:

a. Defined benefit and contribution

The Group has defined benefit and defined contribution pension plan for all of its eligible permanent employees. The Subsidiaries have defined contribution pension plan for all of their eligible permanent employees.

The Group also provides additional provisions on top of the benefits provided under the above-mentioned defined contribution pension programs in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Collective Labor Agreement and Government Regulation in Lieu of Law No. 2/2022 (the "Cipta Kerja Law", (UUCK)). The said additional provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

Where the funding status shows a surplus, an asset is recognized in the consolidated financial statements if that surplus can be recovered through refunds or reductions in future contributions.

For the defined contribution pension plan, contributions payable are charged to current period operations.

b. Other long-term employee benefits

The Group also provides long-term employment benefits other than pension which include allowance for preparation of pension, long-term compensation leave which are unfunded. These long-term employee benefits are calculated using the *Projected Unit Credit* method in accordance with PSAK 219.

c. Post-retirement healthcare benefits

The Company provides defined contribution Post-retirement Healthcare Benefits plan to its pensioned employees.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

v. Pengukuran nilai wajar

Grup mengukur aset biologis, termasuk produk (agrikultur) dari tanaman produktif, pada nilai wajar setiap tanggal pelaporan. Grup juga mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan, dan aset dan liabilitas yang diperoleh melalui kombinasi bisnis pada nilai wajar. Grup juga mengukur jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas ("UPK") tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, dan aset keuangan tertentu pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL").

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- i. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- ii. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Grup.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

v. Fair value measurement

The Group measures biological assets, including produce of bearer plants, at fair value at each reporting date. The Group also initially measures financial instruments, and assets and liabilities of the acquirees upon business combinations at fair value. They also measure certain recoverable amounts of the cash generating unit ("CGU") using fair value less cost of disposal ("FVLCD") and certain financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

Fair value is the price to be received from selling an asset or a price to be paid to transfer a liability in a transaction between market participants on the date of measurement. Fair value measurement assumes that a transaction to sell an asset or transfer liability happens:

- i. in a main market of the asset or liability, or
- ii. if there is no main market, in the most profitable market for the asset or liability.

The main market or most profitable market must be accessible by the Group.

The fair value of assets or liabilities is measured using the assumption that market participants will use when determining the price of the asset or liability, assuming that market participants act in their best economic interests.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, by maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

v. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hirarki nilai wajar berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

- i) *Level 1* - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- ii) *Level 2* - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
- iii) *Level 3* - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Grup menentukan apakah terdapat perpindahan antara *level* dalam hirarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan *level* masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

Tim pelaporan keuangan Grup bertanggungjawab atas penilaian dalam menentukan kebijakan dan prosedur untuk pengukuran nilai wajar berulang, seperti aset biologis, nilai wajar (dikurangi biaya untuk menjual) UPK (untuk uji penurunan nilai), dan aset keuangan pada NWPKL.

Penilai eksternal terlibat dalam penilaian aset signifikan, terutama aset biologis. Keterlibatan penilai eksternal ditentukan setiap tahun setelah dibahas dan disetujui oleh Direksi Grup. Kriteria pemilihan termasuk pengetahuan pasar, reputasi, independensi dan kemampuan mematuhi standar profesi. Metode penilaian dan input yang digunakan dibahas dan diputuskan bersama oleh Grup dan penilai eksternal.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risikonya dan level pada hirarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan diatas.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

v. Fair value measurement (continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- i) *Level 1* - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities accessible by the entity at the measurement date.
- ii) *Level 2* - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable, whether its directly or indirectly.
- iii) *Level 3* - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by reassessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting year.

The Group's financial reporting team in charge of valuation to determine the policies and procedures for recurring fair value measurement, such as biological assets and fair value (less costs of disposal) of CGUs (for impairment test purpose) and financial assets at FVOCI.

External valuers are involved for valuation of significant assets, in particular, the biological assets. Involvement of external valuers is decided upon annually after discussion with and approval by the Group Directors. Selection criteria include market knowledge, reputation, independence and whether professional standards are maintained. Valuation techniques and inputs to use were discussed and decided by the Group and external valuers.

For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

w. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

x. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pengakuan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui ketika pengendalian atas barang dialihkan kepada pelanggan pada suatu jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Grup sebagai imbalan atas barang tersebut. Secara umum, Grup menyimpulkan bahwa mereka bertindak sebagai prinsipal dalam pengaturan pendapatannya.

Piutang usaha merupakan hak Grup atas sejumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu, hanya berlalunya waktu yang diperlukan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo). Lihat kebijakan akuntansi aset keuangan di bagian Instrumen Keuangan mengenai pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya.

Jika pelanggan membayar imbalan sebelum Grup mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, liabilitas kontrak diakui pada saat pembayaran dilakukan atau pembayaran jatuh tempo (mana yang lebih awal). Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan pada saat Grup memenuhi pelaksanaan kontrak.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

w. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

x. Revenue from Contracts with Customers and Recognition of Expenses

Revenue from contracts with customers is recognized when control of the goods are transferred to the customers at an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those goods or services. The Group has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements.

Trade receivables represent the Group's right to an amount of consideration that is unconditional (i.e., only the passage of time is required before payment of the consideration is due). Refer to accounting policies of financial assets in Financial Instruments section regarding initial recognition and subsequent measurement.

If a customer pays consideration before the Group transfers goods or services to the customer, a contract liability is recognized when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). Contract liabilities are recognized as revenue when the Group performs under the contract.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**x. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
dan Pengakuan Beban (lanjutan)**

Penghasilan/Beban Bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif (SBE), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Penghasilan Sewa

Penghasilan sewa diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG
SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**x. Revenue from Contracts with Customers and
Recognition of Expenses (continued)**

Interest Income/Expenses

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using Effective Interest Rate (EIR) method, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying value of the financial asset or liability.

Rental Income

Rental income is recognized on a straight-line basis over the lease terms.

Expenses

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting year. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying values of the assets and liabilities affected in future periods.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Pajak Penghasilan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Tagihan dan Keberatan atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan direstitusi oleh Otoritas Pajak.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements

The following judgements are made by the management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Income Tax

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgement is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Group recognizes liabilities for corporate income tax is based on estimation of whether there will be additional corporate income tax.

Claims for Tax Refund and Tax Assessments Under Appeal

Based on the tax regulations currently enacted, the management uses judgements if the amounts recorded under the above account are recoverable and refundable by the Tax Authority.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Penyisihan Penurunan Nilai atas Kerugian Piutang Usaha

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan informasi dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan penurunan nilai piutang usaha.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan dibawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

Allowance for Impairment Losses on Trade Receivables

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgement, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customer's receivable amount to reduce the amount that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Instrumen Keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Walaupun komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Grup.

Pensiun dan Imbalan Kerja

Pengukuran liabilitas dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui sebagai pendapatan komprehensif lain.

Walaupun Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Financial Instruments

The Group carries certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Group utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets and liabilities would directly affect the Group's profit or loss.

Pension and Employee Benefits

The measurement of the Group's obligations and cost for pension and employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized as other comprehensive income.

While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) untuk piutang usaha dan aset kontrak. Tingkat provisi didasarkan pada hari lewat jatuh tempo untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian yang serupa (yaitu, berdasarkan wilayah geografis, jenis produk, jenis dan peringkat pelanggan, dan pertanggungan berdasarkan surat kredit dan bentuk asuransi kredit lainnya).

Matriks provisi pada awalnya didasarkan pada tingkat gagal bayar Grup yang diamati secara historis. Grup akan mengkalibrasi matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*). Misalnya, jika perkiraan kondisi ekonomi (yaitu, produk domestik bruto) diekspektasikan akan memburuk pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar di sektor manufaktur, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi perkiraan masa depan dianalisis.

Penilaian korelasi antara tingkat default yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi, dan KKE adalah estimasi yang signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili gagal bayar pelanggan yang sebenarnya di masa depan. Informasi tentang KKE pada piutang usaha Grup dan aset kontrak diungkapkan dalam Catatan 6.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for Impairment of Trade Receivables

The Group uses a provision matrix to calculate Estimated Credit Loss (ECL) for trade receivables and contract assets. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns (i.e., by geography, product type, customer type and rating, and coverage by letters of credit and other forms of credit insurance).

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions (i.e., gross domestic product) are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the manufacturing sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future. The information about the ECLs on the Group's trade receivables and contract assets is disclosed in Note 6.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha
(lanjutan)

Individual Assessment

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup.

Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha. Rincian lebih lanjut atas piutang usaha diungkapkan dalam Catatan 6.

Penyisihan Nilai Realisasi Neto Persediaan

Penyisihan nilai realisasi neto persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan. Rincian lebih lanjut mengenai persediaan diungkapkan dalam Catatan 8.

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi nilai terpulihkannya, yaitu jumlah yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan saat pelepasan aset.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for Impairment of Trade Receivables
(continued)

Individual Assessment

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgement, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect.

These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of trade receivables. Further details on trade receivables are disclosed in Note 6.

Allowance for Net Realisable Value of Inventories

Allowance for net realizable value of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The allowance is re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. Further details regarding inventories are disclosed in Note 8.

Impairment of Non-financial Assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or a CGU exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Penghitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Proyeksi arus kas masa depan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum ada komitmennya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja dari UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan dan juga terhadap arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan digunakan oleh manajemen dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan memiliki rugi fiskal yang dapat dikompensasi dengan penghasilan kena pajak di masa depan sampai dengan lima tahun sejak rugi fiskal tersebut dilaporkan, diungkapkan dan dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan 9.

Aset biologis

Grup mengadopsi pendekatan pendapatan menggunakan model arus kas yang didiskontokan untuk mengukur nilai wajar dari produksi tebu dan hutan tanaman. *Inputs* signifikan yang diterapkan untuk menentukan nilai wajar aset biologis ini termasuk harga jual yang diproyeksikan, tingkat produksi, tingkat diskonto, tingkat inflasi dan nilai tukar.

Jumlah perubahan dalam nilai wajar dari aset biologis ini akan berbeda jika ada perubahan pada *input* yang digunakan, dan akan mempengaruhi laba rugi Grup dan ekuitas. *Input* kunci yang diterapkan dalam penentuan nilai wajar aset biologis termasuk analisis sensitivitas, diungkapkan dan dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan 11.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Impairment of Non-financial Assets (continued)

The value in use calculation is based on a discounted cash flow model. The future cash flow projection does not include restructuring activities that the Group is not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset's performance of the CGU being tested. The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes.

Deferred Tax Asset

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

As of December 31, 2025, the Company have tax losses carried forward which can be utilized against future taxable income up to five years since the tax loss reported, disclosed and further explained in Note 9.

Biological assets

The Group adopts income approach using discounted cash flow models to measure the fair value of the cane produce and timber plant. Significant inputs applied to determine the fair value of these biological assets include the projected selling prices, production yields, discount rate, inflation rate and exchange rates.

The amount of changes in fair values of these biological assets would differ if there are changes to the inputs used, and would affect the Group's profit or loss and equity. The key inputs applied in the determination of fair value of biological assets including a sensitivity analysis, are disclosed and further explained in Note 11.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Kas - Rupiah	870	2.774
Kas di bank		
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 28)		
Rupiah:		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	65.966	74.756
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	63.998	77.243
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	26.270	15.364
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3.717	11.283
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Perseroda)	872	868
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	866	3
PT Bank Raya Indonesia Tbk	678	338
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	64	3.372
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	2	1
Dolar Amerika Serikat:		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	26.206	33.883
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.731	2.442
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.363	1.872
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.210	455
Pihak ketiga		
Rupiah:		
PT Bank Central Asia Tbk	3.396	450
Total kas di bank	200.339	222.330
Deposito berjangka		
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 28)		
Rupiah:		
PT Bank Tabungan Negara Syariah	33.564	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.000	-
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	17.000	10.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.172	12.228
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	300
Dolar Amerika Serikat:		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8.391	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	16.162
Total deposito berjangka	81.127	38.690
Total	282.336	263.794

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash on hand - Rupiah
Cash in banks
Government related entities (Note 28)
Rupiah:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Perseroda)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Raya Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
United States Dollar:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Third parties
Rupiah:
PT Bank Central Asia Tbk
Total cash in banks
Time deposits
Government related entities (Note 28)
Rupiah:
PT Bank Tabungan Negara Syariah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
United States Dollar :
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Total time deposits
Total

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank. Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka bank konvensional dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika serta tingkat imbalan atau bagi hasil deposito mudharabah pada bank syariah dalam mata uang Rupiah adalah berkisar antara:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Deposito		
Rupiah	4,20% - 7,75%	4,50% - 6,30%
Dolar Amerika	3,25% - 4,25%	0,15% - 4,00%
Deposito Mudharabah		
Rupiah	5,25% - 5,43%	5,57% - 6,30%

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Bank accounts have a floating rate according to the offered rate at each bank. The annual interest rate for time deposits for conventional bank in Indonesia Rupiah and United States Dollar, as well as the return or profit sharings rate for mudharabah deposits at islamic bank in Indonesia Rupiah, ranges between:

Time Deposit
Rupiah
United States Dollar
Mudharabah Deposit
Rupiah

**5. KAS DI BANK DAN DEPOSITO YANG DIBATASI
PENGUNAANNYA**

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Kas di bank		
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 28)		
Rupiah:		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ^(a)	65.000	50.000
PT Bank Syariah Indonesia ^(a)	10.001	-
Dolar Amerika Serikat :		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ^(b)	5.634	8.395
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ^(b)	1.561	7.562

Deposito berjangka

Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 28)		
Rupiah:		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ^(a)	56.000	72.000
PT Bank Raya Indonesia Tbk	36.000	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ^(a,c)	33.758	36.223
Total	207.954	174.180

5. RESTRICTED CASH IN BANKS AND DEPOSITS

Cash in banks
Government related entities (Note 28)
Rupiah:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ^(a)
PT Bank Syariah Indonesia ^(a)
United States Dollar :
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ^(b)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ^(b)

Time deposits

Government related entities (Note 28)
Rupiah:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ^(a)
PT Bank Raya Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ^(a,c)

Total

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**5. KAS DI BANK DAN DEPOSITO YANG DIBATASI
PENGGUNAANNYA (lanjutan)**

Penempatan kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sehubungan dengan:

- Jaminan pinjaman bank yang ditempatkan di kas di bank PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., termasuk deposito di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., PT Bank Raya Indonesia (Persero), Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. (Catatan 16).
- Penempatan kas pada rekening khusus devisa hasil ekspor dari sumber daya alam sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 08/2025.
- Deposito yang dibatasi penggunaannya sehubungan dengan pembayaran tantiem direksi dan komisaris yang ditangguhkan pembayarannya, serta tabungan Mudharabah.

Tingkat bunga per tahun atas kas di bank dan deposito yang dibatasi penggunaannya adalah 4,20% sampai dengan 7,30% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: 2,25% - 6,00%).

**5. RESTRICTED CASH IN BANKS AND DEPOSITS
(continued)**

Placement of restricted cash in bank and time deposits are in accordance with:

- Loan collateral in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., including deposits in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., PT Bank Raya Indonesia (Persero), Tbk., and PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (Note 16).
- Placement of funds in a special foreign exchange account from natural resource export in accordance with Government Regulation No. 08/2025.
- Deposits with restricted use related to the payment of deferred bonuses for the board of directors and commissioners, including Mudharabah savings.

Annual interest rates on restricted cash in bank and time deposits is from 4.20% to 7.30% for the year ended December 31, 2025 (2024: 2.25% - 6.00%).

6. PIUTANG USAHA

6. TRADE RECEIVABLES

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Pihak ketiga	350.368	334.097	Third parties
Penyisihan penurunan nilai	(146.608)	(142.863)	Provision for impairment
Pihak ketiga, neto	203.760	191.234	Third parties, net
Pihak berelasi	47.056	26.273	Related parties
Penyisihan penurunan nilai	(11.788)	(7.087)	Provision for impairment
Pihak berelasi, neto (Catatan 28)	35.268	19.186	Related parties, net (Note 28)
Total	239.028	210.420	Total

Umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging of trade receivables are as follows:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Lancar	191.848	120.708	Current
Jatuh tempo:			Overdue:
1 - 30 hari	40.631	50.214	1 - 30 days
31 - 90 hari	20.956	27.490	31 - 90 days
Lebih dari 90 hari	143.989	161.958	Over 90 days
Subtotal	397.424	360.370	Subtotal
Penyisihan penurunan nilai	(158.396)	(149.950)	Provision for impairment
Piutang usaha	239.028	210.420	Trade receivables

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Jangka waktu rata-rata kredit penjualan berkisar antara 1 sampai dengan 90 hari.

Berdasarkan penelaahan terhadap status piutang usaha masing-masing pelanggan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa nilai penyisihan penurunan nilai piutang tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Piutang usaha tertentu yang digunakan sebagai jaminan pinjaman pada tahun 2025 dan 2024.

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Saldo awal	149.950	136.017
Penyisihan	12.753	18.767
Pemulihan	(4.307)	(4.834)
Saldo akhir	158.396	149.950

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

The average period of credit sales ranging from 1 to 90 days.

Based on the review of the status of the trade receivable of each customers at the reporting date, management believes that the provision for impairment of receivables is adequate to cover possible losses from the uncollectible trade receivables.

Certain trade receivables used as loan collateral in 2025 and 2024.

Movement in the provision for impairment of trade receivables are as follows:

Beginning balance
Provision
Reversal
Ending balance

7. ASET LANCAR LAINNYA DAN ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

a. ASET LANCAR LAINNYA

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Aset keuangan		
Piutang pegawai	93.408	91.574
Piutang sewa	17.437	12.080
Piutang kerjasama	3.935	-
Piutang lainnya	74.723	95.863
Total aset keuangan lancar lainnya	189.503	199.517
Penyisihan penurunan nilai	(101.801)	(112.263)
	87.702	87.254
Aset non-keuangan		
Biaya dibayar dimuka	41.643	41.285
Aset lancar lainnya	129.345	128.539

Piutang pegawai merupakan pinjaman yang diberikan Grup kepada pegawai yang umumnya terdiri atas pinjaman perumahan dan kendaraan.

7. OTHER CURRENT ASSETS AND OTHER NON CURRENT ASSET

a. OTHER CURRENT ASSETS

Financial assets
Employee receivables
Rent receivables
Cooperation receivables
Other receivables

Total other current financial assets
Provision for impairment

Non-financial assets
Prepaid expenses

Other current assets

Employee receivables represent loans provided by the Group to employees which generally consist of housing and vehicle loans.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**7. ASET LANCAR LAINNYA DAN ASET TIDAK
LANCAR LAINNYA (lanjutan)**

**7. OTHER CURRENT ASSETS AND OTHER NON
CURRENT ASSET (continued)**

a. ASET LANCAR LAINNYA (lanjutan)

a. OTHER CURRENT ASSETS (continued)

Mutasi penyisihan penurunan nilai aset lancar lainnya adalah sebagai berikut:

Movement in the provision for impairment of other current assets is as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	112.263	101.295	Beginning balance
Penyisihan	13.819	30.783	Provision
Pemulihan	(24.281)	(19.815)	Reversal
Saldo akhir	101.801	112.263	Ending balance

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai di atas cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai aset lancar tersebut.

Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment is sufficient to cover losses from impairment of such other current assets.

b. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

b. OTHER NON CURRENT ASSETS

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Kas di bank			Cash in banks
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 28)			Government related entities (Note 28)
Rupiah:			Rupiah:
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	5.680	5.680	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Raya Indonesia Tbk	2.885	19.857	PT Bank Raya Indonesia Tbk
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah:			Rupiah:
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	-	117	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
Deposito berjangka			Time deposits
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 28)			Government related entities (Note 28)
Rupiah:			Rupiah:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.514	2.449	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Aset keuangan tidak lancar lainnya	10.561	9.321	Other non current financial assets
Total	20.640	37.424	Total

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**7. ASET LANCAR LAINNYA DAN ASET TIDAK
LANCAR LAINNYA (lanjutan)**

b. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Kas pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merupakan kas yang dibatasi penggunaannya yang digunakan sebagai jaminan pinjaman bank jangka panjang (Catatan 16).

Kas pada PT Bank Raya Indonesia Tbk merupakan kas yang dibatasi penggunaannya, sebagai tabungan berhadiah dengan jangka waktu 3 tahun.

Kas pada PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk merupakan kas yang dibatasi penggunaannya dengan kerjasama dengan PT Korea Indonesia Forestry Cooperative ("KIFC").

Deposito berjangka pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya untuk jaminan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.

Tingkat bunga per tahun atas kas di bank dan deposito yang dibatasi penggunaannya adalah berkisar antara 3,50% - 6,75% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: 3,50% - 6,10%).

**7. OTHER CURRENT ASSETS AND OTHER NON
CURRENT ASSET (continued)**

b. OTHER NON CURRENT ASSETS (continued)

Cash in PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk represents restricted cash in bank, which used as collateral of long-term bank loans (Note 16).

Cash in PT Bank Raya Indonesia Tbk represents restricted cash in bank, as savings reward account with a maturity of 3 years.

Cash in PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk represents restricted cash in bank, in connection with the cooperation project with PT Korea Indonesia Forestry Cooperative ("KIFC").

Time deposits in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk represents restricted time deposit to guarantee the implementation of river basin rehabilitation activities.

Annual interest rates on restricted cash in bank and time deposits are ranging from 3.50% - 6.75% for the year ended December 31, 2025 (2024: 3.50% - 6.10%).

8. PERSEDIAAN

Persediaan Grup, terdiri dari:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Persediaan produk		
Kayu bulat	147.825	270.099
Minyak kayu putih	55.815	65.936
Gondorukem	43.998	46.998
Kayu olahan	41.101	49.345
Terpentin	18.174	22.581
Getah pinus dan karet	13.748	14.075
Lain-lain	16.246	9.267
Suku cadang dan bahan pembantu	16.766	20.679
Total persediaan	353.673	498.980
Penyisihan penurunan nilai	(46.648)	(45.917)
Persediaan	307.025	453.063

Persediaan tertentu digunakan sebagai jaminan atas pinjaman (Catatan 16).

8. INVENTORIES

The Group inventories consist of:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Inventory products		
Logs		
Cajuput oil		
Gum rosin		
Processed wood		
Turpentine		
Pine and rubber sap		
Others		
Spare parts and supplies		
Total inventories		
Provision for impairment		
Inventories		

Certain inventories are used as collateral for borrowings (Note 16).

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. PERSEDIAAN (lanjutan)

Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

	2025
Saldo awal	45.917
Penyisihan	4.963
Pemulihan	(4.232)
Saldo akhir	46.648

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap harga pasar dan kondisi fisik dari persediaan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan tersebut di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, persediaan tertentu telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan gabungan sekitar Rp194.320 (2024: Rp307.732), yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

8. INVENTORIES (continued)

Movement in the provision for impairment of inventories are as follows:

2024	
28.822	Beginning balance
30.832	Provision
(13.737)	Reversal
45.917	Ending balance

Based on a review of the market prices and physical conditions of the inventories at the reporting dates, management believes that the above allowance is adequate to cover any possible losses from obsolescence and decline in market values of inventories.

As of December 31, 2025, certain inventories are covered by insurance against losses from fire and other risks under a certain policy package with combined coverage amounting to approximately Rp194,320 (2024: Rp307,732) which in management's opinion, is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

9. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Perusahaan:		
Pajak Penghasilan Pasal 21	4.155	6.949
Entitas Anak:		
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	-	385
Pajak Pertambahan Nilai	261	-
Total	4.416	7.334

b. Klaim pengembalian pajak

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Perusahaan:		
Pajak Penghasilan Badan :		
Tahun 2025	19.442	-
Tahun 2024	20.757	20.757
Tahun 2023	-	31.192
Entitas Anak:		
Pajak Penghasilan Badan:		
Tahun 2025	3.735	-
Tahun 2023	-	1.705
Total	43.934	53.654

9. TAXATION

a. Prepaid taxes

Company:
Income Tax
Article 21

Subsidiaries:
Income Tax (PPh)
Article 21
Value Added Tax

Total

b. Claims for tax refund

Company:
Corporate Income Tax:
Year 2025
Year 2024
Year 2023

Subsidiaries:
Corporate Income Tax:
Year 2025
Year 2023

Total

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Utang pajak

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Perusahaan:		
Pajak Penghasilan :		
Pasal 4 (2)	451	373
Pasal 21	-	951
Pasal 22	247	245
Pasal 23	552	469
Pajak Pertambahan Nilai	8.530	9.390
Pajak Bumi dan Bangunan	457.578	254.528
Pajak lain-lain	136	-
Subtotal	467.494	265.956
Entitas Anak:		
Pajak Penghasilan :		
Pasal 4 (2)	222	16
Pasal 21	2.481	969
Pasal 22	36	3
Pasal 23	864	619
Pasal 25	224	131
Pasal 29	2.024	7.188
Pajak Pertambahan Nilai	2.959	2.356
Pajak Bumi dan Bangunan	3.564	2.880
Pajak lain-lain	-	124
Subtotal	12.374	14.286
Total	479.868	280.242

d. Sengketa Pajak

Perusahaan

Pajak Penghasilan Badan Tahun 2023

Pada tanggal 29 April 2025, Perusahaan menerima Surat Keterangan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun 2023 sebesar Rp31.192. Lebih bayar tersebut dikompensasikan dengan utang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan PPh Pasal 21 masing-masing sebesar Rp25.144 dan Rp23. Sisanya sebesar Rp6.025 dibebankan ke penyesuaian pajak penghasilan periode lalu.

9. TAXATION (continued)

c. Taxes payables

Company:
Income Tax :
Article 4 (2)
Article 21
Article 22
Article 23
Value Added Tax
Land and Building Tax
Other taxes
Subtotal
Subsidiaries:
Income Tax :
Article 4 (2)
Article 21
Article 22
Article 23
Article 25
Article 29
Value Added Tax
Land and Building Tax
Other taxes
Subtotal
Total

d. Tax Disputes

Company

Corporate Income Tax 2023

On April 29, 2025, the Company received a Tax Overpayment Letter (SKPLB) for Corporate Income Tax in 2023 amounting Rp31,192. The overpayment was offset amounting to against Land and Building Tax (PBB) and Income Tax Article 21 payables of Rp25,144 and Rp23, respectively. The remaining amount of Rp6,025 was charged to the previous period's income tax adjustment.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Beban pajak penghasilan

	2025	2024
Perusahaan:		
Beban pajak tangguhan	28.425	71.215
Beban pajak penghasilan periode lalu	6.025	-
Beban pajak kini tahun berjalan	-	553
Subtotal	34.450	71.768
Entitas anak:		
Beban pajak kini tahun berjalan	11.852	15.825
Beban pajak tangguhan	1.666	3.292
Beban pajak penghasilan periode lalu	1.022	3.428
Subtotal	14.540	22.545
Total	48.990	94.313

9. TAXATION (continued)

e. Income tax expense

Company:
Deferred tax expense
Prior period income tax expense
Tax expense current year
Subtotal
Subsidiaries:
Tax expense current year
Deferred tax expense
Prior period income tax expense
Subtotal
Total

f. Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal) adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Laba sebelum beban pajak penghasilan	130.776	397.092
Laba sebelum pajak Entitas Anak	48.335	102.139
Eliminasi	(18.415)	(13.885)
Laba sebelum pajak Perusahaan	100.856	308.838
Beda waktu:		
Aset hak guna	23.422	20.211
Aset tetap	14.163	1.928
Nilai wajar persediaan	3.318	(10.524)
Bonus	287	(5.803)
Cadangan penurunan nilai aset tetap	-	850
Cadangan penurunan nilai piutang	(16)	(1.185)
Cadangan penurunan nilai persediaan	(991)	28.199
Liabilitas sewa	(23.902)	(25.500)
Nilai wajar aset biologis	(91.122)	(245.147)
Imbalan kerja karyawan	(122.789)	(85.452)
Total beda waktu	(197.630)	(322.423)

f. Current tax

The reconciliation between income before income tax expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income with the estimated taxable income (tax loss), are as follows:

Income before income tax expense
Income before income tax of Subsidiaries
Elimination
Income before income tax of the Company
Temporary differences:
Right-of-Use assets
Fixed assets
Fair value of inventory
Bonus
Allowance for impairment of fixed assets
Allowance for impairment of receivables
Allowance for impairment of inventories
Lease liabilities
Fair value of biological assets
Employee benefits
Total temporary differences

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Pajak kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2025	2024
Beda tetap:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	90.657	62.498
Pendapatan yang dikenai pajak final	(62.308)	(46.401)
Total beda tetap	28.349	16.097
Taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal)		
- Perusahaan	(68.425)	2.512
Taksiran beban pajak penghasilan		
- Perusahaan	-	553
- Entitas Anak	12.874	15.825
Taksiran beban pajak penghasilan - Grup	12.874	16.378
Perusahaan		
Taksiran beban pajak penghasilan - Perusahaan	-	553
Pajak dibayar dimuka - Perusahaan		
Pajak Penghasilan :		
Pasal 22	1.195	119
Pasal 23	679	798
Pasal 25	17.568	20.393
	19.442	21.310
Klaim pengembalian pajak - Perusahaan	19.442	20.757

9. TAXATION (continued)

f. Current tax (continued)

The reconciliation between income before income tax expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income with the estimated taxable income (tax loss), are as follows: (continued)

Permanent differences:
Non-deductible expenses
Income subject to final tax
Total permanent differences
Estimated taxable income (tax loss)
- Company
Estimated taxable income
- Company
- Subsidiaries
Estimated income tax expense - the Group
Company
Estimated taxable income
- Company
Prepaid taxes - Company
Income tax
Article 22
Article 23
Article 25
Claims for income tax refund - Company

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Pajak kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Entitas Anak	2025	2024	Subsidiaries
Taksiran beban pajak penghasilan - Entitas Anak	11.852	15.825	Estimated taxable income - Subsidiaries
Pajak dibayar dimuka - Entitas Anak			Prepaid taxes - Subsidiaries
Pajak Penghasilan :			Income tax :
Pasal 22	42	69	Article 22
Pasal 23	1.340	1.324	Article 23
Pasal 25	12.181	7.244	Article 25
	13.563	8.637	
Utang pajak penghasilan - Entitas Anak	(2.024)	(7.188)	Income tax payable - Subsidiaries
Klaim pajak penghasilan - Entitas Anak	3.735	-	Claims for income tax refund - Subsidiaries

g. Rekonsiliasi tarif pajak efektif

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	130.776	397.092	Consolidated profit before income tax
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	28.771	87.360	Tax calculated at applicable tax rates
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(20.667)	(13.999)	Income subject to final tax
Beda tetap lainnya	25.428	15.680	Other permanent differences
Perubahan penurunan nilai aset pajak tangguhan	2.587	(367)	Changes in allowance impairment of deferred tax assets
Rugi fiskal yang tidak diakui	5.827	4.670	Unrecognised tax losses
Penyesuaian pajak penghasilan periode lalu	7.504	3.428	Adjustment of prior period income tax
Penyesuaian atas pajak tangguhan	(460)	(2.459)	Adjustment in respect deferred tax
Beban pajak penghasilan	48.990	94.313	Income tax expenses

9. TAXATION (continued)

f. Current tax (continued)

The reconciliation between income before income tax expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income with the estimated taxable income (tax loss), are as follows: (continued)

g. Reconciliation of effective tax rate

The reconciliation between income tax expense which is calculated at the tax rates from income before income tax expense is as follows:

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Pajak tangguhan

	1 Januari/ January 2025	Penyesuaian atas pajak tangguhan/ Adjustment in respect of deferred tax	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ (Charged)/ credited to profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya/ Credited to other comprehensive income	31 Desember/ December 2025	
Perusahaan						Company
Imbalan karyawan	342.089	-	(27.014)	17.681	332.756	Employee benefits
Penurunan nilai piutang	16.982	-	(4)	-	16.978	Impairment of receivables
Rugi fiskal	-	-	15.054	-	15.054	Tax losses
Cadangan bonus	9.987	-	63	-	10.050	Accrued bonus
Penurunan nilai persediaan	9.143	-	(218)	-	8.925	Impairment of inventories
Liabilitas sewa	6.633	-	(5.258)	-	1.375	Lease liability
Beban penyusutan	(2.902)	-	3.116	-	214	Depreciation expenses
Nilai wajar persediaan	(413)	-	730	-	317	Fair value of inventories
Penurunan nilai aset tetap	187	-	-	-	187	Impairment of fixed assets
Aset hak guna	(6.201)	-	5.153	-	(1.048)	Right of use assets
Aset biologis	(2.755.406)	-	(20.047)	-	(2.775.453)	Biological assets
Liabilitas pajak tangguhan						Deferred tax liabilities
Perusahaan	(2.379.901)	-	(28.425)	17.681	(2.390.645)	Company
Entitas anak	(425)	-	(990)	-	(1.415)	Subsidiary
Total	(2.380.326)	-	(29.415)	17.681	(2.392.060)	Total
Aset pajak tangguhan						Deferred tax assets
Entitas anak	16.436	-	(676)	3.276	19.036	Subsidiaries

	1 Januari/ January 2024	Penyesuaian atas pajak tangguhan/ Adjustment in respect of deferred tax	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ (Charged)/ credited to profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya/ Credited to other comprehensive income	31 Desember/ December 2024	
Perusahaan						Company
Imbalan karyawan	379.834	-	(17.683)	(20.062)	342.089	Employee benefits
Penurunan nilai piutang	21.873	-	(4.891)	-	16.982	Impairment of receivables
Cadangan bonus	11.264	-	(1.277)	-	9.987	Accrued bonus
Penurunan nilai persediaan	2.939	-	6.204	-	9.143	Impairment of inventories
Liabilitas sewa	12.876	-	(6.243)	-	6.633	Lease liability
Penurunan nilai aset tetap	-	-	187	-	187	Impairment of fixed assets
Nilai wajar persediaan	1.538	-	(1.951)	-	(413)	Fair value of inventories
Beban penyusutan	(6.220)	-	3.318	-	(2.902)	Depreciation expenses
Aset hak guna	(11.254)	-	5.053	-	(6.201)	Right of use assets
Aset biologis	(2.701.474)	-	(53.932)	-	(2.755.406)	Biological assets
Liabilitas pajak tangguhan						Deferred tax liabilities
Perusahaan	(2.288.624)	-	(71.215)	(20.062)	(2.379.901)	Company
Entitas anak	-	-	(425)	-	(425)	Subsidiary
Total	(2.288.624)	-	(71.640)	(20.062)	(2.380.326)	Total
Aset pajak tangguhan						Deferred tax assets
Entitas anak	10.697	(206)	(2.661)	8.606	16.436	Subsidiaries

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. INVESTASI SAHAM DAN INVESTASI PADA
ENTITAS ASOSIASI**

**10. SHARE INVESTMENT AND INVESTMENT IN
ASSOCIATES**

Nama Perusahaan/ Company	Lokasi/ Location	Tahun Penyertaan/ Year of Investment	Bidang Usaha/ Nature of Business	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai Penyertaan Awal/Initial Investment Value	Nilai Tercatat 2025/ Carrying Value 2025	Nilai Tercatat 2024/ Carrying Value 2024
31 Desember 2025/ December 31, 2025							
Metode Nilai Wajar/ Fair Value method							
1) PT ITCI Hutani Manunggal	Kalimantan Timur	1993	Industri Kayu	10%	10.246	10.246	10.246
Metode Ekuitas/Equity method							
Masih Beroperasi/ Still Operating							
2) PT Gunung Gajah Abadi	Samarinda	1997	Hutan Alam	23%	1.323	17.924	17.777
3) PT Ratah Timber	Jakarta Selatan	1998	Hutan Alam	20%	510	24.830	35.261
4) PT Segara Indochem	Samarinda	1998	Hutan Alam	20%	170	-	-
5) PT Hutansanggam Berau	Berau	2003	Hutan Alam	30%	450	3.245	1.195
6) PT Gema Hutani Lestari	Jakarta Pusat	1999	Hutan Alam	20%	5.000	9.127	9.156
7) PT IDEC Abadi Wood Industries	Tarakan	1981	Industri Plywood	33%	1.348	35.437	29.294
8) PT ITCI Kayan Hutani	Jakarta Selatan	1997	Hutan Alam	31%	4.340	16.788	14.635
9) PT Roda Mas Timber Kalimantan	Jakarta Pusat	1996	Hutan Alam	20%	400	-	-
10) PT Intracawood Manufacturing	Kalimantan Utara	1988	Industri Kayu	25%	5.538	-	-
11) PT Bhineka Wana	Kalimantan Timur	1992	Hutan Tanaman	40%	1.900	-	-
12) PT Hutan Mahligai	Kalimantan Timur	1992	Hutan Tanaman	20%	3.930	-	-
13) PT Perintis Adiwana	Banjarmasin	1993	Hutan Tanaman	40%	2.278	-	-
14) PT Tusam Hutani Lestari	Aceh	1993	Tanaman Industri Pengelolaan Hutan	40%	7.947	-	-
Tidak Beroperasi/Dormant							
15) PT Anangga Pundi Nusa	Kalimantan Timur	1992	Hutan Tanaman	40%	4.276	-	-
16) PT Berkat Hutan Pusaka	Sulawesi Tengah	1992	Hutan Tanaman	40%	2.962	-	-
17) PT Hutan Kusuma	Kalimantan Timur	1992	Hutan Tanaman	40%	1.988	-	-
18) PT Taman Daulat Wananusa	Kalimantan Timur	1992	Hutan Tanaman	25%	2.886	-	-
19) PT Dirga Rimba	Kalimantan Timur	1992	Hutan Tanaman	40%	1.485	-	-
20) PT Estetika Rimba	Kalimantan Timur	1992	Hutan Tanaman	40%	1.485	-	-
21) PT Intan Hutani Lestari	Sulawesi Barat	1996	Hutan Tanaman	40%	742	-	-
22) PT Kirana Rimba	Kalimantan Selatan	1992	Hutan Tanaman	40%	1.120	-	-
23) PT Jati Cakrawala	Maluku	1992	Hutan Tanaman	40%	1.260	-	-
24) PT Wana Tani Lestari	Sulawesi Tengah	1998	Hutan Tanaman	40%	2.730	-	-
25) PT Hutan Trans Kencana	Kalimantan Timur	1994	Hutan Tanaman	40%	3.425	-	-
26) PT Eritani Lestari	Maluku	1992	Hutan Tanaman	40%	1.596	-	-
27) PT Kusuma Puspawarna	Kalimantan Tengah	1992	Hutan Tanaman	39%	2.403	-	-
28) PT Puspa Warna Cemerlang	Kalimantan Tengah	1992	Hutan Tanaman	40%	1.277	-	-
29) PT Rimba Wawasan Permai	Aceh	1992	Hutan Tanaman	40%	1.107	-	-
30) PT Aceh Suaka Wana Nusa Prima	Aceh	1992	Hutan Tanaman	40%	597	-	-
31) PT Rimba Penyangga Utama	Aceh	1992	Hutan Tanaman	40%	1.650	-	-
32) PT Rimba Timur Sentosa	Aceh	1992	Hutan Tanaman	40%	1.423	-	-
33) PT Rimba Rokan Hulu	Riau	1992	Hutan Tanaman	40%	2.488	-	-
34) PT Rimba Swasembada Semesta	Sumatera Barat	1992	Hutan Tanaman	40%	1.504	-	-
35) PT Gunung Medang Raya	Aceh	1994	Hutan Tanaman	40%	1.375	-	-
36) PT Hutani Bhara Induk	Riau	1995	Hutan Tanaman	49%	1.886	-	-
37) PT Hutani Bhara Union Lestari	Riau	1995	Hutan Tanaman	49%	612	-	-
38) PT Hutani Nasional Lestari	Riau	1995	Hutan Tanaman	39%	663	-	-
39) PT Mandau Abadi	Riau	1997	Hutan Tanaman	49%	294	-	-
40) PT Hutani Olindo Lestari	Aceh	1998	Hutan Tanaman	16%	245	-	-
41) PT Hutani Seraya Lestari	Riau	1999	Hutan Tanaman	25%	604	-	-
42) PT Arangan Hutani Lestari	Jambi	2020	Hutan Tanaman	40%	750	-	-
43) PT Wana Teladan	Jambi	2009	Hutan Tanaman	40%	1.674	-	-
44) PT Dalek Hutani Esa	Jambi	1999	Hutan Tanaman	49%	876	-	-
45) PT Hatma Hutani	Jambi	1997	Hutan Tanaman	49%	490	-	-
Total investasi saham/ Total investment in shares					93.253	117.597	117.564

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. INVESTASI SAHAM DAN INVESTASI PADA
ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)**

Masih beroperasi

- 1) **PT ITCI Hutani Manunggal ("IHM")**
Pada tahun 1993, IHT I melakukan investasi saham pada IHM sebanyak 10.246 lembar saham dengan total sebesar Rp10.246. IHM berkedudukan di Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman pengelolaan hutan.
- 2) **PT Gunung Gajah Abadi ("GGA")**
Pada tahun 1997, IHT I melakukan investasi saham pada GGA sebanyak 1.323 lembar saham dengan total sebesar Rp1.323. GGA berkedudukan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha perusahaan dan pengelolaan hutan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT II ke dalam IHT I, kepemilikan IHT II pada GGA telah beralih kepada IHT I. Pada tahun 2025, bagian laba entitas asosiasi adalah sebesar Rp1.344 (2024: Rp1.591), dan dividen tahun 2025 adalah sebesar Rp1.197 (2024: Rp0).
- 3) **PT Ratah Timber ("RT")**
Pada tahun 1998, IHT I melakukan investasi saham pada RT sebanyak 6.000 lembar saham dengan total sebesar Rp510. RT berkedudukan di Jakarta Selatan dan bergerak dalam bidang usaha Pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT II ke dalam IHT I, kepemilikan Inhutani II pada RT telah beralih kepada IHT I. Pada tahun 2025, bagian rugi entitas asosiasi adalah sebesar Rp3.431 (2024: bagian laba dari entitas asosiasi, Rp18.622), dan dividen tahun 2025 adalah sebesar Rp7.000 (2024: Rp8.600).
- 4) **PT Segara Indochem ("SI")**
Pada tahun 1998, IHT I melakukan investasi saham pada SI sebanyak 678 lembar saham dengan total sebesar Rp170. SI berkedudukan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha perusahaan hutan, industri kayu, perdagangan kayu. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT II ke dalam IHT I, kepemilikan IHT II pada SI telah beralih kepada IHT I. Pada tahun 2025, bagian rugi entitas asosiasi adalah sebesar Rp0 (2024: bagian laba entitas asosiasi, Rp3.259).

**10. SHARE INVESTMENT AND INVESTMENT IN
ASSOCIATES (continued)**

Still Operating

- 1) **PT ITCI Hutani Manunggal ("IHM")**
In 1993, IHT I has an investment in IHM amounting to 10,246 shares with total amounting to Rp10,246. IHM is domiciled in East Kalimantan and engaged in forest plantations management.
- 2) **PT Gunung Gajah Abadi ("GGA")**
In 1997, IHT I has an investment in GGA amounting to 1,323 shares with total amounting to Rp1,323. GGA is domiciled in Samarinda City, East Kalimantan and engaged in Business and forest management. Furthermore, in connection with the merger of IHT II into IHT I, the ownership of IHT II at GGA has been transferred to IHT I. In 2025, the gain from associates' share is Rp1,344 (2024: Rp1,591), and the 2025 dividend is Rp1,197 (2024: Rp0).
- 3) **PT Ratah Timber ("RT")**
In 1998, IHT I has an investment in RT amounting to 6,000 shares with total amounting to Rp510. RT is domiciled in South Jakarta and engaged in Agriculture and plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT II into IHT I, the ownership of Inhutani II at RT has been transferred to IHT I. In 2025, the loss from associates' share is Rp3,431 (2024: the gain from associates, Rp18,622), and the 2025 dividend is Rp7,000 (2024: Rp8,600).
- 4) **PT Segara Indochem ("SI")**
In 1998, IHT I has an investment in SI amounting to 678 shares with total amounting to Rp170. SI is domiciled in Samarinda City, East Kalimantan and engaged in forest utilization, timber industry, timber trade. Furthermore, in connection with the merger of IHT II into IHT I, the ownership of IHT II at SI has been transferred to IHT I. In 2025, the loss from associates' share is Rp0 (2024: the gain from associates' Rp3,259).

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. INVESTASI SAHAM DAN INVESTASI PADA
ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)**

Masih beroperasi (lanjutan)

- 5) **PT Hutansanggam Berau ("HLL")**
Pada tahun 2003, IHT I melakukan investasi saham pada HLL sebanyak 450 lembar saham dengan total sebesar Rp450. HLL berkedudukan di Berau dan bergerak dalam bidang usaha pertanian, perindustrian, dan perdagangan umum. Pada tahun 2025, bagian laba entitas asosiasi adalah sebesar Rp2.067 (2024: Rp4), dan dividen tahun 2025 adalah sebesar Rp17 (2024: Rp17).
- 6) **PT Gema Hutani Lestari ("GHL")**
Pada tahun 1999, IHT I dan melakukan investasi saham pada GHL sebanyak 5.000 lembar saham dengan total sebesar Rp5.000. GHL berkedudukan di Jakarta Pusat dan bergerak dalam bidang usaha pengembangan dan peningkatan industri hasil hutan dan produktivitas lahan serta kualitas lingkungan hidup. Pada tahun 2025, bagian laba entitas asosiasi adalah sebesar Rp436 (2024: bagian laba entitas asosiasi sebesar Rp1.380), dan dividen tahun 2025 adalah sebesar Rp465 (2024: Rp257).
- 7) **PT IDEC Abadi Wood Industries ("IWI")**
Pada tahun 1981, IHT I melakukan investasi saham pada IWI sebanyak 2.145 lembar saham dengan total sebesar Rp1.348. IWI berkedudukan di Tarakan dan bergerak dalam bidang usaha perindustrian. Pada tahun 2025, bagian laba entitas asosiasi adalah sebesar Rp6.664 (2024: Rp5.617), dan dividen tahun 2025 adalah sebesar Rp521 (2024: Rp519).
- 8) **PT ITCI Kayan Hutani ("IKH")**
Pada tahun 1997, IHT I melakukan investasi saham pada IKH sebanyak 4.340 lembar saham dengan total sebesar Rp4.340. IKH berkedudukan di Jakarta Selatan dan bergerak dalam bidang usaha pengembangan dan peningkatan industri hasil hutan dan produktivitas lahan serta kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Utara. Pada tahun 2025, bagian laba entitas asosiasi adalah sebesar Rp3.106 (2024: Rp2.535), dan dividen tahun 2025 adalah sebesar Rp954 (2024: Rp987).

**10. SHARE INVESTMENT AND INVESTMENT IN
ASSOCIATES (continued)**

Still Operating (continued)

- 5) **PT Hutansanggam Berau ("HLL")**
In 2003, IHT I has an investment in HLL amounting to 450 shares with total amounting to Rp450. HLL is domiciled in Berau and engaged in agriculture, industry, and trading. In 2025, the gain from associates' share is Rp2,067 (2024: Rp4), and the 2025 dividend is Rp17 (2024: Rp17).
- 6) **PT Gema Hutani Lestari ("GHL")**
In 1999, IHT I has an investment in GHL amounting to 5,000 shares with total amounting to Rp5,000. GHL is domiciled in Central Jakarta and engaged in development and improvement of forest industry products and land productivity as well as environmental quality. In 2025, the gain from associates' share is Rp436 (2024: gain from associates' share is Rp1,380), and the 2025 dividend is Rp465 (2024: Rp257).
- 7) **PT IDEC Abadi Wood Industries ("IWI")**
In 1981, IHT I has an investment in IWI amounting to 2,145 shares with total amounting to Rp1,348. IWI is domiciled in Tarakan and engaged in industry. In 2025, the gain from associates' share is Rp6,664 (2024: Rp5,617), and the 2025 dividend is Rp521 (2024: Rp519).
- 8) **PT ITCI Kayan Hutani ("IKH")**
In 1997, IHT I has an investment in IKH amounting to 4,340 shares with total amounting to Rp4,340. IKH is domiciled in South Jakarta and engaged in development and improvement of forest product industry and land productivity as well as environmental quality in North Kalimantan. In 2025, the gain from associates' share is Rp3.106 (2024: Rp2,535), and the 2025 dividend is Rp954 (2024: Rp987).

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. INVESTASI SAHAM DAN INVESTASI PADA
ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)**

Masih beroperasi (lanjutan)

- 9) **PT Roda Mas Timber Kalimantan ("RMT")**
Pada tahun 1996, IHT I melakukan investasi saham pada RMT sebanyak 400 lembar saham dengan total sebesar Rp400. RMT berkedudukan di Jakarta Pusat dan bergerak dalam bidang usaha Pertanian, perkebunan dan kehutanan, termasuk hutan tanaman industri di Samarinda. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT II ke dalam IHT I, kepemilikan IHT II pada RMT telah beralih kepada IHT I. Pada tahun 2025, bagian rugi entitas asosiasi adalah sebesar Rp0 (2024: Rp2.811).
- 10) **PT Intracawood Manufacturing ("IM")**
Pada tahun 1988, IHT I melakukan investasi saham pada IM sebanyak 5.538.500 lembar saham dengan total sebesar Rp5.538. IM berkedudukan di Kalimantan Utara dan bergerak dalam bidang usaha industri kayu.
- 11) **PT Bhineka Wana ("BHW")**
Pada tahun 1992, IHT I melakukan investasi saham pada BHW sebanyak 1.900 lembar saham dengan total sebesar Rp1.900. BHW berkedudukan di Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman.
- 12) **PT Hutan Mahligai ("HMH")**
Pada tahun 1992, IHT I melakukan investasi saham pada HMH sebanyak 3.930 lembar saham dengan total sebesar Rp3.930. HMH berkedudukan di Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman.
- 13) **PT Perintis Adiwana ("PA")**
Pada tahun 1993, IHT I melakukan investasi saham pada PA sebanyak 2.278 lembar saham dengan total sebesar Rp2.278. PA berkedudukan di Banjarmasin dan bergerak dalam bidang usaha Hutan Tanaman Industri. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT III ke dalam IHT I, kepemilikan Inhutani III pada PA telah beralih kepada IHT I.
- 14) **PT Tusam Hutani Lestari ("THL")**
Pada tahun 1993, IHT V melakukan investasi saham pada THL sebanyak 7.947 lembar saham dengan total sebesar Rp7.947. THL berkedudukan di Aceh dan bergerak dalam bidang usaha tanaman industri pengelolaan hutan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV ke dalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada THL telah beralih kepada IHT V.

**10. SHARE INVESTMENT AND INVESTMENT IN
ASSOCIATES (continued)**

Still Operating (continued)

- 9) **PT Roda Mas Timber Kalimantan ("RMT")**
In 1996, IHT I has an investment in RMT amounting to 400 shares with total amounting to Rp400. RMT is domiciled in Central Jakarta and engaged in Agriculture, plantations and forestry, including industrial plantation forests in Samarinda. Furthermore, in connection with the merger of IHT II into IHT I, the ownership of IHT II at RMT has been transferred to IHT I. In 2025, the loss from associates' share is Rp0 (2024: Rp2,811).
- 10) **PT Intracawood Manufacturing ("IM")**
In 1988, IHT I has an investment in IM amounting to 5,538,500 shares with total amounting to Rp5,538. IM is domiciled in North Kalimantan and engaged in wood industry.
- 11) **PT Bhineka Wana ("BHW")**
In 1992, IHT I has an investment in BHW amounting to 1,900 shares with total amounting to Rp1,900. BHW is domiciled in East Kalimantan and engaged in forest plantations.
- 12) **PT Hutan Mahligai ("HMH")**
In 1992, IHT I has an investment in HMH amounting to 3,930 shares with total amounting to Rp3,930. HMH is domiciled in East Kalimantan and engaged in forest plantations.
- 13) **PT Perintis Adiwana ("PA")**
In 1993, IHT I has an investment in PA amounting to 2,278 shares with total amounting to Rp2,278. PA is domiciled in Banjarmasin and engaged in industrial forest. Furthermore, in connection with the merger of IHT III into IHT I, the ownership of Inhutani III at PA has been transferred to IHT I.
- 14) **PT Tusam Hutani Lestari ("THL")**
In 1993, IHT V has an investment in THL amounting to 7,947 shares with total amounting to Rp7,947. THL is domiciled in Aceh and engaged in management of industrial forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at THL has been transferred to IHT V.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. INVESTASI SAHAM DAN INVESTASI PADA
ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)**

Tidak beroperasi

- 15) **PT Anangga Pundi Nusa ("APN")**
Pada tahun 1992, IHT I melakukan investasi saham pada APN sebanyak 4.276 lembar saham dengan total sebesar Rp4.276. APN berkedudukan di Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman.
- 16) **PT Berkat Hutan Pustaka ("BHP")**
Pada tahun 1992, IHT I melakukan investasi saham pada BHP sebanyak 2.962 lembar saham dengan total sebesar Rp2.962. BHP berkedudukan di Sulawesi Tengah dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman.
- 17) **PT Hutan Kusuma ("HKS")**
Pada tahun 1992, IHT I melakukan investasi saham pada HKS sebanyak 1.988 lembar saham dengan total sebesar Rp1.988. HKS berkedudukan di Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman.
- 18) **PT Taman Daulat Wananusa ("TDW")**
Pada tahun 1992, IHT I melakukan investasi saham pada TDW sebanyak 2.886 lembar saham dengan total sebesar Rp2.886. TDW berkedudukan di Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman.
- 19) **PT Dirga Rimba ("DRI")**
Pada tahun 1992, IHT I melakukan investasi saham pada DRI sebanyak 1.485 lembar saham dengan total sebesar Rp1.485. DRI berkedudukan di Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman.
- 20) **PT Estetika Rimba ("ERI")**
Pada tahun 1992, IHT I melakukan investasi saham pada ERI sebanyak 1.485 lembar saham dengan total sebesar Rp1.485. ERI berkedudukan di Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman.
- 21) **PT Intan Hutani Lestari ("IHL")**
Pada tahun 1996, IHT I melakukan investasi saham pada IHL sebanyak 742 lembar saham dengan total sebesar Rp742. IHL berkedudukan di Sulawesi Barat dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman.

**10. SHARE INVESTMENT AND INVESTMENT IN
ASSOCIATES (continued)**

Dormant

- 15) **PT Anangga Pundi Nusa ("APN")**
In 1992, IHT I has an investment in APN amounting to 4,276 shares with total amounting to Rp4,276. APN is domiciled in East Kalimantan and engaged in forest plantations.
- 16) **PT Berkat Hutan Pustaka ("BHP")**
In 1992, IHT I has an investment in BHP amounting to 2,962 shares with total amounting to Rp2,962. BHP is domiciled in Central Sulawesi and engaged in forest plantations.
- 17) **PT Hutan Kusuma ("HKS")**
In 1992, IHT I has an investment in amounting to 1,988 shares with total amounting to Rp1,988. HKS is domiciled in East Kalimantan and engaged in forest plantations.
- 18) **PT Taman Daulat Wananusa ("TDW")**
In 1992, IHT I has an investment in TDW amounting to 2,886 shares with total amounting to Rp2,886. TDW is domiciled in East Kalimantan and engaged in forest plantations.
- 19) **PT Dirga Rimba ("DRI")**
In 1992, IHT I has an investment in amounting to 1,485 shares with total amounting to Rp1,485. DRI is domiciled in East Kalimantan and engaged in forest plantations.
- 20) **PT Estetika Rimba ("ERI")**
In 1992, IHT I has an investment in ERI amounting to 1,485 shares with total amounting to Rp1,485. ERI is domiciled in East Kalimantan and engaged in forest plantations.
- 21) **PT Intan Hutani Lestari ("IHL")**
In 1996, IHT I has an investment in IHL amounting to 742 shares with total amounting to Rp742. IHL is domiciled in West Sulawesi and engaged in forest plantations.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. INVESTASI SAHAM DAN INVESTASI PADA
ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)**

Tidak beroperasi (lanjutan)

- 22) **PT Kirana Rimba ("KRI")**
Pada tahun 1992, IHT I melakukan investasi saham pada KRI sebanyak 1.120 lembar saham dengan total sebesar Rp1.120. KRI berkedudukan di Kalimantan Selatan dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT II ke dalam IHT I, kepemilikan IHT II pada KRI telah beralih kepada IHT I.
- 23) **PT Jati Cakrawala ("JCK")**
Pada tahun 1992, IHT I melakukan investasi saham pada JCK sebanyak 1.260 lembar saham dengan total sebesar Rp1.260. JCK berkedudukan di Maluku dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT II ke dalam IHT I, kepemilikan IHT II pada JCK telah beralih kepada IHT I.
- 24) **PT Wana Tani Lestari ("WTL")**
Pada tahun 1998, IHT I melakukan investasi saham pada WTL sebanyak 2.730 lembar saham dengan total sebesar Rp2.730. WTL berkedudukan di Sulawesi Tengah dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT II ke dalam IHT I, kepemilikan IHT II pada WTL telah beralih kepada IHT I.
- 25) **PT Hutan Trans Kencana ("HTK")**
Pada tahun 1994, IHT I melakukan investasi saham pada HTK sebanyak 3.425 lembar saham dengan total sebesar Rp3.425. HTK berkedudukan di Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT II ke dalam IHT I, kepemilikan IHT II pada HTK telah beralih kepada IHT I.
- 26) **PT Eritani Lestari ("ELE")**
Pada tahun 1992, IHT I melakukan investasi saham pada ELE sebanyak 1.596 lembar saham dengan total sebesar Rp1.596. ELE berkedudukan di Maluku dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT II ke dalam IHT I, kepemilikan IHT II pada ELE telah beralih kepada IHT I.

**10. SHARE INVESTMENT AND INVESTMENT IN
ASSOCIATES (continued)**

Dormant (continued)

- 22) **PT Kirana Rimba ("KRI")**
In 1992, IHT I has an investment in KRI amounting to 1,120 shares with total amounting to Rp1,120. KRI is domiciled in South Kalimantan and engaged in forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT II into IHT I, the ownership of IHT II at KRI has been transferred to IHT I.
- 23) **in PT Jati Cakrawala ("JCK")**
In 1992, IHT I has an investment in JCK amounting to 1,260 shares with total amounting to Rp1,260. JCK is domiciled in Maluku and engaged in forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT II into IHT I, the ownership of IHT II at JCK has been transferred to IHT I.
- 24) **PT Wana Tani Lestari ("WTL")**
In 1998, IHT I has an investment in WTL amounting to 2,730 shares with total amounting to Rp2,730. WTL is domiciled in Central Sulawesi and engaged in forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT II into IHT I, the ownership of IHT II at WTL has been transferred to IHT I.
- 25) **PT Hutan Trans Kencana ("HTK")**
In 1994, IHT I has an investment in HTK amounting to 3,425 shares with total amounting to Rp3,425. HTK is domiciled in East Kalimantan and engaged in forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT II into IHT I, the ownership of IHT II at HTK has been transferred to IHT I.
- 26) **PT Eritani Lestari ("ELE")**
In 1992, IHT I has an investment in ELE amounting to 1,596 shares with total amounting to Rp1,596. ELE is domiciled in Maluku and engaged in forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT II into IHT I, the ownership of IHT II at ELE has been transferred to IHT I.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. INVESTASI SAHAM DAN INVESTASI PADA
ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)**

Tidak beroperasi (lanjutan)

- 27) **PT Kusuma Puspawarna ("KPS")**
Pada tahun 1992, IHT I melakukan investasi saham pada KPS sebanyak 2.403 lembar saham dengan total sebesar Rp2.403. KPS berkedudukan di Kalimantan Tengah dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT III ke dalam IHT I, kepemilikan IHT III pada KPS telah beralih kepada IHT I.
- 28) **PT Puspa Warna Cemerlang ("PWC")**
Pada tahun 1992, IHT I melakukan investasi saham pada PWC sebanyak 1.277 lembar saham dengan total sebesar Rp1.277. PWC berkedudukan di Kalimantan Tengah dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT III ke dalam IHT I, kepemilikan IHT III pada PWC telah beralih kepada IHT I.
- 29) **PT Rimba Wawasan Permai ("RWP")**
Pada tahun 1992, IHT V melakukan investasi saham pada RWP sebanyak 1.107 lembar saham dengan total sebesar Rp1.107. RWP berkedudukan di Aceh dan bergerak dalam bidang usaha tanaman industri pengelolaan hutan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV ke dalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada RWP telah beralih kepada IHT V.
- 30) **PT Aceh Suaka Wana Nusa Prima ("ASW")**
Pada tahun 1992, IHT V melakukan investasi saham pada ASW sebanyak 597 lembar saham dengan total sebesar Rp597. ASW berkedudukan di Aceh dan bergerak dalam bidang usaha tanaman industri pengelolaan hutan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV ke dalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada ASW telah beralih kepada IHT V.

**10. SHARE INVESTMENT AND INVESTMENT IN
ASSOCIATES (continued)**

Dormant (continued)

- 27) **PT Kusuma Puspawarna ("KPS")**
In 1992, IHT I has an investment in KPS amounting to 2,403 shares with total amounting to Rp2,403. KPS is domiciled in Central Kalimantan and engaged in forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT III into IHT I, the ownership of IHT III at KPS has been transferred to IHT I.
- 28) **PT Puspa Warna Cemerlang ("PWC")**
In 1992, IHT I has an investment in PWC amounting to 1,277 shares with total amounting to Rp1,277. PWC is domiciled in Central Kalimantan and engaged in forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT III into IHT I, the ownership of IHT III at PWC has been transferred to IHT I.
- 29) **PT Rimba Wawasan Permai ("RWP")**
In 1992, IHT V has an investment in RWP amounting to 1,107 shares with total amounting to Rp1,107. RWP is domiciled in Aceh and engaged in management of industrial forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at RWP has been transferred to IHT V.
- 30) **PT Aceh Suaka Wana Nusa Prima ("ASW")**
In 1992, IHT V has an investment in ASW amounting to 597 shares with total amounting to Rp597. ASW is domiciled in Aceh and engaged in management of industrial forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at ASW has been transferred to IHT V.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. INVESTASI SAHAM DAN INVESTASI PADA
ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)**

Tidak beroperasi (lanjutan)

- 31) **PT Rimba Penyangga Utama ("RPU")**
Pada tahun 1992, IHT V melakukan investasi saham pada RPU sebanyak 1.650 lembar saham dengan total sebesar Rp1.650. RPU berkedudukan di Aceh dan bergerak dalam bidang usaha tanaman industri pengelolaan hutan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV ke dalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada RPU telah beralih kepada IHT V.
- 32) **PT Rimba Timur Sentosa ("RTS")**
Pada tahun 1992, IHT V melakukan investasi saham pada RTS sebanyak 1.423 lembar saham dengan total sebesar Rp1.423. RTS berkedudukan di Aceh dan bergerak dalam bidang usaha tanaman industri pengelolaan hutan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV ke dalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada RTS telah beralih kepada IHT V.
- 33) **PT Rimba Rokan Hulu ("RRH")**
Pada tahun 1992, IHT V melakukan investasi saham pada RRH sebanyak 2.488 lembar saham dengan total sebesar Rp2.488. RRH berkedudukan di Riau dan bergerak dalam bidang usaha tanaman industri. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV ke dalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada RRH telah beralih kepada IHT V.
- 34) **PT Rimba Swasembada Semesta ("RSS")**
Pada tahun 1992, IHT V melakukan investasi saham pada RSS sebanyak 1.504 lembar saham dengan total sebesar Rp1.504. RSS berkedudukan di Sumatera Barat dan bergerak dalam bidang usaha tanaman industri. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV ke dalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada RSS telah beralih kepada IHT V.
- 35) **PT Gunung Medang Raya ("GMR")**
Pada tahun 1994, IHT V melakukan investasi saham pada GMR sebanyak 1.375 lembar saham dengan total sebesar Rp1.375. GMR berkedudukan di Aceh dan bergerak dalam bidang usaha tanaman industri pengelolaan hutan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV ke dalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada GMR telah beralih kepada IHT V.

**10. SHARE INVESTMENT AND INVESTMENT IN
ASSOCIATES (continued)**

Dormant (continued)

- 31) **PT Rimba Penyangga Utama ("RPU")**
In 1992, IHT V has an investment in RPU amounting to 1,650 shares with total amounting to Rp1,650. RPU is domiciled in Aceh and engaged in management of industrial forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at RPU has been transferred to IHT V.
- 32) **PT Rimba Timur Sentosa ("RTS")**
In 1992, IHT V has an investment in RTS amounting to 1,423 shares with total amounting to Rp1,423. RTS is domiciled in Aceh and engaged in management of industrial forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at RTS has been transferred to IHT V.
- 33) **PT Rimba Rokan Hulu ("RRH")**
In 1992, IHT V has an investment in RRH amounting to 2,488 shares with total amounting to Rp2,488. RRH is domiciled in Riau and engaged in management of industrial plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at RRH has been transferred to IHT V.
- 34) **PT Rimba Swasembada Semesta ("RSS")**
In 1992, IHT V has an investment in RSS amounting to 1,504 shares with total amounting to Rp1,504. RSS is domiciled in West Sumatera and engaged in industrial plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at RSS has been transferred to IHT V.
- 35) **PT Gunung Medang Raya ("GMR")**
In 1994, IHT V has an investment in GMR amounting to 1,375 shares with total amounting to Rp1,375. GMR is domiciled in Aceh and engaged in management of industrial forest. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at GMR has been transferred to IHT V.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. INVESTASI SAHAM DAN INVESTASI PADA
ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)**

Tidak beroperasi (lanjutan)

- 36) **PT Hutani Bhara Induk ("HBI")**
Pada tahun 1995, IHT V melakukan investasi saham pada HBI sebanyak 1.886 lembar saham dengan total sebesar Rp1.886. HBI berkedudukan di Riau dan bergerak dalam bidang usaha pengelolaan konsesi kehutanan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV ke dalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada HBI telah beralih kepada IHT V.
- 37) **PT Hutani Bhara Union Lestari ("HBU")**
Pada tahun 1995, IHT V melakukan investasi saham pada HBU sebanyak 612 lembar saham dengan total sebesar Rp612. HBU berkedudukan di Riau dan bergerak dalam bidang usaha pengelolaan konsesi kehutanan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV ke dalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada HBU telah beralih kepada IHT V.
- 38) **PT Hutani Nasional Lestari ("HNL")**
Pada tahun 1995, IHT V melakukan investasi saham pada HNL sebanyak 663 lembar saham dengan total sebesar Rp663. HNL berkedudukan di Riau dan bergerak dalam bidang usaha pengelolaan konsesi kehutanan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV ke dalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada HNL telah beralih kepada IHT V.
- 39) **PT Mandau Abadi ("MAB")**
Pada tahun 1997, IHT V melakukan investasi saham pada MAB sebanyak 294 lembar saham dengan total sebesar Rp294. MAB berkedudukan di Riau dan bergerak dalam bidang usaha eksploitasi hutan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV ke dalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada MAB telah beralih kepada IHT V.
- 40) **PT Hutani Olindo Lestari ("HOL")**
Pada tahun 1998, IHT V melakukan investasi saham pada HOL sebanyak 245 lembar saham dengan total sebesar Rp245. HOL berkedudukan di Aceh dan bergerak dalam bidang usaha pengelolaan konsesi kehutanan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV ke dalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada HOL telah beralih kepada IHT V.

**10. SHARE INVESTMENT AND INVESTMENT IN
ASSOCIATES (continued)**

Dormant (continued)

- 36) **PT Hutani Bhara Induk ("HBI")**
In 1995, IHT V has an investment in HBI amounting to 1,886 shares with total amounting to Rp1,886. HBI is domiciled in Riau and engaged in the business of concession forest. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at HBI has been transferred to IHT V.
- 37) **PT Hutani Bhara Union Lestari ("HBU")**
In 1995, IHT V has an investment in HBU amounting to 612 shares with total amounting to Rp612. HBU is domiciled in Riau and engaged in the business of forest concession. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at HBU has been transferred to IHT V.
- 38) **PT Hutani Nasional Lestari ("HNL")**
In 1995, IHT V has an investment in HNL amounting to 663 shares with total amounting to Rp663. HNL is domiciled in Riau and engaged in the business of forest concession. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at HNL has been transferred to IHT V.
- 39) **PT Mandau Abadi ("MAB")**
In 1997, IHT V has an investment in MAB amounting to 294 shares with total amounting to Rp294. MAB is domiciled in Riau and engaged in forest exploitations. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT V at MAB has been transferred to IHT V.
- 40) **PT Hutani Olindo Lestari ("HOL")**
In 1998, IHT V has an investment in HOL amounting to 245 shares with total amounting to Rp245. HOL is domiciled in Aceh and engaged in the business of forest concession. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at HOL has been transferred to IHT V.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. INVESTASI SAHAM DAN INVESTASI PADA
ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)**

Tidak beroperasi (lanjutan)

- 41) **PT Hutani Seraya Lestari ("HSL")**
Pada tahun 1999, IHT V melakukan investasi saham pada HSL sebanyak 604 lembar saham dengan total sebesar Rp604. HSL berkedudukan di Riau dan bergerak dalam bidang usaha kehutanan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV kedalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada HSL telah beralih kepada IHT V.
- 42) **PT Arangan Hutani Lestari ("AHL")**
Pada tahun 2020, IHT V melakukan investasi pada AHL sebanyak 750 lembar saham dengan total sebesar Rp750. AHL berkedudukan di Jambi dan bergerak di bidang usaha kehutanan.
- 43) **PT Wana Teladan ("WTE")**
Pada tahun 2009, IHT V melakukan investasi pada WTE sebanyak 1.674 lembar saham dengan total sebesar Rp1.674. WT berkedudukan di Jambi dan bergerak di bidang usaha kehutanan.
- 44) **PT Dalek Hutani Esa ("DHE")**
Pada tahun 1999, IHT V melakukan investasi pada DHE sebanyak 876 lembar saham dengan total sebesar Rp876. DHE berkedudukan di Jambi dan bergerak di bidang usaha kehutanan.
- 45) **PT Hatma Hutani ("HHU")**
Pada tahun 1997, IHT V melakukan investasi pada HHU sebanyak 490 lembar saham dengan total sebesar Rp490. HHU berkedudukan di Jambi dan bergerak di bidang usaha kehutanan.

**10. SHARE INVESTMENT AND INVESTMENT IN
ASSOCIATES (continued)**

Dormant (continued)

- 41) **PT Hutani Seraya Lestari ("HSL")**
In 1999, IHT V has an investment in HSL amounting to 604 shares with total amounting to Rp604. HSL is domiciled in Riau and engaged in forestry. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at HSL has been transferred to IHT V.
- 42) **PT Arangan Hutani Lestari ("AHL")**
In 2020, IHT V has an investment in AHL amounting to 750 shares with total amounting to Rp750. AHL is domiciled in Jambi, and engaged in forestry.
- 43) **PT Wana Teladan ("WTE")**
In 2009, IHT V has an investment in WTE amounting to 1,674 shares with total amounting to Rp1,674. WTE is domiciled in Jambi, and engaged in forestry.
- 44) **PT Dalek Hutani Esa ("DHE")**
In 1999, IHT V has an investment in DHE amounting to 876 shares with total amounting to Rp876. DHE is domiciled in Jambi, and engaged in forestry.
- 45) **PT Hatma Hutani ("HHU")**
In 1997, IHT V has an investment in HHU amounting to 490 shares with total amounting to Rp490. HHU is domiciled in Jambi, and engaged in forestry.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. ASET BIOLOGIS

Aset biologis terdiri dari produk agrikultur (getah pinus dan tebu) dan kayu tegakan (tanaman jati dan pohon rimba lainnya).

11. BIOLOGICAL ASSETS

Biological assets comprise of agricultural produce (pine sap and sugar cane) and standing timber (teak wood and other forestry trees).

31 Desember 2025/December 31, 2025

	Produk agrikultur/ Agricultural product	Kayu tegakan/ Standing timber	Total/Total	
Saldo awal	35.552	14.274.788	14.310.340	Beginning balance
Perubahan nilai wajar	284.342	341.179	625.521	Changes in fair value
Pemindahan hasil panen ke persediaan	(273.076)	(254.296)	(527.372)	Transfer of harvested to inventories
Penanaman dan perawatan	-	182.984	182.984	Planting and maintenance
Saldo akhir	46.818	14.544.655	14.591.473	Ending balance
Aset lancar	46.818	635.247	682.065	Current assets
Aset tidak lancar	-	13.909.408	13.909.408	Non-current assets

31 Desember 2024/December 31, 2024

	Produk agrikultur/ Agricultural product	Kayu tegakan/ Standing timber	Total/Total	
Saldo awal	25.986	13.901.134	13.927.120	Beginning balance
Perubahan nilai wajar	279.649	488.063	767.712	Changes in fair value
Pemindahan hasil panen ke persediaan	(270.973)	(398.820)	(669.793)	Transfer of harvested to inventories
Penanaman dan perawatan	890	284.411	285.301	Planting and maintenance
Saldo akhir	35.552	14.274.788	14.310.340	Ending balance
Aset lancar	35.552	693.008	728.560	Current assets
Aset tidak lancar	-	13.581.780	13.581.780	Non-current assets

Per 31 Desember 2025, luas hutan produktif untuk kayu tegakan sebesar 869.897,1 Ha (2024: 866.781,1 Ha) (tidak diaudit).

As of December 31, 2025, there were 869,897.1 Ha of productive forest for standing timber (2024: 866,781.1 Ha) (unaudited).

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. ASET BIOLOGIS (lanjutan)

Nilai Wajar Aset Biologis

Produk Agrikultur

Nilai wajar atas produk agrikultur getah pinus dan tebu ditentukan pada *Level 2* berdasarkan harga pasar terkait yang diterapkan terhadap estimasi volume produk.

Kayu Tegakan

Nilai wajar atas kayu tegakan ditentukan pada *Level 3*, dengan menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*) berdasarkan teknik nilai kini (*present value*) dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan neto atas aset tanaman/produk.

Arus kas masa depan neto yang diharapkan atas kayu tegakan ditentukan menggunakan input utama sebagai berikut:

- Kayu tegakan siap untuk dipanen satu kali saja sekitar 25-60 tahun setelah penanaman awal.
- Tingkat diskonto yang digunakan merupakan tingkat spesifik aset untuk operasi kayu tegakan Grup yang diterapkan dalam perhitungan arus kas masa depan yang didiskontokan.
- Harga jual kayu bulat selama periode proyeksi ditentukan berdasarkan harga jual rata-rata produk agrikultur yang diekstrapolasikan berdasarkan pertumbuhan harga pasar kayu bulat.

Tebu

Nilai wajar atas produk agrikultur tebu ditentukan menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*) berdasarkan teknik nilai kini (*present value*) dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan neto atas aset tanaman/produk.

Perhitungan nilai wajar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 ditentukan berdasarkan laporan penilaian dari KJPP independen, KJPP Yufrizal, Deny Kamal & Rekan, yang dituangkan dalam laporannya tanggal 17 April 2026 (2024: 27 Maret 2025).

11. BIOLOGICAL ASSETS (continued)

Fair Values of Biological Assets

Agricultural Produce

The fair values of the pine sap and sugar cane agricultural produce are determined at *Level 2* based on the applicable market price applied to the estimated volume of the product.

Standing Timber

The fair values of standing timber are determined at *Level 3*, using income approach based on the present value technique by discounting net future estimated cash flows of the underlying plantations/product.

The net expected future cash flows of standing timber are determined using the key inputs as follows:

- Timber plantations are available for one-time harvest about 25-60 years after initial planting.
- Discount rate used represents the asset specific rate for the Group's standing timber operations applied in the discounted future cash flows calculation.
- Selling price of logs over the projection period is determined based on the average selling price of the agricultural produce which is extrapolated in accordance with the market price growth of logs.

Sugar cane

The fair values of the agricultural produce of sugar cane are determined using income approach based on the present value technique by discounting net future estimated cash flows of the underlying plantations/produce.

The fair value calculation for the year ended December 31, 2025 was determined based on the valuation report from the independent KJPP, KJPP Yufrizal, Deny Kamal & Partners, as expressed in their report dated April 17, 2026 (2024: March 27, 2025).

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. ASET BIOLOGIS (lanjutan)

Nilai Wajar Aset Biologis (lanjutan)

Input Utama untuk Penilaian Aset Biologis

Kisaran input kuantitatif yang tidak dapat diamati (Level 2 dan 3) yang digunakan dalam menentukan nilai wajar dari produk agrikultur dan kayu tegakan adalah sebagai berikut:

11. BIOLOGICAL ASSETS (continued)

Fair Values of Biological Assets (continued)

Key Inputs to Valuation on Biological Assets

Range of quantitative unobservable inputs (Level 2 and 3) used in determining the fair values of agricultural produce and standing timber are as follows:

Deskripsi/ Description	Input yang tidak dapat diobservasi/ Unobservable inputs	Rentang input (probabilitas rata-rata tertimbang)/ Range of inputs (probability weighted average)		Hubungan input yang tidak dapat diobservasi dengan nilai wajar/Relationship of unobservable inputs to fair value
		31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
Kayu tegakan/ Consumable plants	Estimasi volume tanaman tebangan/Expected volume of consumable plants	26.480.442m ³	26.381.554m ³	Semakin tinggi volume, semakin tinggi nilai wajarnya/The higher the volume, the higher the fair value
	Harga nilai wajar (dalam ribuan Rupiah)/Fair value price (in thousand Rupiah)			Semakin tinggi harga, semakin tinggi nilai wajarnya/The higher the price, the higher the fair value
	- A I	137-2.158	60-1.706	
	- A II	196-5.337	187-4.955	
	- A III	225-11.858	140-10.587	
	Nilai diskonto rata-rata/ Average discount rate	10,03%-10,69%	10,78%-10,86%	Semakin tinggi nilai diskonto, semakin rendah nilai wajarnya/The higher the discount rate, the lower the fair value
Getah pinus/Pine sap	Estimasi volume hasil getah pinus/Expected volume of pine sap	660 ton	700 ton	Semakin tinggi volume, semakin tinggi nilai wajarnya/The higher the volume, the higher the fair value
	Harga nilai wajar (dalam ribuan Rupiah)/Fair value price (in thousand Rupiah)	9.450/ton	12.500/ton	Semakin tinggi harga, semakin tinggi nilai wajarnya/The higher the price, the higher the fair value
Tebu/ Sugar cane	Estimasi volume tebu/Expected volume of sugar cane	88.535 ton	96.350 ton	Semakin tinggi volume, semakin tinggi nilai wajarnya/The higher the volume, the higher the fair value
	Harga nilai wajar (dalam ribuan Rupiah)/Fair value price (in thousand Rupiah)	591/ton	582/ton	Semakin tinggi harga, semakin tinggi nilai wajarnya/The higher the price, the higher the fair value

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. ASET BIOLOGIS (lanjutan)

Nilai Wajar Aset Biologis (lanjutan)

**Input Utama untuk Penilaian Aset Biologis
(lanjutan)**

Input utama *Level 3* yang digunakan oleh Grup didapatkan dan dievaluasi sebagai berikut:

- Volume tanaman tebang ditentukan berdasarkan umur, hasil panen historis, faktor koreksi dan variasi yang disebabkan oleh iklim dan angka kerusakan hutan.
- Harga tanaman tebang ditentukan berdasarkan harga rata-rata aktual penjualan Grup dikurangi biaya pemanenan dan biaya untuk menjual.
- Nilai diskonto ditentukan menggunakan *capital asset pricing model* untuk menghitung nilai diskonto yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai waktu uang dan risiko spesifik untuk aset tersebut.

Analisis sensitivitas naratif dari input yang tidak dapat diamati (*Level 3*) yang digunakan dalam menentukan nilai wajar aset biologis adalah sebagai berikut:

Input	Sensitivitas Nilai Wajar terhadap Input
Tingkat diskonto	Kenaikan/(penurunan) tingkat diskonto akan menyebabkan (penurunan)/peningkatan nilai wajar aset biologis
Harga jual produk agrikultur olahan	Kenaikan/(penurunan) harga komoditas akan menyebabkan peningkatan/(penurunan) nilai wajar aset biologis
Tingkat produksi	Kenaikan/(penurunan) tingkat produksi akan menghasilkan peningkatan/(penurunan) nilai wajar aset biologis
Tingkat inflasi	Kenaikan/(penurunan) tingkat inflasi akan menghasilkan (penurunan)/peningkatan nilai wajar aset biologis

12. SEWA

Grup memiliki kontrak sewa untuk kendaraan yang digunakan dalam operasinya. Grup dibatasi untuk menyewakan kembali aset sewaan.

Sewa kendaraan memiliki jangka waktu sewa 3 tahun.

11. BIOLOGICAL ASSETS (continued)

Fair Values of Biological Assets (continued)

**Key Inputs to Valuation on Biological Assets
(continued)**

The main *Level 3* inputs used by the Group are derived and evaluated as follows:

- Expected volume of consumable plants are determined based on the age of the plantation, historical yields, correction factor and variations caused by severe weather events and deforestation.
- Consumable plants prices are determined based on average actual sales from the Group less harvest cost and cost to sell.
- Discount rates are determined using a capital asset pricing model to calculate discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risk specific to the asset.

The narrative sensitivity analysis of unobservable inputs (*Level 3*) used in determining the fair values of the biological assets are as follows:

Inputs	Sensitivity Fair Value to the Inputs
Discount rate	An increase/(decrease) in the discount rate will cause a (decrease)/increase in the fair value of biological assets
Selling price of processed agricultural produce	An increase/(decrease) in the commodity prices would result in an increase/(decrease) in the fair value of biological assets
Production yield	An increase/(decrease) in production yields would result in an increase/(decrease) in the fair value of biological assets
Inflation rate	An increase/(decrease) in the inflation rate would result in a (decrease)/increase in the fair value of biological assets

12. LEASE

The Group has lease contracts for vehicle used in its operations. The Group is restricted from assigning and subleasing the leased assets.

Lease of vehicle generally has terms 3 years.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

12. SEWA (lanjutan)

Grup memiliki sewa tertentu untuk kendaraan dengan masa sewa kurang dari 12 bulan atau dengan nilai rendah. Grup menerapkan pengecualian pengakuan untuk sewa-sewa ini dan mengakui biaya sewa berdasarkan garis lurus dalam laba rugi.

Di bawah ini adalah total tercatat dari aset hak guna yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian Grup dan pergerakannya selama tahun berjalan:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Saldo awal	30.757	53.060
Penambahan	11.836	2.065
Pengurangan	(354)	(2.758)
Amortisasi (Catatan 24)	(25.201)	(21.610)
Total	17.038	30.757

*Beginning balance
Additions
Disposals
Amortization (Note 24)*

Total

Mutasi jumlah tercatat liabilitas sewa:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Saldo awal	33.323	60.342
Penambahan	11.836	2.065
Pengurangan	(873)	(2.877)
Penambahan bunga	2.888	5.074
Pembayaran	(23.539)	(31.281)
Subtotal	23.635	33.323
Dikurangi bagian lancar	(20.394)	(22.039)
Liabilitas sewa jangka panjang	3.241	11.284

Movement of lease liabilities:

*Beginning balance
Additions
Disposals
Accretion of interest
Payments*

Subtotal

Less current portion

Long-term lease liabilities

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

	2025	2024
Beban amortisasi aset hak guna (Catatan 24)	25.201	21.610
Beban bunga	2.888	5.074
Beban terkait sewa atas aset bernilai rendah dan jangka pendek	3.842	5.894
Total	31.931	32.578

Amounts recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income:

*Amortization expense
right of use asset (Note 24)
Interest expense
Expense relating to low value
assets and short-term leases*

Total

Analisis jatuh tempo liabilitas sewa sebagai berikut:

The analysis of the maturities of lease liabilities is as follows:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Dalam 1 tahun	20.394	22.039
Antara 2 - 3 tahun	3.241	11.284
Pembayaran sewa	23.635	33.323

*Within 1 year
Between 2 - 3 years*

Lease payments

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. ASET TETAP

Biaya perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap adalah sebagai berikut:

13. FIXED ASSETS

Acquisition costs, accumulated depreciation and book value of the assets are as follows:

31 Desember 2025 / December 31, 2025					
	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclas- sifications	Saldo akhir/ Ending Balance
Biaya perolehan					Acquisition cost
Tanaman produktif					Bearer plant
Tanaman menghasilkan					Mature plantation
Kayu putih	314.765	-	-	74.167	388.932
Karet	266.619	-	-	-	266.619
Tebu	87.180	27.872	-	94.781	209.833
Lainnya	3.934	-	-	-	3.934
Belum menghasilkan					Immature plantation
Pinus	472.133	31.622	(51)	-	503.704
Gliricidia sepium	413.336	6.262	-	-	419.598
Kayu putih	180.011	6.007	-	(74.167)	111.851
Karet	3.802	-	-	(611)	3.191
Tebu	94.781	-	-	(94.781)	-
Lainnya	5.872	944	(30)	610	7.396
Tanah	144.209	39	-	(687)	143.561
Bangunan	1.358.361	2.497	(56)	15.434	1.376.236
Jalan dan jembatan	612.328	7.354	(4.331)	8.645	623.996
Mesin dan instalasi	89.003	1.760	(322)	1.502	91.943
Tempat penimbunan kayu	22.430	-	-	3.620	26.050
Alat berat dan mesin industri	272.186	1.394	(287)	989	274.282
Kendaraan bermotor	77.177	2.628	(6.996)	(2.476)	70.333
Peralatan kantor	391.523	6.339	(1.032)	(1.264)	395.566
Aset dalam penyelesaian	44.878	32.210	(72)	(25.762)	51.254
Total biaya perolehan	4.854.528	126.928	(13.177)	-	4.968.279
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Tanaman menghasilkan					Mature plantation
Kayu putih	59.096	17.672	-	-	76.768
Tebu	48.420	52.416	-	-	100.836
Karet	34.323	8.928	-	-	43.251
Lainnya	3.934	-	-	-	3.934
Bangunan	890.193	54.085	(56)	6.245	950.467
Jalan dan jembatan	528.914	15.925	(4.331)	(4.306)	536.202
Mesin dan instalasi	76.359	4.622	(289)	(789)	79.903
Tempat penimbunan kayu	19.931	551	-	3.529	24.011
Alat berat dan mesin industri	260.013	4.289	(287)	572	264.587
Kendaraan bermotor	54.589	7.277	(4.341)	(889)	56.636
Peralatan kantor	283.993	20.895	(946)	(4.362)	299.580
Total akumulasi penyusutan	2.259.765	186.660	(10.250)	-	2.436.175
Akumulasi penurunan nilai	96.266	270	-	-	96.536
Nilai buku	2.498.497				2.435.568

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. ASET TETAP (lanjutan)

Biaya perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai
buku aset tetap adalah sebagai berikut: (lanjutan)

13. FIXED ASSETS (continued)

Acquisition costs, accumulated depreciation and
book value of the assets are as follows: (continued)

31 Desember 2024 / December 31, 2024						
Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclas- sifications	Saldo akhir/ Ending Balance		
Biaya perolehan						Acquisition cost
Tanaman produktif						Bearer plant
Tanaman menghasilkan						Mature plantation
Kayu putih	314.765	-	-	314.765		Melaleuca Cajuputi
Karet	176.496	-	(3.417)	266.619		Rubber
Tebu	80.036	-	-	87.180		Sugar cane
Lainnya	4.954	-	(1.020)	3.934		Others
Belum menghasilkan						Immature plantation
Pinus	428.868	43.346	(81)	472.133		Pine
Gliricidia sepium	398.271	15.065	-	413.336		Gliricidia sepium
Kayu putih	165.505	14.506	-	180.011		Melaleuca cajuputi
Karet	96.731	611	-	3.802		Rubber
Tebu	45.803	56.138	(16)	94.781		Sugar cane
Lainnya	10.377	166	(4.671)	5.872		Others
Tanah	143.970	-	(66)	144.209		Land
Bangunan	1.348.393	8.861	(1.591)	1.358.361		Buildings
Jalan dan jembatan	605.269	1.416	(8.983)	612.328		Roads and bridges
Mesin dan instalasi	81.812	7.169	(181)	89.003		Machinery and installations
Tempat penimbunan kayu	22.430	-	-	22.430		Wood landfills
Alat berat dan						Heavy equipment and
mesin industri	271.532	385	(426)	272.186		industrial machinery
Kendaraan bermotor	81.791	6.978	(11.143)	77.177		Vehicles
Peralatan kantor	375.057	15.648	(371)	391.523		Office equipment
Aset dalam penyelesaian	29.897	34.248	-	44.878		Construction in progress
Total biaya perolehan	4.681.957	204.537	(31.966)	4.854.528		Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Tanaman produktif						Bearear plant
Tanaman menghasilkan						Mature plantation
Kayu putih	44.796	14.300	-	59.096		Melaleuca Cajuputi
Tebu	26.664	21.756	-	48.420		Sugar cane
Karet	24.925	9.849	(451)	34.323		Rubber
Lainnya	4.929	25	(1.020)	3.934		Others
Bangunan	840.625	51.104	(1.536)	890.193		Buildings
Jalan dan jembatan	521.634	16.263	(8.983)	528.914		Roads and bridges
Mesin dan instalasi	73.511	3.029	(181)	76.359		Machinery and installations
Tempat penimbunan kayu	19.131	800	-	19.931		Wood landfills
Alat berat dan						Heavy equipment and
mesin industri	255.573	5.315	(426)	260.013		industrial machinery
Kendaraan bermotor	55.584	9.271	(10.715)	54.589		Vehicles
Peralatan kantor	267.463	16.901	(371)	283.993		Office equipment
Total akumulasi penyusutan	2.134.835	148.613	(23.683)	2.259.765		Total accumulated depreciation
Akumulasi penurunan nilai	95.416	850	-	96.266		Accumulated impairment
Nilai buku	2.451.706			2.498.497		Book value

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Luas total area tanaman produktif sebagai penghasil produk agrikultur adalah sebagai berikut:

	Hektar/Hectares	
	Tidak Diaudit/ Un-audited	
	2025	2024
Pinus	47.807	39.394
Kayu putih	36.791	46.810
Biomassa	35.167	38.952
Karet	9.124	12.162
Tebu	3.187	3.187
Lain-lain	374	5.208
Total	132.450	145.713

Pine
Melaleuca cajuputi
Biomass
Rubber
Sugar cane
Others

Total

Penyusutan aset tetap dibebankan sebagai berikut:

	2025	2024
Beban pokok pendapatan (Catatan 22)	97.286	72.732
Beban umum dan administrasi (Catatan 24)	89.374	75.881
Total	186.660	148.613

Depreciation of fixed assets was charged to the following:

Cost of revenue (Note 22)
General and administrative
expenses (Note 24)

Total

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, beban pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tetap adalah sebesar Rp18.319 berdasarkan tingkat kapitalisasi 8,59% (Catatan 27).

For the year ended December 31, 2025, the total borrowing costs capitalized to fixed assets amounting to Rp18,319 based on capitalization of 8.59% (Note 27).

Pada tahun 2025 dan 2024, laba dari penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

In 2025 and 2024, gain on disposal of fixed assets is as follows:

Laba pelepasan aset tetap

Gains on disposal of fixed assets

	2025	2024
Penerimaan dari pelepasan	14.626	3.852
Nilai tercatat neto	(183)	(2.906)
Total	14.443	946

Proceeds from disposals
Net carrying value

Total

Pada tahun 2025, aset dalam penyelesaian terutama merupakan bangunan, mesin dan peralatan Grup yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2026.

In 2025, construction in progress mainly represents building, machinery and equipment of the Group, which is expected to be completed in 2026.

Grup mempunyai beberapa bidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan. Manajemen berkeyakinan bahwa kepemilikan Hak Guna Bangunan yang jatuh tempo tahun 2027 sampai dengan tahun 2053 akan dapat diperbaharui dan/atau diperpanjang.

The Group owns several land with Hak Guna Bangunan ("Building Use Rights"). Management believes that the said titles of land right ownership that will expired from 2027 to 2053 can be renewed and/or extended.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025, aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan jumlah nilai pertanggungan sekitar Rp529.624 (2024: Rp556.112), yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Tanah dan bangunan Perusahaan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman (Catatan 16).

Akumulasi penurunan nilai aset tetap pada tahun 2025 dan 2024, terutama merupakan akumulasi penurunan nilai pabrik sagu Perusahaan di Sorong masing-masing sebesar Rp69.019.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, nilai perolehan aset tetap Grup yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp1.489.106 dan Rp1.249.808.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

13. FIXED ASSETS (continued)

As of December 31, 2025, the fixed assets are covered by insurance against losses from fire and other risks under a policy package with combined coverage amounting to about Rp529,624 (2024: Rp556,112) which in management's opinion, are adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

Land and buildings of the Company are used as collateral for borrowings (Note 16).

The accumulated impairment of fixed assets in 2025 and 2024, mainly represents the accumulated impairment of the Company's sago mill in Sorong amounting to Rp69,019, respectively.

As of December 31, 2025 and 2024, the acquisition value of the Group's fixed assets which have been fully depreciated but are still in use amounting to Rp1,489,106 and Rp1,249,808, respectively.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses.

14. UTANG USAHA

Utang ini terutama merupakan utang atas pembelian pupuk, pengadaan sarana prasarana produksi, dan lainnya.

14. TRADE PAYABLES

These payable mainly represent payable from purchase of fertilizer, production supplies and other supplies.

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Pihak berelasi (Catatan 28)	35.110	56.330	Related parties (Note 28)
Pihak ketiga	108.050	133.094	Third party
Total	143.160	189.424	Total

15. BEBAN AKRUAL

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Bonus dan tantiem	54.714	73.481
Tuntutan hukum	53.241	53.841
Denda pajak	33.893	23.571
Tanaman dan operasional	24.925	16.359
Gaji dan tunjangan	5.836	6.314
Lain-lain	28.804	16.491
Total	201.413	190.057

15. ACCRUED EXPENSES

Bonus and tantiem
Litigation case
Tax fines
Plantation and operational
Salary and allowances
Others

Total

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. PINJAMAN

a. Pinjaman bank jangka pendek

Kreditor	Fasilitas Facility	Jumlah Batas Pinjaman Maksimum/ Total Maximum Credit Limit
Perusahaan		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	CC/CC	14.890
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	KMK/KMK	105.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	CC/CC	25.800
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	CC/CC	50.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	KMK/KMK	75.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	SKBDN/SCF	150.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	CC/CC	19.900
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	KMK/KMK	27.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	KMK/KMK	150.000
PT Bank Raya Indonesia Tbk	KMK/KMK	200.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	KMK/KMK	200.000
Total (Catatan 28)		

Seluruh pinjaman merupakan pinjaman dalam mata uang Rupiah.

Tujuan dari pinjaman-pinjaman di atas adalah untuk Kredit Modal Kerja (KMK), Supply Chain Financing (SCF), dan Cash Collateral (CC).

Suku Bunga

Pinjaman dalam mata uang Rupiah dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar antara 2,44% sampai dengan 8,75% (2024: antara 4,21% sampai dengan 8,75%).

Jaminan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, semua fasilitas pinjaman yang diperoleh oleh Perusahaan dijamin dengan kas yang dibatasi penggunaannya (Catatan 5), piutang usaha (Catatan 6), persediaan (Catatan 8) dan aset tetap tertentu (Catatan 13).

16. LOANS

a. Short-term bank loans

Jumlah/ Amount		Creditors
2025	2024	
Company		
14.890	14.890	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
53.736	-	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
25.800	25.800	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
50.000	50.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
74.918	74.947	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
121.247	120.539	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
19.878	19.695	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
27.000	27.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
141.531	54.540	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
200.000	200.000	PT Bank Raya Indonesia Tbk
62.358	121.187	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
791.358	708.598	Total (Note 28)

All borrowings are denominated in Rupiah.

The purpose of the above loans is for Working Capital Credit (KMK), Supply Chain Financing (SCF), and Cash Collateral (CC).

Interest Rate

The loans denominated in Rupiah bear interest at annual rates ranging from 2.44% to 8.75% (2024: from 4.21% to 8.75%).

Collateral

As of December 31, 2025 and 2024, all loan facilities obtained by the Company are secured with restricted cash (Note 5), account receivables (Note 6), inventories (Note 8) and certain fixed assets (Note 13).

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. PINJAMAN (lanjutan)

a. Pinjaman bank jangka pendek (lanjutan)

Pembatasan-pembatasan

Perusahaan

Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman-pinjaman tersebut, Perusahaan diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank sehubungan dengan, antara lain, pemberian pinjaman; penjualan aset jika melebihi batasan tertentu; dan penyertaan saham baru jika melebihi batasan tertentu.

Selain itu, Perusahaan juga diharuskan untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Kepatuhan atas Syarat-syarat Pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2025, terdapat persyaratan pinjaman-pinjaman jangka pendek Perusahaan yang tidak terpenuhi dan belum memperoleh waiver letter. Sedangkan, pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman jangka pendek tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai ketentuan perjanjian kredit terkait.

b. Pinjaman bank jangka panjang

Kreditor/ Creditors	Fasilitas/ Facility	Jumlah Batas Pinjaman Maksimum/ Maximum Credit Limit	Jadwal Pelunasan/ Schedule of Repayments	Jumlah/Amount	
				2025	2024
Perusahaan/ Company					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	KTK/ KTK	190.000	Juni 2027/ June 2027	95.001	158.334
PT Bank Raya Indonesia Tbk	KTK/ KTK	100.000	Oktober 2028/ October 2028	60.000	80.000
Subtotal/Subtotal (Catatan / Note 28)				155.001	238.334
Dikurangi bagian lancar/Less current portion				(155.001)	(83.333)
Bagian Jangka Panjang/Long-term Portion				-	155.001

16. LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

Covenants

Company

Under the terms of the related loan agreements, the Company is required to obtain prior written consent from the banks in respect of, among others, granting of loans; disposal of assets in excess of certain threshold; and new share participant if exceed certain limits.

In addition, the Company is also required to maintain certain financial ratios.

Compliance with Loan Covenants

As of December 31, 2025 there were covenants for the Company's short-term loans that were not met and had not received a waiver letter. Meanwhile, as of December 31, 2024, the Company has either complied with all of the covenants of the above-mentioned short-term loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

b. Long-term bank loans

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. PINJAMAN (lanjutan)

b. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

Pinjaman bank Kredit Transaksional Khusus ("KTK") merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan untuk mendukung pembiayaan kebutuhan operasional serta pendanaan kegiatan usaha Perusahaan. Fasilitas ini bersifat *non-revolving* sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit. Agunan yang dijaminkan atas fasilitas KTK meliputi persediaan dan aset tetap milik Perusahaan, sesuai dengan perjanjian kredit dengan pihak bank.

Suku Bunga

Fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah dikenakan tingkat suku bunga tahunan sebesar 8,75% (2024: antara 4,40% sampai dengan 8,75%) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Jaminan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, semua fasilitas pinjaman yang diperoleh oleh Grup dijamin dengan kas yang dibatasi penggunaannya (Catatan 5), persediaan (Catatan 8) dan aset tetap tertentu (Catatan 13).

Pembatasan-pembatasan

Perusahaan

Perjanjian-perjanjian pinjaman yang diperoleh Perusahaan di atas mensyaratkan beberapa pembatasan, antara lain, untuk menjaminkan harta kekayaannya kepada pihak lain (kecuali untuk penjaminan yang telah dilakukan pada tanggal perjanjian kredit); meminjamkan uang kepada pihak ketiga; menggabungkan usaha atau konsolidasi dengan pihak lain kecuali Perusahaan menjadi entitas hukum yang bertahan; mengubah aktivitas usaha Perusahaan saat ini; melakukan pengurangan/penurunan modal saham; melakukan penyertaan saham baru dan pembiayaan belanja modal jika melebihi batasan tertentu; serta menjual bagian signifikan dari aset utama dalam menjalankan usaha jika melebihi batasan tertentu. Perusahaan juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

16. LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

The Special Transactional Credit ("KTK") bank loan is a loan facility provided to support operational needs and finance the Company's business activities. This facility is non-revolving in accordance with the terms of the credit agreement. Collateral pledged for the KTK facility includes the Company's inventory and fixed assets, in accordance with the credit agreement with the bank.

Interest Rate

The credit facilities denominated in Rupiah bear interest at annual rates at 8.75% (2024: from 4.40% to 8.75%) for the year ended December 31, 2025.

Collateral

As of December 31, 2025 and 2024, all loan facilities obtained by Group are secured with restricted cash (Note 5), inventories (Note 8) and certain fixed assets (Note 13).

Covenants

Company

The above-mentioned credit agreements obtained by the Company requires several covenants, such as, to pledge its assets to other parties (except for the existing assets already pledged at the credit agreement date); to lend money to unaffiliated parties; to merge or consolidate with other entity unless the Company will be the surviving legal entity; to change the current course of its businesses; to reduce its share capital; making new investments and capital expenditures in excess of certain threshold; to sell or dispose off significant portion of its assets used in the operations in excess of certain threshold. The Company is also required to maintain certain financial ratios.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. PINJAMAN (lanjutan)

b. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

Kepatuhan atas Syarat-syarat Pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2025 terdapat persyaratan pinjaman-pinjaman jangka panjang Perusahaan yang tidak terpenuhi dan belum memperoleh *waiver letter*, sehingga saldo pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp71.667 direklasifikasi ke bagian lancar atas pinjaman bank jangka panjang. Sedangkan, pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman jangka panjang tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai ketentuan perjanjian kredit terkait.

c. Pinjaman jangka panjang lainnya

Merupakan pinjaman jangka panjang tanpa jaminan yang diperoleh IHT I, anak Perusahaan.

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Korea Indonesia Forestry Cooperative ("KIFC")	79.777	82.863
PT Citra Putra Kebun Asri ("CPKA")	2.244	2.244
<u>Pihak berelasi (Catatan 28)</u>		
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	8.328	10.410
Subtotal	90.349	95.517
Dikurangi bagian lancar	(2.082)	(2.082)
Bagian jangka panjang	88.267	93.435

Informasi lain yang signifikan terkait dengan pinjaman pihak ketiga sebagai berikut:

Kreditor/Creditor	Jenis fasilitas/ Type of facilities	Total fasilitas/ Total facilities	Jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga per tahun/ Annual interest rate	Jaminan/Collaterals
PT Inhutani I					
PT KIFC	Pinjaman modal kerja/Working capital loans	215.999	Oktober 2039/ October 2039	3,00%	N/A
Kementerian Keuangan Republik Indonesia/ Ministry of Finance of the Republic of Indonesia	Kredit investasi/ Investment credit	9.974	Oktober 2029/ October 2029	2,00%	N/A
PT CPKA	Pinjaman modal kerja/Working capital loans	83.350	Februari 2034/ February 2034	3,00%	N/A

16. LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

Compliance with Loan Covenants

As of December 31, 2025 there were covenants for the Company's long-term loans that were not met and had not received a *waiver letter*, so the balance of long-term bank loan amounting to Rp71,667 was reclassified to the current portion of long-term bank loans. Meanwhile, as of December 31, 2024, the Company has either complied with all of the covenants of the above-mentioned long-term loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

c. Other long-term loans

It is long-term loans without guarantee from IHT I, a subsidiary.

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
<u>Third parties</u>		
PT Korea Indonesia Forestry Cooperative ("KIFC")	79.777	82.863
PT Citra Putra Kebun Asri ("CPKA")	2.244	2.244
<u>Related party (Note 28)</u>		
Ministry of Finance of the Republic of Indonesia	8.328	10.410
Subtotal	90.349	95.517
Less current portion	(2.082)	(2.082)
Long term portion	88.267	93.435

Other significant information related to third party borrowings are as follows:

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. PINJAMAN (lanjutan)

c. Pinjaman jangka panjang lainnya (lanjutan)

PT Korea Indonesia Forestry Cooperative
("KIFC")

Pinjaman jangka panjang lainnya kepada KIFC merupakan fasilitas pinjaman IHT I untuk pembangunan, pengembangan dan pengelolaan hutan tanaman karet dan *Fast Growing Species* ("FGS") jenis akasia mangium.

IHT I dan KIFC menandatangani perjanjian pinjaman modal No. 1099/P/Banghut/2011 tanggal 27 Oktober 2011. Pinjaman tersebut digunakan untuk kerjasama atas lahan seluas 1.000 Ha dan ditetapkan selama 28 tahun. Pembayaran pinjaman dilakukan setelah proyek menghasilkan arus kas positif. Pembayaran pada tahun 2025 adalah sebesar Rp2.082 (2024: Rp3.471)

PT Citra Putra Kebun Asri ("CPKA")

Pada bulan Februari 2016, IHT I memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja sebesar Rp83.350 untuk pembangunan tanaman karet di lahan seluas 1.000 Ha di wilayah Jorong, Kalimantan Selatan. Atas pinjaman modal kerja tersebut, IHT I telah melakukan penarikan sebesar Rp2.244. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 3% per tahun, dan akan jatuh tempo pada Februari 2034.

16. LOANS (continued)

c. Other long-term loans (continued)

PT Korea Indonesia Forestry Cooperative
("KIFC")

Other long-term loans to KIFC are IHT I loan facilities for the development and management of rubber plantations and *Fast Growing Species* ("FGS") of the acacia mangium type.

IHT I and KIFC entered into loan agreement No. 1099/P/Banghut/2011 dated October 27, 2011. The loan are used for cooperation upon development areas of 1,000 Ha for 28 years. Loan payment is due when the project generates positive cash flows. The Payment in 2025 was amounting to Rp2.082 (2024: Rp3.471).

PT Citra Putra Kebun Asri ("CPKA")

In February 2016, IHT I obtained working capital loan facility of Rp83,350 for the development of a rubber plantation on an area of 1,000 Ha in the Jorong area, South Kalimantan. For the working capital loan, IHT I has withdrawn a total of Rp2,244. This loan bears interest at 3% per annum, and will be due in February 2034.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. PINJAMAN (lanjutan)

c. Pinjaman jangka panjang lainnya (lanjutan)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
("KKRI")

Kredit Investasi-1

Berdasarkan perjanjian pinjaman No.AMA-494/SLA-522/DSMI/2017 tanggal 25 Januari 2017, IHT I (Eks IHT II), mendapatkan penerusan pinjaman luar negeri tanpa jaminan dari KKRI yang digunakan untuk melakukan pembangunan hutan tanaman industri. Pinjaman pokok yang diberikan adalah sebesar Rp9.974 dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada tanggal 15 Oktober 2028. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 2% per tahun.

Pada tanggal 29 Maret 2021, IHT I mengajukan permohonan restrukturisasi pinjaman kepada KKRI untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo pinjaman. Pada tanggal 13 Desember 2024 KKRI menyetujui permohonan restrukturisasi dan memperpanjang tanggal jatuh tempo pinjaman sampai dengan Oktober 2029 melalui amandemen No.AMA-513/SLA-1307/DSMI/2027 dengan pembayaran pertama sebesar 25% dari kewajiban pokok dan non-pokok pada bulan Desember 2024.

Pada tahun 2025, IHT I melakukan pembayaran pokok dan tunggakan bunga sebesar Rp1.750 sehingga saldo pinjaman kredit investasi menjadi sebesar Rp6.998 (2024: Rp8.748) termasuk tunggakan bunga sebesar Rp1.014 (2024: Rp1.267).

16. LOANS (continued)

c. Other long-term loans (continued)

Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
("KKRI")

Investment Credit-1

Based on loan agreement No.AMA-494/SLA-522/DSMI/2017 dated January 25, 2017, IHT I (Former IHT II), received an unsecured foreign loan from the KKRI which was used to develop industrial forest plantations. The principal loan amounting to Rp9,974 with a payment due date of October 15, 2028. The loan bears interest of 2% per annum.

On March 29, 2021, IHT I submitted a loan restructuring application to the KKRI to extend the loan maturity date. On December 13, 2024, KKRI approved the restructuring application and extended the loan maturity date to October 2029 through amendment No. AMA-513/SLA-1307/DSMI/2027 with the first payment of 25% of the principal and non-principal obligations in December 2024.

In 2025, IHT I made principal payments and interest arrears of Rp1,750 so that the investment credit loan balance became Rp6,998 (2024: Rp8,748) including interest arrears of Rp1,014 (2024: Rp1,267).

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. PINJAMAN (lanjutan)

c. Pinjaman jangka panjang lainnya (lanjutan)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
("KKRI") (lanjutan)

Kredit Investasi-2

Berdasarkan perjanjian pinjaman No.AMA-495/SLA-523/DSMI/2017 tanggal 25 Januari 2017, IHT I (Eks IHT III), mendapatkan penerusan pinjaman luar negeri tanpa jaminan dari KKRI yang digunakan untuk melakukan pembangunan hutan tanaman industri di wilayah Banjarbaru dan Nanga Pinoh. Pinjaman pokok yang diberikan adalah sebesar Rp2.100 dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada tanggal 15 Oktober 2023. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 2% per tahun.

Pada tanggal 27 Januari 2022, IHT I mengajukan permohonan restrukturisasi pinjaman kepada KKRI untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo pinjaman. Pada tanggal 13 Desember 2024 KKRI menyetujui permohonan restrukturisasi dan memperpanjang tanggal jatuh tempo pinjaman sampai dengan Oktober 2029 melalui amandemen No.AMA-514/SLA-1308/DSMI/2024 dengan pembayaran pertama sebesar 25% dari kewajiban pokok dan non-pokok pada bulan Desember 2024.

Pada tahun 2025, IHT I melakukan pembayaran pokok dan bunga sebesar Rp332 sehingga saldo pinjaman kredit investasi menjadi sebesar Rp1.330 (2024: Rp1.662) termasuk tunggakan bunga sebesar Rp70 (2024: Rp.88).

16. LOANS (continued)

c. Other long-term loans (continued)

Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
("KKRI") (continued)

Investment Credit-2.

Based on loan agreement No.AMA-495/SLA-523/DSMI/2017 dated January 25, 2017, IHT I (Former IHT III), received an unsecured foreign loan from the KKRI which was used to develop industrial plantation forests in the Banjarbaru and Nanga Pinoh areas. The principal loan provided was Rp2,100 with a payment due date of October 15, 2023. The loan bears interest of 2% per year.

On January 27, 2022, IHT I submitted a loan restructuring application to the Indonesian Financial Institutions Authority (KKRI) to extend the loan maturity date. On December 13, 2024, KKRI approved the restructuring application and extended the loan maturity date to October 2029 through amendment No. AMA-514/SLA-1308/DSMI/2024 with the first payment of 25% of the principal and non-principal obligations in December 2024.

In 2025, IHT I made principal payments interest amounting to Rp332 so that the investment credit loan balance became Rp1,330 (2024: Rp1,662) including accrued interest amounting to Rp70 (2024: Rp88).

17. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Dana reboisasi	67.036
Liabilitas kontrak	39.775
Liabilitas lancar lainnya	68.295
Total	175.106

- Dana reboisasi merupakan utang penyaluran dana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri ("HTI") yang disalurkan ke PT Inhutani V ("IHT V") berdasarkan surat Panitia Urusan Piutang Negara No. PJPNC-09.PUPNC.10.04/2012 tanggal 9 Maret 2012.

17. OTHER SHORT-TERM LIABILITIES

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	67.627	Reforestation fund
	58.886	Contract liabilities
	61.798	Other short-term liabilities
Total	188.311	Total

- Reforestation fund is a distribution of funds from the Ministry of Environment and Forestry for construction of Hutan Tanaman Industri ("HTI") to PT Inhutani V ("IHT V") according to decision letter State Receivables Administration Committee No. PJPNC-09.PUPNC.10.04/2012 dated March 9, 2012.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**17. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA
(lanjutan)**

- Liabilitas kontrak merupakan uang muka penjualan kayu dan hasil hutan bukan kayu kepada pihak ketiga.
- Liabilitas lancar lainnya terutama merupakan pendapatan diterima dimuka terkait uang muka kerjasama.

17. OTHER SHORT-TERM LIABILITIES (continued)

- Contract liabilities represents an advance sale of wood and non wood forest products to third parties.
- Other current liabilities mainly represent unearned income related to advances for cooperation.

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Dana pensiun	354.012
Imbalan kerja jangka panjang	1.241.228
Total	1.595.240
Dikurangi bagian lancar	(204.481)
Bagian jangka panjang	1.390.759

Imbalan Paska Kerja

Imbalan paska kerja Grup didanai melalui Dana Pensiun Perhutani ("DPPHT") untuk karyawan yang masuk terakhir tahun 2008, dan Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") untuk karyawan yang masuk sejak tahun 2009.

Selain mempunyai program pensiun iuran pasti untuk karyawan yang memenuhi syarat, Grup juga mencatat penyisihan imbalan kerja untuk memenuhi imbalan minimum yang diwajibkan untuk dibayar kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan UU Cipta Kerja ("UUCK").

Manajemen berkeyakinan bahwa saldo liabilitas imbalan kerja tersebut cukup untuk memenuhi imbalan minimum sesuai dengan UUCK.

Dana Pensiun Perhutani ("DPPHT").

DPPHT diperuntukkan bagi karyawan tetap yang berstatus pegawai tetap (Program Pensiun Manfaat Pasti) berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani sebagai pendiri dana pensiun Perum Perhutani No. 446/Kpts/Dir/2011 tentang peraturan dana pensiun Perum Perhutani tanggal 9 Juli 2011, untuk pegawai aktif hingga 1 Januari 2009. Kontribusi pemberi kerja dan karyawan masing-masing sebesar 15,85% dan 5,00% dari PhDP.

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	512.987	Pension fund
	1.122.471	Long term employee benefits
Total	1.635.458	Total
Dikurangi bagian lancar	(197.876)	Less current portion
Bagian jangka panjang	1.437.582	Long term portion

Post-employment benefits

The Group post-employment benefits are funded through Dana Pensiun Perhutani ("DPPHT") for employees who joined up to 2008 and Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") for employees who joined since 2009.

On top of the benefits provided under the above-mentioned defined contributions retirement plans, the Group has also made additional provisions for employee service entitlements in order to meet the minimum benefits required to be paid to qualified employees, as stipulated under the Cipta Kerja Law ("UUCK").

The management believes the balance of employee benefits liability is sufficient to cover the minimum benefits required under the UUCK.

Perhutani Fund Perhutani ("DPPHT").

DPPHT is intended for permanent employees with the status of permanent employees (Defined Benefit Pension Plan) based on the decision of the Directors of Perum Perhutani as pension as founder of pension fund Perum Perhutani No. 446/Kpts/Dir/2011 regarding the regulation of pension funds Perum Perhutani dated July 9, 2011, for those active employees until January 1, 2009. Employer and employee contribution are 15.85% and 5.00% from PhDP, respectively.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan Paska Kerja (lanjutan)

a. Dana Pensiun

Nilai wajar aset dan liabilitas manfaat pensiun Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 didasarkan pada penilaian aktuaris independen KKA Azwir Arifin & Rekan dalam laporannya masing-masing tanggal 17 April 2026 dan 4 April 2025, menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

	2025	2024
Tingkat diskonto	4,81% - 7,06%	6.88% - 7.13%
Tingkat kenaikan PhDP	2,50%	
Usia pensiun normal	56 tahun/years	
Tingkat cacat	0,05% dari mortalitas/from mortality	
Tingkat mortalitas	GAM (1971)	
Tingkat Pengunduran diri	0,1% per tahun pada usia 18-45 tahun/ 0.1% per year at 18-45 Yo	
	0,5% per tahun pada usia 46-55 tahun 0.5% per year at 46-55 Yo	

Discount rate
PhDP increase rate
Normal pension age
Disability rate
Mortality rate
Turnover rate

Rincian beban imbalan kerja

Details of employee benefits expense

	2025	2024
Biaya bunga	101.720	100.639
Beban jasa kini	11.001	13.292
Total	112.721	113.931

Interest Expense
Current service cost

Total

Rincian liabilitas imbalan kerja

The details of employee benefits liability

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Nilai kini liabilitas	1.484.121	1.487.845
Nilai wajar dari aset program	(1.130.109)	(974.858)
Total	354.012	512.987

Present value of liability
Fair value of plan assets

Total

Mutasi liabilitas imbalan kerja

Movements of employee benefits liability

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Saldo awal	1.487.845	1.509.107
Beban imbalan kerja yang diakui pada tahun berjalan	112.721	113.931
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	10.143	(18.004)
Pembayaran manfaat	(126.588)	(117.189)
Total	1.484.121	1.487.845

Beginning balance
Employee benefit expenses
recognized in current year
Remeasurement of
employee benefits liability
Payment of the benefits

Total

Beban imbalan kerja karyawan dibebankan ke beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi.

The provision for employee benefits are charged to cost of revenue and general and administrative expense.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

a. Dana Pensiun (lanjutan)

a. Pension Fund (continued)

Mutasi nilai wajar dari aset program

Movements of fair value from asset program

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Saldo awal	974.858	926.785	Beginning balance
Iuran yang dibayarkan	63.042	93.908	Contribution paid
Pendapatan bunga	64.904	58.294	Interest income
Imbal hasil	153.893	13.060	Investment return
Pembayaran manfaat	(126.588)	(117.189)	Payment of the benefits
Total	1.130.109	974.858	Total

Program Pensiun yang dikelola oleh DPPHT adalah Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Besarnya Manfaat Pensiun sudah pasti dan sudah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) dengan formula tertentu. Pengembangan aset program dilakukan dalam rangka meningkatkan kekayaan pendanaan DPPHT. Surplus atau defisit pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemberi kerja.

The Pension Program managed by the DPPHT is the Defined Benefit Pension Program (PPMP). The amount of the Pension Benefits is certain and has been stipulated in the Pension Fund Regulation (PDP) with a certain formula. The development of program assets is carried out in order to increase the wealth of DPPHT funding. Surplus or deficit funding is fully the responsibility of the employer.

Persentase penempatan aset program gabungan tersebut adalah sebagai berikut:

The percentage of placement of the combined plan assets is as follows:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Surat Berharga Negara	26,26%	21,26%	State Securities
Obligasi	19,76%	33,46%	Bonds
Deposito	17,55%	11,34%	Deposits
Saham	17,25%	15,66%	Shares
Sukuk	10,05%	-	Financial certificates
Reksa dana	7,03%	2,84%	Mutual fund
Tanah dan bangunan	2,10%	2,27%	Land and buildings
Sekuritas Bank Indonesia	-	13,17%	Bank Indonesia Securities
Total	100,00%	100,00%	Total

b. Imbalan kerja jangka panjang dan lainnya

b. Other long-term employee benefits liability

Grup memberikan imbalan kerja lain meliputi program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), kompensasi masa kerja, masa persiapan pensiun, serta uang duka dan penguburan.

The Group provides other employee benefits include Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"), compensation for work period, retirement preparation period, as well as funeral and burial allowances.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

**b. Imbalan kerja jangka panjang dan lainnya
(lanjutan)**

DPLK adalah kepesertaan pegawai pada program pensiun DPLK diperuntukkan bagi pegawai yang diangkat mulai 1 Januari 2009 berdasarkan SK Direksi No. 482/Kpts/Dir/2010 tentang tunjangan iuran DPLK khusus pegawai Perusahaan yang diangkat mulai 1 Januari 2009. Seluruh iuran DPLK ditanggung oleh Perusahaan.

Beban imbalan kerja karyawan dibebankan ke beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi.

Liabilitas imbalan kerja Grup pada tanggal 31 Desember 2025 didasarkan pada penilaian aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Arifin & Rekan dalam laporannya tanggal 17 April 2026, dan pada tanggal 31 Desember 2024 didasarkan pada penilaian aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Azwir Arifin & Rekan dan KKA Nurichwan dalam laporannya pada tanggal 4 April 2025, menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

	2025	2024	
Tingkat diskonto	4,81% - 7,06%	6.37% - 7.14%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji pokok rata-rata		2,50%	Average salary increase rate
Probabilitas pengambilan MPP		2,00%	Probability of take
Sisa rata-rata masa kerja		8 tahun/years	retirement preparation period
Usia pensiun normal		56 tahun/years	Average remaining years of services
Tingkat cacat		0,05% dari mortalitas/ mortality	Normal pension age
Tingkat pengunduran diri	5,00% di usia 20 tahun dan menurun linier sampai dengan usia pensiun normal/ 5.00% at age 20 years and declining linearly until normal retirement age		Disability rate
	GAM (1971) and TMI IV (2019)		Turnover rate
Tingkat mortalitas			Mortality rate

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

**b. Other long-term employee benefits liability
(continued)**

DPLK is employee participation in the Pension Fund program which is intended for employees who were appointed from January 1, 2009 and based on Board of Directors Decree No. 482/Kpts/Dir/2010 on contribution allowances dues for DPLK of the Company specific for employees who were appointed from January 1, 2009. All DPLK contributions are borne by the Company.

The provision for employee benefits are charged to cost of revenue and general and administrative expense.

Employee benefits liability of the Group as of December 31, 2025 based on the valuation of an independent actuary, KKA Azwir Arifin & Rekan and KKA Nurichwan, as presented in its report on April 17, 2026, and as of December 31, 2024 based on the valuation of an independent actuary, Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Azwir Arifin & Rekan dan KKA Nurichwan as presented in its report on April 4, 2025, using the "Projected Unit Credit" method with main assumption as follows:

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

**b. Imbalan kerja jangka panjang lainnya
(lanjutan)**

**b. Other long-term employee benefits liability
(continued)**

Rincian beban imbalan kerja

The details of employee benefit expenses

	2025	2024	
Biaya bunga	70.671	71.222	Interest expense
Beban jasa kini	41.770	46.086	Current service cost
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	373	2.240	Remeasurement of employee benefits liability
Total	112.814	119.548	Total

Mutasi liabilitas imbalan kerja

Movements of employee benefits liability

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Saldo awal	1.122.471	1.195.992	Beginning balance
Beban imbalan kerja yang diakui pada tahun berjalan	112.814	119.548	Employee benefit expense recognized in current year
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	243.201	(9.601)	Remeasurement of employee benefits liability
Pembayaran imbalan	(237.258)	(183.468)	Benefit payments
Saldo akhir tahun	1.241.228	1.122.471	Ending balance

Analisa sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Sensitivity analysis of the key assumptions used in determining employee benefits liability is as follows:

Asumsi utama	Persentase kenaikan/ (penurunan)/ Percentage increase/ (decrease)	Nilai kewajiban kini/ Present value of liability	Key assumptions
Tingkat diskonto tahunan	1%/ (1%)	(2.532.559)/ 2.898.044	Annual discount rate
Tingkat kenaikan gaji tahunan	1%/ (1%)	2.781.957/ (2.630.438)	Annual salary increase rate

Analisa sensitivitas di atas dihitung menggunakan metode ekstrapolasi atas pengaruh terhadap kewajiban imbalan kerja sebagai hasil dari perubahan yang beralasan atas asumsi utama yang mungkin terjadi pada tanggal pelaporan.

The sensitivity analysis above is calculated based on a method that extrapolates the impact on employee benefits liability as a result of reasonable changes in key assumptions occurring at the reporting date.

Jadwal jatuh tempo dari liabilitas imbalan kerja yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Maturity schedule for undiscounted employee benefits liability are as follows:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Dalam 12 bulan mendatang	204.481	197.876	In 12 months
Antara 1 sampai 5 tahun	1.185.987	1.133.534	Between 1 to 5 years
Di atas 5 tahun	1.766.451	1.303.272	Over 5 years
Total	3.156.919	2.634.682	Total

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. MODAL NEGARA

19. STATE CAPITAL

2025 dan/and 2024

Pemilik modal	Modal Negara/ State Capital	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Total/Total	Capital owner
Pemerintah Republik Indonesia	2.586.303	100%	2.586.303	The Government of Indonesia

Berdasarkan surat persetujuan S-390/MBU/06/2025, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sepakat menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp304.263 sebagai cadangan umum.

Based on the approval letter S-390/MBU/06/2025, the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN), determined the use of the Company's net profit for the 2024 financial year of Rp304,263 as general reserves.

Berdasarkan surat persetujuan S-359/MBU/07/2024, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sepakat menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp501.926 sebagai dividen dan cadangan umum masing-masing sebesar Rp27.706 dan Rp474.220.

Based on the approval letter S-359/MBU/07/2024, the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN), determined the use of the Company's net profit for the 2023 financial year of Rp501,926 as dividends and general reserves of Rp27,706 and Rp474,220, respectively.

Berdasarkan PP No. 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perhutani dinyatakan bahwa modal Perusahaan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham.

Based on PP No. 30 of 2003 relating to Perusahaan Umum (Perum) Perhutani it is stated that the Company's share capital represents the state's wealth, which was separated from the State Budget of Income and Expenditure and not divided by shares.

Nilai kekayaan negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan. Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2010 ditetapkan besarnya modal Perusahaan adalah sebesar seluruh nilai penyertaan modal negara dalam Perusahaan dengan jumlah sebesar Rp700.000. Selanjutnya, Keputusan Menteri Keuangan No. 619/KMK.06/2015 tanggal 25 Mei 2015, menetapkan nilai penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam modal Perusahaan sebesar Rp1.886.303. Sehingga, penyertaan modal negara menjadi sebesar Rp2.586.303.

The wealth of the state was determined by the Minister of Finance based on calculations performed by the Ministry of Finance and the Ministry of Forestry. Based on the PP No. 72 of 2010 it was set the amount of capital the Company is equal to the entire value of its investment in the Company amounting to Rp700,000. Furthermore, the Decree of the Minister of Finance No. 619/KMK.06/2015 dated May 25, 2015 determined that the definitive value of additional capital investment in relation to the process of establishment of the forestry holding Company referred above amounting to Rp1,886,303. Therefore, National Capital Participation becomes Rp2,586,303.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. MODAL NEGARA (lanjutan)

Cadangan tujuan khusus

Pada tanggal 10 April 2014, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sesuai dengan Surat No.S-241/MBU/2014, menetapkan cadangan tujuan khusus sebesar Rp205.472. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2014, Dewan Pengawas, menyetujui cadangan sebagaimana yang tertuang dalam usulan Rancangan Penggunaan Dana Cadangan Rencana Operasi sesuai dengan surat No.66/023.4/Keu/Dwas/2014, dengan jumlah sebesar Rp202.790, yang akan digunakan untuk tiga program khusus, *golden shakehand*, sertifikasi tanah Perusahaan dan percepatan reboisasi. Selisih antara cadangan tujuan khusus yang ditetapkan oleh Menteri BUMN dan yang disetujui oleh Dewan Pengawas sebesar Rp2.686 dicatat pada Cadangan Umum.

Realisasi penggunaan cadangan khusus, sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah program reboisasi tanaman sebesar Rp48.936, sertifikasi tanah sebesar Rp112 dan *golden shakehand* sebesar Rp50.597. Pada tahun 2024, realisasi kegiatan implementasi Kebijakan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), pengelolaan hutan, dan sertifikasi sebesar Rp93.451. Cadangan tujuan khusus pada tahun 2025 and 2024 adalah sebesar Rp9.694.

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pada tanggal 1 Oktober 2014, SK Menteri Keuangan No. 469/KMK.06/2014, menetapkan nilai penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam modal Perusahaan sebesar Rp1.182.448. Nilai ini merupakan nilai sementara yang berasal dari pengalihan seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (PT Inhutani I) (Persero), PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) (Persero), PT Eksploitasi dan Industri Hutan III (PT Inhutani III) (Persero), PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV (PT Inhutani IV) (Persero), dan PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V) (Persero) dalam rangka pembentukan induk perusahaan kehutanan.

19. STATE CAPITAL (continued)

Special purpose reserves

On April 10, 2014, the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN), in accordance with Letter No. S-241/MBU/2014, stipulates a special purpose reserves of Rp205,472. Subsequently on August 11, 2014, the Supervisory Board, approved a reserve as stated in the proposed Operational Plan for the Use of Reserve Funds in accordance with letter No. 66/023.4/Keu/Dwas/2014, with an amount of Rp202,790, which will be used for three special programs, *golden shakehand*, the Company land certification and accelerated reforestation. The difference between the special purpose reserves determined by the Minister of BUMN and that approved by the Supervisory Board of Rp2,686 is recorded in the General Reserve.

Realization of special purpose reserves through 2023 are reforestation program amounting to Rp48,936, land certification amounting to Rp112 and *golden shakehand* amounting to Rp50,597. In 2024, realization program of implementation of the Forest Area Policy with Special Management (KHDPK), forest management, and certification activities amounting to Rp93,451. Special purpose reserves as of December 31, 2025 and 2024, amounted to Rp9,694 each.

20. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

On October 1, 2014, Decree No. 469/KMK.06/2014, Minister of Finance stipulated the value of the Additional Capital Investment into the Company amounting to Rp1,182,448. The additional capital is recognised as temporary value of capital from Republic Indonesia in PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (PT Inhutani I) (Persero), PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) (Persero), PT Eksploitasi dan Industri Hutan III (PT Inhutani III) (Persero), PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV (PT Inhutani IV) (Persero), and PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V) (Persero) for the purpose of establishing a forestry holding company.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Selanjutnya, Keputusan Menteri Keuangan No. 619/KMK.06/2015 tanggal 25 Mei 2015 menetapkan bahwa nilai tetap penambahan modal negara sehubungan dengan proses pembentukan induk perusahaan kehutanan di atas menjadi sebesar Rp1.886.303. Dengan adanya penambahan nilai setoran modal negara ini menyebabkan tambahan nilai investasi sebesar Rp703.855 dan tambahan modal disetor yang dihasilkan dari kombinasi bisnis entitas pengendali ini adalah sebesar Rp1.334.148. Rinciannya sebagai berikut:

	Modal Negara/ State Capital	Aset Neto/ Net Assets	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid in Capital	
PT Inhutani I	1.211.262	205.935	1.005.327	Inhutani I
PT Inhutani II	225.707	111.112	114.595	Inhutani II
PT Inhutani III	308.509	54.667	253.842	Inhutani III
PT Inhutani IV	64.920	61.758	3.162	Inhutani IV
PT Inhutani V	75.905	118.683	(42.778)	Inhutani V
Total	1.886.303	552.155	1.334.148	Total

Selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus 2022, PT Inhutani II dan PT Inhutani III telah efektif bergabung ke PT Inhutani I, dan PT Inhutani IV telah efektif bergabung ke PT Inhutani V Catatan (1c), sehingga komposisi tambahan modal disetor menjadi sebagai berikut:

	Modal Negara/ State Capital	Aset Neto/ Net Assets	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	
PT Inhutani I	1.745.478	371.714	1.373.764	PT Inhutani I
PT Inhutani V	140.825	180.441	(39.616)	PT Inhutani V
Total	1.886.303	552.155	1.334.148	Total

Karena transaksi diatas merupakan antara entitas sepengendali dan tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka transaksi ini dicatat dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 338, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dimana, selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor.

20. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Furthermore, the Decree of the Minister of Finance No. 619/KMK.06/2015 dated May 25, 2015 determined that the definitive value of additional capital investment in relation to the process of establishment of the forestry holding company referred above amounting to Rp1,886,303. With the additional capital investment resulted in the increase of additional investment value of Rp703,855, and total additional paid-in capital resulted from business combination under common control amounting to Rp1,334,148. The details are as follows:

Furthermore, on August 1 2022, PT Inhutani II and PT Inhutani III have effectively merged into PT Inhutani I, and PT Inhutani IV have effectively merged into PT Inhutani V (Note 1c), therefore the composition of the additional paid-in capital is as follows:

Since the above transaction are between entities under common control and does not result in change in the economic substance of the ownership of assets, liabilities, ownership transfer shares or other instrument of ownership which are exchanged, then this transaction is recorded by implementing Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 338, "Business Combination Under Common Control". The difference between the transfer value and the carrying value of the net assets, are recorded as the difference in value from the combined business transaction of entities under common control as part of the additional paid-in capital account.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham, yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 21 dan 23 tanggal 26 November 2024 oleh Dr. Dewi Tenty Septi Artiany S.H., M.H., M.Kn, PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (IHT I) dan PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (IHT V), menyetujui pengalihan saham (hibah saham) dari atas nama Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara kepada Negara Republik Indonesia sebanyak 1 lembar saham Seri A yang dimiliki Perum Kehutanan Negara pada IHT I dan IHT V atau sebesar masing-masing Rp1.000.000 (angka penuh). Selanjutnya, berdasarkan akta Hibah Saham, yang dituangkan dalam akta No. 22 dan 24, tanggal, 26 November 2024 oleh Dr. Dewi Tenty Septi Artiany S.H., M.H., M.Kn, Kementerian Badan Usaha Milik Negara mewakili Negara Republik Indonesia telah menerima hibah saham tersebut. Perusahaan mencatat hibah ini sebagai bagian tambahan modal disetor. Sehingga tambahan modal disetor Perusahaan pada tahun 2024 menjadi Rp1.334.150.

	2025	2024
PT Inhutani I	1.373.764	1.373.764
PT Inhutani V	(39.616)	(39.616)
Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2	2
Total	1.334.150	1.334.150

20. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Based on the Shareholders' Decision, as stated in Notarial Deed No. 21 and 23 dated November 26, 2024 by Dr. Dewi Tenty Septi Artiany S.H., M.H., M.Kn, PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (IHT I) and PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (IHT V), approved the transfer of shares (share grant) from the name of Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara to the Republic of Indonesia in the amount of 1 series A share owned by the Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara in IHT I and IHT V or Rp1,000,000, respectively, (full amount). Furthermore, based on the Share Grant deed, which is stated in deed No.22 and 24 dated November 26, 2024, by Dr. Dewi Tenty Septi Artiany S.H., M.H., M.Kn, the Ministry of State-Owned Enterprises representing the Republic of Indonesia has received the share grant. The Company recorded the grant as part of additional paid in capital. Thus, the additional paid in capital of the Company in 2024 becomes Rp1,334,150.

PT Inhutani I
PT Inhutani V
The Ministry of State-Owned
Enterprises
Total

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PENDAPATAN

a. Rincian pendapatan berdasarkan komoditi adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Kayu		
Pihak ketiga		
Kayu gelondongan	1.766.127	2.012.615
Kayu olahan	105.436	106.864
Pihak berelasi (Catatan 28)		
Kayu gelondongan	26.648	29.999
Subtotal kayu	1.898.211	2.149.478
Non-kayu		
Pihak ketiga		
Gondorukem dan terpentin	1.592.698	1.649.455
Getah pinus	10.877	84.551
Turunan dari gondorukem dan terpentin ^{*)}	80.306	27.937
Lainnya	28.553	15.894
Pihak berelasi (Catatan 28)		
Lainnya	426	-
Subtotal non-kayu	1.712.860	1.777.837
Lainnya		
Pihak berelasi (Catatan 28)		
Wisata dan agribisnis	85.518	52.059
Jasa rehabilitasi	2.536	6.152
Pihak ketiga		
Wisata dan agribisnis	512.706	568.270
Trading	1.244	527
Jasa rehabilitasi	1.769	3.681
Subtotal lainnya	603.773	630.689
Total	4.214.844	4.558.004

*) Turunan dari gondorukem dan terpentin merupakan alpha pinene, cineol, delta carene, pine oil 40% dan gondorukem hitam.

b. Rincian pendapatan menurut daerah geografis adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Dalam negeri	2.645.300	2.875.958
Luar negeri	1.569.544	1.682.046
Total	4.214.844	4.558.004

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat pendapatan dari pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan.

21. REVENUE

a. The details of revenue based on commodity are as follows:

Wood
Third party
Logs
Processed wood
Related parties (Note 28)
Logs
Subtotal wood
Non-wood
Third party
Gum rosin and turpentine
Pine sap
Derivatives of Gum rosin and turpentine ^{*)}
Others
Related parties (Note 28)
Others
Subtotal non-wood
Others
Related parties (Note 28)
Tourism and agribusiness
Rehabilitation service
Third party
Tourism and agribusiness
Trading
Rehabilitation service
Subtotal others
Total

*) Derivatives of gum rosin and turpentine are alpha pinene, cineol, delta carene, pine oil 40% and black gum rosin.

b. The details of revenue based on geographical areas are as follows:

Domestic
Overseas

Total

As of December 31, 2025 and 2024, there is no revenue from customers that exceeds 10% of the total revenue.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

22. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Biaya eksploitasi	1.197.978	1.376.234
Gaji dan kesejahteraan karyawan	1.157.098	1.284.413
Perubahan nilai wajar aset biologis	525.699	669.793
Penggunaan bahan baku dan bahan pembantu	199.081	211.643
Beban penyusutan (Catatan 13)	97.286	72.732
Biaya pemeliharaan	13.580	12.152
Subtotal	3.190.722	3.626.967
Barang jadi (Catatan 8):		
Persediaan awal	478.301	559.836
Persediaan akhir	(336.907)	(478.301)
Beban pokok produksi	3.332.116	3.708.502
Beban agrowisata	114.865	109.044
Lain-lain	34.867	42.906
Total	3.481.848	3.860.452

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat pembelian dari pemasok yang melebihi 10% dari total pendapatan.

22. COST OF REVENUE

The details of cost of revenue are as follows:

Exploitation expenses
Salary and employee benefits
Changes in fair value of biological assets
Raw materials and supporting material used
Depreciation expense (Note 13)
Maintenance expenses
Subtotal
Finished goods (Note 8):
Beginning of the year
End of the year
Cost of production
Agrotourism expenses
Others
Total

As of December 31, 2025 and 2024, there is no purchase from suppliers that exceeds 10% of the total revenue.

23. BEBAN PEMASARAN DAN DISTRIBUSI

	2025	2024
Beban penjualan	34.001	30.336
Beban komisi agen (Catatan 29e)	26.910	30.078
Beban lain-lain	9.703	12.711
Total	70.614	73.125

23. SELLING AND DISTRIBUTION EXPENSES

Selling expenses
Agent commission fees (Note 29e)
Other expenses
Total

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2025	2024
Beban pegawai	886.289	733.148
Beban kantor	85.819	112.986
Beban penyusutan (Catatan 13)	89.374	75.881
Beban amortisasi aset hak guna (Catatan 12)	25.201	21.610
Beban pemeliharaan	22.633	17.241
Beban lain-lain	58.930	65.403
Total	1.168.246	1.026.269

24. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Employee expenses
Office expenses
Depreciation expenses (Note 13)
Amortization expense of right-of-use assets (Note 12)
Maintenance expenses
Other expenses
Total

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

25. PENDAPATAN OPERASI LAIN

	2025	2024
Penerimaan ganti rugi	72.965	47.781
Pendapatan selisih kurs	10.083	5.109
Pemulihan nilai aset keuangan dan persediaan	3.752	12.913
Pendapatan tata kelola	1.003	1.040
Pendapatan lain-lain	86.738	97.962
Total	174.541	164.805

Penerimaan ganti rugi merupakan penggantian atas tanaman dan investasi lainnya dalam kawasan hutan yang akan digunakan untuk kepentingan umum.

25. OTHER OPERATING INCOME

Compensation income
Gain from foreign exchange
Recoverable amount of financial
assets and inventories
Revenue from managing services
Others

Total

Compensation income represents compensation for plantation and other investment in forest areas, which will be used in public interest.

26. BEBAN OPERASI LAIN

	2025	2024
Beban denda pajak	22.342	13.981
Penurunan nilai piutang dan aset keuangan	18.406	12.493
Penurunan nilai persediaan	5.008	32.114
Beban lain-lain	75.793	42.866
Total	121.549	101.454

Tax penalty
Impairment of accounts receivable
and financial assets
Impairment of inventories
Others

Total

26. OTHER OPERATING EXPENSES

27. BEBAN KEUANGAN

	2025	2024
Beban bunga (Catatan 28)	83.075	69.191
Biaya administrasi bank	5.635	2.538
Total	88.710	71.729
Dikurangi kapitalisasi biaya pinjaman ke tanaman belum menghasilkan	(18.319)	-
Total	70.391	71.729

Interest expenses (Note 28)
Bank administration fees

Total

Less capitalization from borrowing cost
to immature plantations

Total

27. FINANCE COSTS

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**28. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN
DENGAN PIHAK BERELASI**

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Rincian transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

**28. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES
WITH RELATED PARTIES**

The Group entered into transactions with related parties. The details of significant transactions and outstanding balances with related parties are as follows:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Kas dan setara kas (Catatan 4)			Cash and cash equivalents (Note 4)
<u>Kas pada bank</u>			<u>Cash in banks</u>
Entitas berelasi dengan Pemerintah	196.943	221.880	Government related entities
<u>Deposito berjangka</u>			<u>Time deposits</u>
Entitas berelasi dengan Pemerintah	81.127	38.690	Government related entities
	278.070	260.570	
Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo kas dan setara kas yang ditempatkan pada entitas berelasi dengan Pemerintah masing-masing sebesar 98,49% dan 98,78% dari total kas dan setara kas konsolidasian.			
As of December 31, 2025 and 2024, cash and cash equivalents balances placed on entities related to the Government represent 98.49% and 98.78% of the total consolidated cash and cash equivalents, respectively.			
Kas yang dibatasi penggunaannya (Catatan 5)			Restricted cash (Note 5)
<u>Kas pada bank</u>			<u>Cash in banks</u>
Entitas berelasi dengan Pemerintah	82.196	65.957	Government related entities
<u>Deposito berjangka</u>			<u>Time deposits</u>
Entitas berelasi dengan Pemerintah	125.758	108.223	Government related entities
	207.954	174.180	
Piutang usaha (Catatan 6)			Trade receivables (Note 6)
PT HK Realtindo	12.206	-	PT HK Realtindo
PT IDEC Abadi Wood Industries	8.874	6.731	PT IDEC Abadi Wood Industries
PG Tersana Baru	6.296	-	PG Tersana Baru
PT Finnet Indonesia	4.227	5.179	PT Finnet Indonesia
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara	4.204	4.879	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara
PT Timah (Persero) Tbk	1.988	1.127	PT Timah (Persero) Tbk
Lainnya	9.261	8.357	Others
	47.056	26.273	
Penyisihan penurunan nilai	11.788	7.087	Provision for impairment
	35.268	19.186	
Aset keuangan tidak lancar lainnya (Catatan 7b)			Other non current financial assets (Note 7b)
<u>Kas pada bank</u>			<u>Cash in banks</u>
Entitas berelasi dengan Pemerintah	8.565	25.537	Government related entities
<u>Deposito berjangka</u>			<u>Time deposits</u>
Entitas berelasi dengan Pemerintah	1.514	2.449	Government related entities
	10.079	27.986	

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**28. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN
DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Rincian transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**28. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES
WITH RELATED PARTIES (continued)**

The Group entered into transactions with related parties. The details of significant transactions and outstanding balances with related parties are as follows: (continued)

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Utang usaha (Catatan 14)		
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	27.559	25.740
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.811	-
PT Mandiri Utama Finance	2.001	5.360
PT Pertamina Niaga	-	1.754
PT Petrosida Gresik	-	11.263
Lainnya	2.739	12.213
	35.110	56.330
Pinjaman (Catatan 16)		
Pinjaman bank jangka pendek (Catatan 16a)		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	223.165	222.486
PT Bank Raya Indonesia Tbk	200.000	200.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	172.926	231.572
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	141.531	54.540
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	53.736	-
	791.358	708.598
Pinjaman bank jangka panjang (Catatan 16b)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	95.001	158.334
PT Bank Raya Indonesia Tbk	60.000	80.000
	155.001	238.334
Pinjaman jangka panjang lainnya (Catatan 16c)		
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	8.328	10.410

Trade Payable (Note 14)
PT Telekomunikasi Indonesia
(Persero) Tbk
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
PT Mandiri Utama Finance
PT Pertamina Niaga
PT Petrosida Gresik
Others

Loans (Note 16)
Short-term bank loans (Note 16a)
PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk
PT Bank Raya Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia

Long-term bank loans (Note 16b)
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Raya Indonesia Tbk

Other long-term loans (Note 16c)
Ministry of Finance of the Republic
Indonesia

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**28. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN
DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Rincian transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**28. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES
WITH RELATED PARTIES (continued)**

The Group entered into transactions with related parties. The details of significant transactions and outstanding balances with related parties are as follows: (continued)

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Pendapatan (Catatan 21)		
PT PG Rajawali I	37.272	24.964
PT IDEC Abadi Wood Industries	26.648	29.999
PT PG Rajawali II	15.379	6.315
PT HK Realtindo	7.020	-
Pemerintah Kabupaten Trenggalek	5.482	6.976
PT Perkebunan Nusantara I	5.345	2.372
Badan Usaha Milik Desa Jawa Timur	3.452	576
PT Pertamina EP	2.609	2.496
Pemerintah Kabupaten Kediri	2.461	1.254
Perum Jasa Tirta I	1.872	1.848
PT Timah (Persero) Tbk	1.623	744
Lainnya	5.965	10.666
	115.128	88.210

Revenue (Note 21)
PT PG Rajawali I
PT IDEC Abadi Wood Industries
PT PG Rajawali II
PT HK Realtindo
Pemerintah Kabupaten Trenggalek
PT Perkebunan Nusantara I
Badan Usaha Milik Desa East Java
PT Pertamina EP
Pemerintah Kabupaten Kediri
Perum Jasa Tirta I
PT Timah (Persero) Tbk
Others

Pendapatan Operasi Lain (Catatan 25)		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	31.316	30.649
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	20.476	-
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	739	508
PT Pertamina EP	155	3.664
Lainnya	-	1.954
	52.686	36.775

Other Operating Income (Note 25)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Semen Gresik (Persero) Tbk
PT Pertamina EP
Others

	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Beban Keuangan (Catatan 27)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	28.882	25.742
PT Bank Raya Indonesia Tbk	24.180	25.724
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	18.714	8.102
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.910	185
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1.860	-
	80.546	59.753

Beban Keuangan (Note 27)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Raya Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**28. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN
DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**28. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Rincian pihak berelasi, sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of related party, nature of relationship and type of significant transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi / Related parties	Sifat hubungan / Nature of relationship	Jenis transaksi/ Nature of transactions
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan dana pada bank, serta kas yang dibatasi penggunaannya/ <i>Placement on bank and restricted cash.</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan dana pada bank, deposito berjangka, kas dan deposito yang dibatasi penggunaannya, dan pinjaman/ <i>Placement on bank, time deposits, restricted cash and deposits, and loans.</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan dana pada bank, kas dan deposito yang dibatasi penggunaannya, dan pinjaman/ <i>Placement on bank, restricted cash and deposits, and loans</i>
PT Bank Tabungan Negara Syariah	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan deposito berjangka/ <i>Placement on time deposits</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan dana pada bank, deposito berjangka, dan pinjaman/ <i>Placement on bank, time deposits, and loans</i>
PT Bank Raya Indonesia Tbk	Dikendalikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/ <i>Controlled by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>	Penempatan dana pada bank, deposito yang dibatasi penggunaannya dan pinjaman/ <i>Placement on bank, restricted deposit, and loans</i>
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dikendalikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/ <i>Controlled by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>	Penempatan dana pada bank dan deposito berjangka/ <i>Placement on bank and time deposits</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah/ <i>Controlled by the Local Government of Central Java Province</i>	Penempatan dana pada bank/ <i>Placement on bank</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur/ <i>Controlled by the Local Government of East Java Province</i>	Penempatan dana pada bank/ <i>Placement on bank</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Perseroda)	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara/ <i>Controlled by the Local Government of East Borneo and North Borneo Province</i>	Penempatan dana pada bank/ <i>Placement on bank</i>

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**28. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN
DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**28. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Rincian pihak berelasi, sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of related party, nature of relationship and type of significant transactions with related parties are as follows: (continued)

Pihak-pihak berelasi / Related parties	Sifat hubungan / Nature of relationship	Jenis transaksi/ Nature of transactions
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penempatan dana pada pinjaman/Placement on loans
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit investasi/Investment credit
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan jasa rehabilitasi, sewa, dan lain-lain/Rehabilitation service, rent, and other income
PT Timah (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan jasa rehabilitasi/Rehabilitation service income
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Pengadaan perangkat lunak dan beban jasa telekomunikasi/Procurement of software and telecommunication service expense
PT HK Realtindo	Dikendalikan oleh PT Utama Karya (Persero)/Controlled by PT Utama Karya (Persero)	Pendapatan sewa/Rent income
PT Finnet Indonesia	Dikendalikan oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk/ Controlled by PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Jasa atas penyediaan layanan pembayaran penjualan kayu dan non-kayu/Online payment service of log and non-wood sales
PT Mandiri Utama Finance	Dikendalikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/Controlled by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pembiayaan kendaraan/Vehicles financing
Perum Jasa Tirta I	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan jasa rehabilitasi dan ekowisata/ Rehabilitation service and ecotourism
PT PG Rajawali I	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penjualan agroforestri/Agroforestry income
PT PG Rajawali II	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penjualan agroforestri/Agroforestry income

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**28. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN
DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Rincian pihak berelasi, sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**28. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES
WITH RELATED PARTIES (continued)**

The details of related party, nature of relationship and type of significant transactions with related parties are as follows: (continued)

Pihak-pihak berelasi / Related parties	Sifat hubungan / Nature of relationship	Jenis transaksi/ Nature of transactions
Pemerintah Daerah Kediri	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur/ Controlled by Local Government of East Java Province	Pendapatan ekowisata/Ecotourism Income
Badan Usaha Milik Daerah Jawa Timur	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur/ Controlled by Local Government of East Java Province	Pendapatan ekowisata/Ecotourism Income
PT Perkebunan Nusantara I	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ Controlled by PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Pembelian bibit tebu tahun dan penjualan agroforestri/ Purchase of sugarcane seeds and agroforestry income
PT Petrosida Gresik	Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero)/Controlled by PT Pupuk Indonesia (Persero) Tbk	Pembelian pupuk/Purchase of fertilizer
PT Pertamina Niaga	Dikendalikan oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero)/ Controlled by PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	Pembelian bahan bakar gas/Purchase of compressed natural gas
PT Pertamina EP	Dikendalikan oleh PT Pertamina (Persero) Tbk/Controlled by PT Pertamina (Persero) Tbk	Pendapatan sewa dan lain-lain/ Rent and other income
PT IDEC Abadi Wood Industries	Entitas asosiasi/Associates entity	Pendapatan penjualan kayu/Revenue of industrial wood
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah/ Controlled by Local Government Of Central Java	Pendapatan ekowisata/Ecotourism income
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk/ Controlled by PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Pendapatan ganti rugi/Compensation income
PG Tersana Baru	Dikendalikan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia/ Controlled by PT Rajawali Nusantara Indonesia	Penjualan agroforestri/Agroforestry Income
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic Indonesia	Penjualan ekowisata/Ecotourism Income
Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur/ Controlled by Local Government of East Java Province	Penjualan ekowisata/Ecotourism Income

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN KOMITMEN

a. Sanksi Denda oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Pada tanggal 21 Mei 2019, IHT I mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Samarinda dengan nomor perkara No. 40/G/2019/PTUN-SMD, untuk membatalkan SK Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Utara No. 915/38/Kpts-DPEH/II.1/V/2019 tentang sanksi Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH) kepada IHT I Semamu, Kabupaten Malinau sebesar Rp35.000 karena dianggap melakukan penebangan pada kawasan lindung dan penebangan di luar blok tebangan yang diizinkan.

IHT I telah mengirimkan korespondensi berupa upaya keberatan pada tanggal 31 Mei 2019 dengan surat No. 017/P.UMHA-SM/2019 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara namun ditolak dan dirujuk untuk melakukan keberatan melalui PTUN. IHT I kemudian didampingi oleh Dr. Sadino & Partners sebagai pengacara untuk mewakili IHT I dalam proses hukum ke PTUN Samarinda.

Pada tanggal 9 September 2019 berdasarkan surat No. 915/60/Kpts-DPEH/II.1/IX.2019, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara mencabut surat No. 915/38/Kpts-DPEH/II.1/V/2019 yang dinilai tidak sesuai kriteria tata cara administrasi hukum yang kemudian direvisi menjadi SK No. 915/61/Kpts-DPEH/II.1/IX.2019 pada tanggal 30 September 2019 dengan nilai gugatan yang kurang lebih sama.

Mengingat objek perkara berubah dari SK Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Utara No. 915/38/Kpts-DPEH/II.1/V/2019, menjadi SK No. 915/61/Kpts-DPEH/II.1/IX.2019, maka IHT I mencabut gugatan pada perkara No. 40/G/2019/PTUN-SMD tanggal 21 Mei 2019 dan mengajukan gugatan baru pada PTUN Samarinda dengan nomor perkara No. 71/G/2019/PTUN.SMD tanggal 19 Desember 2019.

29. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

a. Sanction by North Borneo Provincial Government

On May 21, 2019, IHT I file a lawsuit to Samarinda State Administrative Court ("PTUN") through letter No. 40/G/2019/PTUN-SMD, to terminate the Forestry Office of North Borneo Provincial Government Decree No. 915/38/Kpts-DPEH/II.1/V/2019 related to sanction Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH) to IHT I in Semamu area, Malinau District with claim value of Rp35,000 with accusation of logging in protected areas and logging outside the permitted cutting block.

IHT I has sent correspondence by filing an objection on May 31, 2019 with letter No. 017/P.UMHA-SM/2019 to the Head of the North Kalimantan Provincial Forestry Office but it was rejected and referred to the objection through PTUN. IHT I, appointed Dr. Sadino & Partners as a lawyer to represent the IHT I in the legal process at Samarinda PTUN Court.

On September 9, 2019, based on Decree No. 915/60/Kpts-DPEH/II.1/IX.2019, the Head of the North Kalimantan Provincial Forestry Office revoked letter No. 915/38/Kpts-DPEH/II.1/V/2019 which was not in accordance with the criteria for legal administration procedures, which were revised to Decree No. 915/61/Kpts-DPEH/II.1/IX.2019 on September 30, 2019 with a similar claim value.

Considering the object of the case changed from the Forestry Office of North Borneo Provincial Government Decree No. 915/38/KptsDPEH/II.1/V/2019, to Decree No. 915/61/Kpts-DPEH/II.1/IX.2019, IHT I revoke the lawsuit No. 40/G/2019/PTUN-SMD dated May 21, 2019 and filed a new lawsuit at Samarinda PTUN through letter No. 71/G/2019/PTUN.SMD dated December 19, 2019.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**29. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

**a. Sanksi Denda oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara (lanjutan)**

Pada tanggal 28 April 2020, PTUN Samarinda menolak permohonan banding IHT I. Atas putusan tersebut, IHT I mengajukan banding kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Jakarta No. 199/B/2020/PT.TUN.JKT. Pada tanggal 10 Agustus 2020, PTUN Jakarta menolak permohonan banding IHT I.

Pada tanggal 7 Januari 2021, IHT I telah mengajukan kasasi atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung ("MA") dengan No. 51K/TUN/2021. Namun, pada tanggal 3 Maret 2021 MA menolak permohonan kasasi IHT I.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, IHT I mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung yang telah teregister dengan perkara No. 26/PK/TUN/2022. Pada tanggal 24 Februari 2022, MA menolak permohonan peninjauan kembali IHT I. Atas tuntutan hukum tersebut, IHT I telah membukukan beban akrual sebesar Rp53.241 (Catatan 15).

b. Areal Laut Pelaihari, Kalimantan Selatan

Pada tanggal 30 Juli 2024, H. Abdul Hakim, dkk mengugat IHT I (Eks Inhutani III), PTPN IV (Ex PTPN XIII), PT Topaz Borneo Utama, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut - Pelaihari dan sembilan Perusahaan lainnya dengan nomor perkara 49/pdt.6/2024PN Pli atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah yang digunakan seluas 30.000 Ha (27.000 Ha diantaranya adalah milik IHT I) di Pungkat Kampung Kandangan, Kec. Taksung, Kab. Tanah Laut – Pelaihari, Kalimantan Selatan, yang diakui dimiliki oleh para penggugat.

Penggugat menuntut ganti rugi material sebesar Rp56.100, kerugian imateril sebesar Rp5.000 dan nilai tanah sebesar Rp3.000

Pada tanggal 29 Oktober 2024, Penggugat dan tergugat melakukan mediasi namun mediasi tersebut gagal. Sampai dengan laporan keuangan ini, proses hukum masih berlangsung.

**29. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS
(continued)**

**a. Sanction by North Borneo Provincial
Government (continued)**

On April 28, 2020, Samarinda PTUN rejected the IHT I lawsuit. Based on the decision, IHT I filed an appeal to Jakarta PTUN with No. 199/B/2020/PT.TUN.JKT. On August 10, 2020 Jakarta PTUN rejected the IHT I appeal.

On January 7, 2021, IHT I filed a cassation based on the decision to the Supreme Court with No. 51K/TUN/2021. However, on March 3, 2021, the Supreme Court rejected IHT I's appeal for cassation.

On August 30, 2021, IHT I filed a judicial review based on its decision to the Supreme Court which has been registered with case No. 26/PK/TUN/2022. On February 24, 2022, the Supreme Court rejected IHT I's appeal for judicial review. In response to the litigation case, IHT I has booked accrued expenses amounting to Rp53,241 (Note 15).

**b. Land Area of Laut Pelaihari, South
Kalimantan**

On July 30, 2024, H. Abdul Hakim and others filed a lawsuit against IHT I (formerly Inhutani III), PTPN IV (formerly PTPN XIII), PT Topaz Borneo Utama, the Land Office of Tanah Laut Regency - Pelaihari, and nine other companies with case number 49/pdt.6/2024PN Pli over the ownership and utilization of 30,000 hectares of land (27,000 hectares of which belong to IHT I) in Pungkat Kampung Kandangan, Taksung District, Tanah Laut Regency - Pelaihari, South Kalimantan, which is claimed to be owned by the plaintiffs.

The plaintiffs are demanding material compensation of Rp56,100, immaterial damages of Rp5,000, and land value of Rp3,000.

On October 29, 2024, the plaintiffs and defendants attempted mediation, but the mediation failed. As of the date of this financial report, the legal process is still ongoing.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**29. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

**b. Areal Laut Pelaihari, Kalimantan Selatan
(lanjutan)**

Pada tanggal 25 Juli 2025, Pengadilan negeri Pelaihari memutuskan "gugatan penggugat tidak dapat diterima atau *niet-ontvankelijk verklaard*."

Pada tanggal 7 Oktober 2025, putusan tingkat banding (PT Banjarmasin) No. 97/PDT/2025/PT BJM menguatkan putusan pengadilan negeri Pelaihari tanggal 25 Juli 2025. Atas putusan tingkat banding tersebut, para pemohon banding (penggugat) tidak mengajukan kasasi dalam waktu 14 hari sejak pengumuman putusan sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Oktober 2025.

c. Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Untuk tujuan tertentu kawasan hutan dapat ditetapkan salah satunya sebagai Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Penetapan KHDPK adalah sehubungan dengan: Perhutanan Sosial; Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan; Penggunaan Kawasan Hutan; Rehabilitasi Hutan; Perlindungan Hutan; atau Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

Penetapan KHDPK dilakukan pada areal yang tidak dilimpahkan pengelolaannya kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan pada sebagian Hutan Negara yang berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

**29. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS
(continued)**

**b. Land area of Laut Pelaihari, South Kalimantan
(continued)**

On July 25, 2025, the Pelaihari District Court ruled that "the plaintiff's lawsuit is inadmissible or *n niet-ontvankelijk verklaard*."

On October 7, 2025, the appeals court (Banjarmasin High Court) decision No. 97/PDT/2025/PT BJM affirmed the Pelaihari District Court's decision of July 25, 2025. The appellants (plaintiffs) did not file an appeal within 14 days of the announcement of the decision, so the decision became legally binding on October 21, 2025.

c. Forest Areas with Special Management

On February 2, 2021, the Government has stipulated Government Regulation Number 23 of 2021 concerning Forestry Management. For certain purposes a forest area can be designated as a Forest Area with Special Management (KHDPK). The establishment of KHDPK is in connection with: Social Forestry; Arrangement of Forest Areas in the framework of Forest Area Confirmation; Use of Forest Areas; Forest rehabilitation; Forest Protection; or Utilization of Environmental Services.

The establishment of KHDPK is carried out in areas where management has not been delegated to state-owned enterprises in the forestry sector in parts of State Forests located in Production Forest Areas and Preserved Forests in Central Java Province, East Java Province, West Java Province and Banten Province.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**29. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

**c. Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
(lanjutan)**

Selanjutnya, berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.311/MENLHK/SETJEN/KUM.0/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 perihal Tindak Lanjut Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, yang mana Direktur Utama Perum Perhutani memperoleh tembusannya, telah disampaikan:

- 1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tanggal 5 April 2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Pada Sebagian Hutan Negara Yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten;
- 2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus;
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1013/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Penetapan wilayah Pengelolaan Hutan Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Pada Sebagian Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

Berdasarkan keputusan-keputusan Menteri tersebut di atas, Pemerintah telah menetapkan KHDPK pada sebagian hutan negara yang berada pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten seluas $\pm 1.103.941$ Ha, dan telah menetapkan areal kerja Perum Perhutani pada sebagian hutan negara yang berada pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten seluas $\pm 1.380.682$ Ha. Sedangkan pengaturan terhadap aset tanaman dan aset lainnya Perum Perhutani yang berada pada areal yang ditetapkan pada KHDPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**29. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS
(continued)**

**c. Forest Areas with Special Management
(continued)**

Furthermore, based on the Letter of the Minister of Environment and Forestry No. S.311/MENLHK/SETJEN/KUM.0/10/2022 dated October 28, 2022 concerning Follow-up to the Revision of PP No. 72 of 2010 concerning State Forestry Public Companies (Perum) of which the Main Director of Perum Perhutani obtained a copy, it has been submitted:

- 1) Decree of the Minister of Environment and Forestry No. SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 dated April 5, 2022 concerning Designation of Forest Areas with Special Management in Part of State Forests Located in Production Forest Areas and Preserved Forests in Central Java Province, East Java Province, West Java Province and Banten Province.
- 2) Decree of the Minister of Environment and Forestry No. SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 dated May 18, 2022 concerning Policy for Management of Forest Areas with Special Management;
3. Decree of the Minister of Environment and Forestry No. SK.1013/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2022 dated September 20, 2022 concerning Stipulation of State Forestry Public Company (Perum) Forest Management Areas in Parts of Production Forest and Preserved Forest Areas in Central Java Province, East Java, West Java and Banten Province.

Based on the Ministerial decisions mentioned above, the Government has established KHDPK in some state forests located in production forest areas and preserved forests in Central Java Province, East Java Province, West Java Province and Banten Province with an area of $\pm 1,103,941$ Ha, and has stipulates that the working area of Perum Perhutani is part of state forests located in production forest areas and preserved forests in Central Java Province, East Java Province, West Java Province and Banten Province with an area of $\pm 1,380,682$ Ha. Meanwhile, the regulation of plantation assets and other assets of Perum Perhutani located in the area specified in the KHDPK is in accordance with statutory provisions.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**29. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

**c. Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
(lanjutan)**

Selanjutnya dalam Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.311/MENLHK/SETJEN/KUM.0/10/2022 tersebut, terhadap aset tanaman dan aset lain Perum Perhutani di areal KHDPK tetap dapat dimanfaatkan oleh Perum Perhutani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diintegrasikan pengaturannya dalam draft Rancangan Peraturan Pemerintah.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Rancangan Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara belum ditetapkan oleh Pemerintah namun telah mencapai tahap harmonisasi.

d. Perjanjian Keagenan Produk Hasil Hutan Bukan Kayu

Perusahaan mengadakan perjanjian keagenan dengan beberapa agen, dimana Perusahaan akan menjual produk hasil hutan bukan kayu melalui beberapa agen. Imbal jasa atas penjualan produk hasil hutan bukan kayu adalah 1,50% dari nilai harga jual dasar. Imbal jasa atas penjualan produk hasil hutan bukan kayu pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp26.910 (2024: Rp30.078) (Catatan 23).

30. PENGUKURAN NILAI WAJAR

- a) Nilai tercatat instrumen keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan kurang lebih sebesar nilai wajarnya. Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan lain-lain, utang usaha dan lain-lain dan biaya masih harus dibayar, mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek. Nilai tercatat dari liabilitas jangka panjang dengan suku bunga mengambang kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena dinilai ulang secara berkala.

**29. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS
(continued)**

**c. Forest Areas with Special Management
(continued)**

Furthermore, in the Minister of Environment and Forestry Letter No. S.311/MENLHK/SETJEN/KUM.0/10/2022, the plantation assets and other assets of Perum Perhutani in the KHDPK area can still be utilized by Perum Perhutani in accordance with statutory provisions and the arrangements are integrated in the draft Government Regulation Draft.

Up to the completion date of these consolidated financial statement, the Draft of Government Regulation in lieu of PP No. 72 of 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara have not been designed by the Government however, the draft have reached the harmonization stage.

d. Agency Agreements Non Wood Forest Products

The Company entered into agency agreements with several agents, whereby the Company will sell non wood forest products through several agents. Fees for sales of non wood forest products are 1.50% of the basic selling price. The fee for the sale of non wood forest products on December 31, 2025 amounting to Rp26,910 (2024: Rp30,078) (Note 23).

30. FAIR VALUE MEASUREMENT

- a) The carrying values of financial instruments presented in the statements of financial position approximate their fair values. Management believes that the carrying values of cash and cash equivalents, restricted cash, trade and other receivables, trade and other payables and accrued expenses approximate their fair values due to their short-term maturity. The carrying amounts of long-term liabilities with floating interest rates approximate their fair values as they are reassessed frequently.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

30. PENGUKURAN NILAI WAJAR (lanjutan)

- b) Nilai wajar aset biologis atas kayu tegakan ditentukan pada level 3, dengan menggunakan pendekatan pendapatan, sedangkan produk agrikultur (getah pinus dan daun kayu putih) ditentukan pada Level 2 berdasarkan harga pasar terkait yang diterapkan terhadap estimasi volume produk.

30. FAIR VALUE MEASUREMENT (continued)

- b) The fair values of standing timber are determined at Level 3 based on income approach, while the agricultural produce (pine sap and eucalyptus leave) are determined at Level 2 based on the applicable market price applied to the estimated volume of the product.

31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup menghadapi risiko keuangan yang timbul dari kegiatan operasional dan penggunaan instrumen keuangan. Risiko keuangan utama meliputi risiko suku bunga, risiko pasar (termasuk risiko mata uang dan risiko harga komoditas), risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan dan prosedur untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan instrumen keuangan Grup akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar.

Risiko tingkat suku bunga Grup terutama timbul dari utang jangka panjang. Pinjaman pada berbagai suku bunga menimbulkan risiko suku bunga atas nilai wajar kepada Grup. Tidak terdapat pinjaman Grup yang dikenakan suku bunga tetap.

Saat ini, Grup tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga.

Analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga

Pada tanggal 31 Desember 2025, jika tingkat suku bunga Grup sebesar 10% lebih rendah/tinggi, dengan semua variabel lain konstan, laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebesar Rp7.038 lebih tinggi/rendah.

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group is exposed to financial risks arising from its operations and the use of financial instruments. The key financial risks include interest rate risk, market risk (including foreign currency risk and commodity price risk), credit risk and liquidity risk. The Board of Director reviews and agrees policies and procedures for the management of these risks, which are described in more detail as follows:

Interest Rate Risks

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of the Group's financial instruments will fluctuate because of changes in market interest rates.

The Group's exposure to interest rate risk mainly arises from bank loans. Loans with various interest rates inflict interest rate risk on the fair value to the Group. There is no loan at fixed rates.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures.

Sensitivity analysis for rate risk

As of December 31, 2025, if the interest rate of the Group was 10% lower/higher, with all other variables constant, the income before income tax expense for the year ended on that date amounting to Rp7,038 higher/lower.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko Mata Uang

Risiko mata uang merupakan risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar mata uang. Risiko Grup atas fluktuasi nilai tukar mata uang terutama timbul dari penempatan kas dan setara kas dalam mata uang asing.

Saat ini, Grup tidak memiliki kebijakan lindung nilai yang formal untuk mengelola risiko mata uang.

Analisis sensitivitas untuk risiko nilai mata uang asing

Pada tanggal 31 Desember 2025, jika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS melemah/menguat sebanyak 10% dengan semua variabel konstan, laba sebelum beban pajak untuk tahun tersebut sebesar Rp12.494 lebih tinggi/rendah, terutama sebagai akibat keuntungan/kerugian translasi kas dan setara kas, kas di bank yang dibatasi penggunaannya, dan piutang usaha dalam Dolar AS, yang secara kolektif dalam posisi aset moneter neto.

Grup menghadapi risiko keuangan yang timbul dari kegiatan operasional dan penggunaan instrumen keuangan. Risiko keuangan utama meliputi risiko suku bunga, risiko pasar (termasuk risiko mata uang dan risiko harga komoditas), risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan dan prosedur untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

Risiko Harga Komoditas

Risiko harga komoditas adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi dikarenakan perubahan harga komoditas (selain yang timbul dari risiko tingkat suku bunga atau risiko mata uang asing), apakah perubahan ini disebabkan oleh faktor-faktor khusus untuk instrumen keuangan secara individu atau faktor yang mempengaruhi semua instrumen keuangan yang sama yang diperdagangkan di pasar.

Risiko harga komoditas Grup timbul dari penjualan kayu dan non kayu (gondorukem, terpentin, minyak kayu putih dan getah pinus). Harga barang baku dan barang jadi dapat berfluktuasi secara signifikan tergantung pada situasi pasar dan faktor-faktor lain seperti cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran di pasar dan lingkungan ekonomi global.

**31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Currency Risk

Currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in currency exchange rates. Risk of the Group against fluctuations in currency values arises mainly from placement of cash and cash equivalent in foreign currency.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy to manage currency risk.

Sensitivity analysis for foreign currency risk

As of December 31, 2025, if the Rupiah exchange rate against the US Dollar weakened / strengthened by 10% with all variables constant, profit before tax expense for the year amounting to Rp12,494 higher/lower, mainly as a result of cash translation gains/losses from cash equivalents, restricted cash in bank, and trade receivables in US Dollars, which are collectively in a position of net monetary assets.

The Group is exposed to financial risks arising from its operations and the use of financial instruments. The key financial risks include interest rate risk, market risk (including foreign currency risk and commodity price risk), credit risk and liquidity risk. The Board of Director reviews and agrees policies and procedures for the management of these risks, which are described in more detail as follows:

Commodity Price Risk

Commodity price risk is the risk that fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in commodity prices (other than those arising from interest rate risk or foreign currency risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument or factors affecting all similar financial instruments traded in the market.

The Group's exposure to commodity price risk arises from its sales of wood and non wood (gum rosin, turpentine, eucalyptus oil and pine sap). Prices of raw material and finished products may fluctuate significantly depending on the market situation and factors such as weather, government policy, level of demand and supply in the market and the global economic environment.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko Harga Komoditas (lanjutan)

Pada saat ini, Grup tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko harga komoditas.

Risiko Kredit

Risiko kredit yang dihadapi oleh Grup berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan dan penempatan rekening koran dan deposito pada bank.

Selain dari pengungkapan di bawah ini, Grup tidak memiliki konsentrasi risiko kredit.

Kas dan Setara Kas

Risiko kredit atas penempatan rekening koran dan deposito dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan Grup. Investasi atas kelebihan dana dibatasi untuk tiap-tiap bank dan kebijakan ini dievaluasi setiap tahun oleh dewan direksi. Batas tersebut ditetapkan untuk meminimalkan risiko konsentrasi kredit sehingga mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank-bank tersebut.

Piutang Usaha

Terdapat kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dilakukan kepada pelanggan yang dapat dipercaya dengan rekam jejak atau sejarah kredit yang baik. Merupakan kebijakan Grup bahwa semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Untuk penjualan ekspor, Grup mensyaratkan pembayaran saat penyerahan dokumen penjualan. Grup memiliki kebijakan yang membatasi jumlah kredit untuk tiap-tiap pelanggan dan saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang tak tertagih.

Ketika pelanggan gagal melakukan pelunasan sesuai dengan syarat pembayaran, Grup akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Grup akan menempuh jalur hukum. Sesuai dengan evaluasi oleh Grup, penyisihan spesifik dapat dibuat jika utang dianggap tidak tertagih. Untuk menekan risiko kredit, Grup akan menghentikan penyaluran semua produk kepada pelanggan yang terlambat dan/atau gagal bayar.

**31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Commodity Price Risk (continued)

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for commodity price exposures.

Credit Risk

The Group has credit risk arising from the credits granted to the customers and placement of current accounts and deposits in the banks.

Other than as disclosed below, the Group has no concentration of credit risk.

Cash and Cash Equivalents

Credit risk arising from placements of current accounts and deposits is managed in accordance with the Group's policy. Investments of surplus funds are limited for each bank and reviewed annually by the board of directors. Such limits are set to minimize the concentration of credit risk and therefore mitigate financial loss through potential failure of the banks.

Trade Receivables

The Group has policies in place to ensure that sales of products are made only to creditworthy customers with proven track records or good credit history. It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. For export sales, the Group requires cash against the presentation of documents of title. The Group has policies that limit the amount of credit exposure to any particular customer and receivable balances are monitored on an ongoing basis to reduce the Group's exposure to bad debts.

When a customer fails to make payment within the granted credit terms, the Group will contact the customer to act on overdue receivable. If the customer does not settle the overdue receivable within a reasonable time, the Group will proceed with legal action. Depending on the Group's assessment, specific provisions may be made if the debt is deemed uncollectible. To mitigate its credit risk, the Group will cease the supply of all products to customers in the event of late payment and/or default.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan oleh karena keterbatasan dana.

Grup mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi utang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan bank.

Grup secara teratur mengevaluasi proyeksi arus kas proyeksi dan aktual dan terus menerus memantau tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel dibawah ini merupakan daftar jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskontokan:

**31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Group will have difficulty in fulfilling its financial obligation due to limited availability of funds.

The Group manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditure and service its maturing debts by maintaining sufficient cash and bank.

The Group regularly evaluates its projected and actual cash flow information and continuously assesses the maturity date of financial assets and liabilities.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities, based on contractual undiscounted payments:

31 Desember 2025/December 31, 2025

	Kurang dari 1 Tahun/ Less Than 1 Year	1 - 5 Tahun/ 1 - 5 Year	Di atas 5 Tahun/ More Than 5 Years	Total/ Total	
Pinjaman bank jangka pendek	851.479	-	-	851.479	Short-term bank loans
Beban akrual	201.413	-	-	201.413	Accrued expenses
Utang usaha	143.160	-	-	143.160	Trade payables
Liabilitas jangka pendek lainnya	175.106	-	-	175.106	Other short-term liabilities
Pinjaman bank jangka panjang	168.563	-	-	168.563	Long-term bank loans
Pinjaman jangka panjang lainnya	2.124	6.371	84.481	92.976	Other long-term loans
Liabilitas sewa	23.184	6.571	-	29.755	Lease liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	9.998	-	9.998	Other long-term liabilities
Total	1.565.029	22.940	84.481	1.672.450	Total

31 Desember 2024/December 31, 2024

	Kurang dari 1 Tahun/ Less Than 1 Year	1 - 5 Tahun/ 1 - 5 Year	Di atas 5 Tahun/ More Than 5 Years	Total/ Total	
Pinjaman bank jangka pendek	766.923	-	-	766.923	Short-term bank loans
Beban akrual	190.057	-	-	190.057	Accrued expenses
Utang usaha	189.424	-	-	189.424	Trade payables
Liabilitas jangka pendek lainnya	188.311	-	-	188.311	Other short-term liabilities
Pinjaman bank jangka panjang	90.621	168.567	-	259.188	Long-term bank loans
Pinjaman jangka panjang lainnya	2.124	8.495	87.660	98.279	Other long-term loans
Liabilitas sewa	25.395	13.002	-	38.397	Lease liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	7.251	-	7.251	Other long-term liabilities
Total	1.452.855	197.315	87.660	1.737.830	Total

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas Grup adalah sebagai berikut:

2025	1 Januari/ January 1	Arus Kas Masuk/ Cash In	Arus Kas Keluar/ Cash Out	Lain-Lain/ Others	31 Desember/ December 31	2025
Pinjaman bank jangka pendek	708.598	82.760	-	-	791.358	Short-term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	238.334	-	(83.333)	-	155.001	Long-term bank loans
Pinjaman jangka Panjang lainnya	95.517	-	(5.168)	-	90.349	Other long-term loans
Liabilitas sewa	33.323	-	(28.920)	23.778	28.181	Lease liabilities
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	1.075.772	82.760	(117.421)	23.778	1.064.889	Total liabilities from financing activities
2024	1 Januari/ January 1	Arus Kas Masuk/ Cash In	Arus Kas Keluar/ Cash Out	Lain-Lain/ Others	31 Desember/ December 31	2024
Pinjaman bank jangka pendek	460.218	213.284	-	35.096	708.598	Short-term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	160.148	78.186	-	-	238.334	Long-term bank loans
Pinjaman jangka Panjang lainnya	103.192	-	(7.675)	-	95.517	Other long-term loans
Liabilitas sewa	60.342	-	(27.561)	542	33.323	Lease liabilities
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	783.900	291.470	(35.236)	35.638	1.075.772	Total liabilities from financing activities

Lain-lain pada pinjaman bank jangka pendek merupakan bunga pinjaman yang ditambahkan menjadi bank jangka pendek

Changes in liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flows are as follows:

Others in short-term bank loans represent interest capitalize to short-term bank loans.

32. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

32. ADDITIONAL CASH FLOW INFORMATION

	2025	2024	
Transaksi non-kas			Non-cash transaction
Penambahan aset hak guna melalui liabilitas sewa	23.778	542	Additions of right-of-use assets through lease liabilities
Penambahan utang bank melalui bunga pinjaman bank jangka pendek	-	35.096	Additions of bank loan through interest expense of short-term bank loans
Perolehan aset tetap melalui utang usaha	10.501	37.452	Additions of fixed assets through trade payables
Perolehan aset tetap melalui kapitalisasi beban keuangan	18.319	-	Additions of fixed assets through capitalization of borrowing cost

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

**Pemberhentian dan pengangkatan anggota-
anggota Direksi dan pengangkatan anggota-
anggota Dewan Pengawas**

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara No. SK-135/MBU/02/2026, tanggal 24 Februari 2026, tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara menetapkan beberapa hal berikut ini:

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Muhammad Denny Ermansyah sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, Umum dan Informasi Teknologi Informasi, dan digantikan dengan Bapak Andus Winarno.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Endung Trihartaka sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan, dan digantikan dengan Bapak Anggar Widiyatmoko.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengaturan BUMN No. 163 Tahun 2026 tanggal 10 Maret 2026 tentang Penunjukkan sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara menetapkan Bapak Tio Handoko sebagai Direktur Utama menggantikan Bapak Natalas Anis Harjanto sebagai Plt. Direktur Utama

Berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Selaku Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Nomor 68 Tahun 2026, tanggal 28 Januari 2026, tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara menetapkan beberapa hal berikut ini:

1. Mengangkat Bapak Raden Mas Aris Santosa sebagai Ketua Dewan Pengawas.
2. Mengangkat Bapak Khairul Jasmi sebagai Anggota Dewan Pengawas.
3. Mengangkat Bapak Muhammad Sholeh sebagai Anggota Dewan Pengawas Independen.

Berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Selaku Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Nomor 125 Tahun 2026, tanggal 13 Februari 2026, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara menetapkan Bapak Mahfudz sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara menggantikan Bapak Muhammad Sholeh.

33. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

**Dismissal and appointment of members of the
Board of Directors and appointment of members
of the Supervisory Board**

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the representative of the Government as the Capital Owner of Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan negara No. SK-135/MBU/02/2026, dated February 24, 2026, regarding the dismissal and appointment of members of the Board of Directors of Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara stipulates the following matters:

1. Honorably dismissed Mr. Muhammad Denny Ermansyah as Director of Human Resources, General, and Information Technology, and was replaced by Mr. Andus Winarno.
2. Honorably dismissed Mr. Endung Trihartaka as Director of Planning and Development, and was replaced by Mr. Anggar Widiyatmoko.

Based on the Decree of the Head of the State-Owned Enterprises Regulatory Agency No. 163 of 2026 dated March 10, 2026 concerning the Appointment as President Director of the State Forestry Public Company (PERUM), Mr. Tio Handoko was appointed as President Director replacing Mr. Natalas Anis Harjanto as interim President Director.

Based on a Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the representative of the Government as the Capital Owner of Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan negara No. 68, dated January 28, 2026, regarding the appointment of members of the Supervisory Board of Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara stipulates the following matters:

1. Appoint Mr. Raden Mas Aris Santosa as Chairman of the Supervisory Board.
2. Appoint Mr. Khairul Jasmi as a Member of the Supervisory Board.
3. Appoint Mr. Muhammad Sholeh as an Independent Member of the Supervisory Board.

Based on a Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the representative of the Government as the Capital Owner of Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan negara No. 125, dated February 13, 2026, regarding the appointment of members of the Supervisory Board of Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, Mr. Mahfudz was appointed as a member of the Supervisory Board replacing Mr. Muhammad Sholeh.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**33. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)**

Perkembangan geopolitik di Timur Tengah

Setelah tanggal pelaporan, ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat menyusul tindakan militer di kawasan tersebut pada akhir Februari 2026. Perkembangan ini menyebabkan meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan volatilitas di pasar keuangan dan energi global.

Grup menilai potensi dampak terhadap operasi, posisi keuangan, dan kinerja keuangan Grup yang dapat timbul melalui beberapa faktor, termasuk:

- volatilitas harga komoditas dan energi global
- gangguan pada rantai pasokan dan logistik global
- ketidakpastian makroekonomi yang lebih luas yang memengaruhi permintaan pelanggan
- volatilitas di pasar valuta asing dan pasar keuangan

Saat ini Grup tidak memiliki operasi langsung yang signifikan di negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik tersebut. Namun, dampak ekonomi yang lebih luas akibat situasi geopolitik tersebut dapat memengaruhi operasi dan kinerja keuangan Grup secara tidak langsung.

Pada tanggal otorisasi atas laporan keuangan ini, tidak memungkinkan untuk mengestimasi secara andal dampak keuangan yang mungkin timbul akibat potensi eskalasi lebih lanjut dari konflik tersebut pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Manajemen akan terus memonitor perkembangan terkait konflik ini dan menilai potensi dampaknya pada periode pelaporan berikutnya.

**33. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

Geopolitical developments in the Middle East

Subsequent to the reporting date, geopolitical tensions in the Middle East escalated following military actions in the region at the end of February 2026. These developments have resulted in heightened geopolitical uncertainty and increased volatility in global financial and energy markets.

The Group assesses the potential implications on the results of the Group's operations, financial position and financial performance which may arise through several factors, including:

- *volatility in global commodity and energy prices*
- *disruptions in global supply chains and logistics*
- *broader macroeconomic uncertainty affecting customer demand*
- *volatility in foreign exchange and financial markets.*

The Group does not currently have significant direct operations in the countries directly involved in the conflict. However, the broader economic effects resulting from the geopolitical situation may indirectly affect the Group's operations and financial performance.

At the date of authorization of these financial statements, it is not possible to reliably estimate the financial impact that further escalation of the conflict may have on the Group's consolidated financial statements.

Management will continue to monitor developments relating to the conflict and assess potential implications in future reporting periods.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF**

Standar akuntansi baru dan amandemen standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Grup pada saat efektif.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026

Amendemen PSAK 109 and PSAK 107: Klasifikasi dan Pengukuran Instrument Keuangan

Amandemen tersebut mencakup klarifikasi atas suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada "tanggal penyelesaian" serta memperkenalkan pilihan kebijakan akuntansi (apabila kondisi tertentu terpenuhi) untuk menghentikan pengakuan liabilitas keuangan yang diselesaikan melalui sistem pembayaran elektronik sebelum tanggal penyelesaian. Selain itu, panduan tambahan ditambahkan mengenai bagaimana arus kas kontraktual untuk aset keuangan dengan fitur lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) serta fitur serupa harus dinilai. Amandemen tersebut juga mengklarifikasi apa saja yang merupakan fitur *non-recourse* dan karakteristik instrumen yang terkait secara kontraktual. Selain itu, amandemen tersebut memperkenalkan persyaratan pengungkapan untuk instrumen keuangan dengan fitur kontinjensi serta persyaratan pengungkapan tambahan untuk instrumen ekuitas yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (OCI).

**34. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE**

The new and amended standards that have been issued up to the date of issuance of the Group's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Group when they become effective.

Effective beginning on or after January 1, 2026

Amendments to PSAK 109 and PSAK 107: Classification and Measurement of Financial Instruments

The amendments includes a clarification that a financial liability is derecognised on the 'settlement date' and the introduction of an accounting policy choice (if specific conditions are met) to derecognise financial liabilities settled using an electronic payment system before the settlement date. Further, additional guidance is added on how the contractual cash flows for financial assets with environmental, social and corporate governance (ESG) and similar features should be assessed. The amendments also clarifies what constitute 'non-recourse features' and what are the characteristics of contractually linked instruments. The amendments also introduces of disclosures for financial instruments with contingent features and additional disclosure requirements for equity instruments classified at fair value through other comprehensive income (OCI).

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari
2026 (lanjutan)**

Amendemen PSAK 109 and PSAK 107: Klasifikasi
dan Pengukuran Instrument Keuangan (lanjutan)

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026, dengan penerapan dini diperkenankan hanya untuk klasifikasi aset keuangan dan pengungkapan terkait. Grup tidak memperkirakan bahwa amandemen tersebut akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

Amendemen PSAK 109 and PSAK 107: Kontra yang
Mengacu Pada Listrik Bergantung Alam

Amandemen tersebut mengklarifikasi penerapan persyaratan *own-use* untuk kontrak yang berada dalam ruang lingkup, mengubah persyaratan penetapan (*designation*) atas item yang dilindungi dalam hubungan lindung nilai arus kas untuk kontrak-kontrak tersebut, serta menambahkan persyaratan pengungkapan baru untuk memungkinkan investor memahami dampak kontrak tersebut terhadap kinerja keuangan dan arus kas perusahaan.

Amandemen tersebut akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026. Penerapan dini diperbolehkan, namun harus diungkapkan. Amandemen terkait pengecualian *own-use* diterapkan secara retrospektif, sedangkan amandemen akuntansi lindung nilai diterapkan secara prospektif untuk hubungan lindung nilai baru yang ditetapkan sejak tanggal penerapan awal. Selain itu, amandemen pengungkapan dalam PSAK 107 harus diterapkan bersamaan dengan amandemen PSAK 109. Grup tidak memperkirakan bahwa amandemen tersebut akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

**34. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

**Effective beginning on or after January 1, 2026
(continued)**

Amendments to PSAK 109 and PSAK 107:
Classification and Measurement of Financial
Instruments (continued)

The Amendments are effective for annual periods starting on or after January 1, 2026 with early adoption permitted for classification of financial assets and related disclosures only. The Group does not anticipate that the amendments will have a material effect on the Group's financial statements.

Amendments to PSAK 109 and PSAK 107:
Contracts Referencing Nature-dependent
Electricity

The amendments clarify the application of the 'own-use' requirements for in-scope contracts, amend the designation requirements for a hedged item in a cash flow hedging relationship for in-scope contracts, and add new disclosure requirements to enable investors to understand the effect of these contracts on a company's financial performance and cash flows.

The amendments will take effect for annual reporting periods starting on or after January 1, 2026. Early adoption is allowed, but it must be disclosed. The amendments concerning the own-use exception are to be applied retrospectively, while the hedge accounting amendments should be applied prospectively to new hedging relationships designated from the initial application date. Additionally, the PSAK 107 disclosure amendments must be implemented alongside the PSAK 109 amendments. The Group does not anticipate that the amendments will have a material effect on the Group's financial statements.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari
2026 (lanjutan)**

PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
(Revisi 2025)

Pada Oktober 2025, DSAK IAI mengesahkan revisi atas PSAK 338: *Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali*. Revisi ini mencakup ruang lingkup dan penerapan dari metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*) dan pelepasan di ekuitas (*disposal in equity*) sebagai konsep akuntansi yang digunakan dalam PSAK 338. Perubahan utama mencakup pengecualian entitas investasi dari ruang lingkup PSAK 338, serta tambahan definisi bisnis alihan, entitas penerima, dan entitas pengalih. Revisi ini juga mencakup rujukan jumlah tercatat bisnis alihan dan penyajian informasi prakombinasi bisnis ketika terjadi ketidakpraktisan dalam penerapan metode penyatuan kepemilikan. Revisi ini berlaku efektif 1 Januari 2026 dengan opsi penerapan dini.

PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
(Revisi 2025) - lanjutan

Grup tidak memperkirakan bahwa amandemen tersebut akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

Penyesuaian tahunan 2024

DSAK IAI menerbitkan Penyesuaian Tahunan 2024 SAK Indonesia), yang mencakup klarifikasi, penyederhanaan, koreksi, atau perubahan untuk meningkatkan konsistensi dalam PSAK 107 *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*, PSAK 109 *Instrumen Keuangan*, PSAK 10 *Laporan Keuangan Konsolidasian*, dan PSAK 207 *Laporan Arus Kas*. Amandemen tersebut akan berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026. Penerapan lebih awal diperkenankan dan harus diungkapkan. Amandemen tersebut tidak diharapkan menimbulkan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

**34. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

**Effective beginning on or after January 1, 2026
(continued)**

PSAK 338: Business Combination under Common
Control (2025 Revision)

On October 2025, DSAK IAI issued revisions to PSAK 338: *Business Combinations of Entities Under Common Control*. The revisions cover the scope and application of the pooling of interest method and disposal in equity as the accounting concepts used in PSAK 338. The key changes include the exclusion of investment entities from the scope of PSAK 338, as well as the addition of definitions for transferred business, receiving entity, and transferring entity. The revision also includes references to the carrying amount of the transferred business and the presentation of pre-combination information when applying the pooling of interest method is impracticable. The revision is effective on 1 January 1, 2026 with early adoption permitted.

PSAK 338: Business Combination under Common
Control (2025 Revision) - Continued

The Group does not anticipate that the amendments will have a material effect on the Group's financial statements.

Annual Improvements 2024

The DSAK IAI issued Annual Improvements 2024 to SAK Indonesia, which include clarifications, simplifications, corrections or changes to improve consistency in, PSAK 107 *Financial Instruments: Disclosure*, PSAK 109 *Financial Instruments*, PSAK 110 *Consolidated Financial Statements* and PSAK 207 *Statements of Cash Flows*. The amendments will be effective for reporting periods beginning on or after 1 January 2026. Earlier application is permitted and must be disclosed. The amendments are not expected to have a material impact on the Group's financial statements.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari
2027**

PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam
Laporan Keuangan

PSAK 118 akan menggantikan PSAK 201. Standar baru ini memperkenalkan persyaratan baru terkait penyajian dalam laporan laba rugi, termasuk total dan subtotal tertentu. Selain itu, entitas diwajibkan untuk mengklasifikasikan seluruh pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi ke dalam salah satu dari lima kategori: operasi, investasi, pendanaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan.

Standar ini juga mensyaratkan pengungkapan ukuran kinerja yang didefinisikan manajemen, subtotal pendapatan dan beban, serta mencakup persyaratan baru terkait agregasi dan disagregasi informasi keuangan.

PSAK 118 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diperkenankan dan harus diungkapkan. PSAK 118 akan diterapkan secara retrospektif.

Grup saat ini sedang mengidentifikasi seluruh dampak yang akan timbul atas laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan terkait implementasi amandemen tersebut.

PSAK 119: Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik -
Pengungkapan

Standar baru tersebut memungkinkan entitas yang memenuhi syarat untuk memilih menerapkan pengungkapan yang lebih singkat dan tetap menerapkan persyaratan pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam standar akuntansi lainnya. Untuk memenuhi syarat, pada akhir periode pelaporan, entitas harus merupakan entitas anak sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 110, tidak memiliki akuntabilitas publik, dan memiliki entitas induk (baik entitas induk akhir atau entitas induk perantara) yang menyusun laporan keuangan konsolidasian yang tersedia untuk penggunaan publik dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan SAK Indonesia, SAK Internasional atau IFRS accounting standards.

**34. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

Effective beginning on or after January 1, 2027

PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial
Statements

PSAK 118 will replace PSAK 201. The new standard introduces new requirements for presentation within the statement of profit or loss, including specified totals and subtotals. Furthermore, entities are required to classify all income and expenses within the statement of profit or loss into one of five categories: operating, investing, financing, income taxes and discontinued operations.

The standard requires disclosure of newly defined management-defined performance measures, subtotals of income and expenses, and it also includes new requirements for aggregation and disaggregation of financial information.

PSAK 118 are effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2027, but earlier application is permitted and must be disclosed. PSAK 118 will apply retrospectively.

The Group is currently working to identify all impacts the amendments will have on the primary financial statements and notes to the financial statements.

PSAK 119: Subsidiaries without Public
Accountability - Disclosures

The new standard allows eligible entities to elect to apply its reduced disclosure requirements and still applying the recognition, measurement and presentation requirements in other accounting standards. To be eligible, at the end of the reporting period, an entity must be a subsidiary as defined in PSAK 110, cannot have public accountability and must have a parent (ultimate or intermediate) that prepares consolidated financial statements, available for public use, which comply with SAK Indonesia, SAK Internasional or IFRS accounting standards.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari
2027**

PSAK 119: Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik
– Pengungkapan (lanjutan)

PSAK 119 akan berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diperkenankan. Grup memperkirakan bahwa standar baru tersebut tidak akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

**34. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

Effective beginning on or after January 1, 2027

PSAK 119: Subsidiaries without Public
Accountability – Disclosures (continued)

PSAK 119 will become effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2027, with early application permitted. The Group anticipates that the new standard will have no material effect on the Group's financial statements.